

AUDITING

Teori, Standar dan Implementasi Profesional

Emayanti Christina Hutabarat, Izza Maulida Santoso,
Raya Puspita Sari Hasibuan, Syarifah Massuki Fitri, Tiara Nurpratiwi
Bella Chenia Meitasir, Dedy Suryadi, Nanda Putra Saragi
RR. Prima Dita Hapsari, Wenny Anggeresia Ginting, Armadani
Puji Setya Sunarka, Arlina Ginting, Widiya Pratiwi
Khoirunnisa Cahya Firdarini, Refiana Yuliawati

Editor : Bambang Arianto, S.E., M.Ak., M.Ak., Ak



PENERBIT CV. JAWARA KREASINOGRAPHI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

AUDITING

Teori, Standar dan Implementasi Profesional

Penulis : Emayanti Christina Hutabarat
Izza Maulida Santoso
Raya Puspita Sari Hasibuan
Syarifah Massuki Fitri
Tiara Nurpratiwi
Bella Chenia Meitasir
Dedy Suryadi
Nanda Putra Saragi
RR. Prima Dita Hapsari
Wenny Anggeresia Ginting
Armadani
Puji Setya Sunarka
Arlina Ginting
Widiya Pratiwi
Khoirunnisa Cahya Firdarini
Refiana Yuliawati

Editor : Bambang Arianto, S.E., M.Ak., M.Ak., Ak

Desain Sampul :

Tata Letak : Ika Puji A.

ISBN :

Diterbitkan oleh : **JAWARA KREASINOGRAFI,**
AGUSTUS 2026
ANGGOTA IKKAPI 089/BANTEN/2025

Redaksi:

Jalan Lingkungan Tegal Jeruk RT 2 RW 7, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang
Anggota IKAPI 089/Banten/2025
Provinsi Banten Telp. 081-214-839-667
Surel: jawarakreasinografi@gmail.com
Cetakan Pertama: 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi,
merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari
penerbit.

JANVARA

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Auditing: Teori, Standar dan Implementasi Profesional dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca. Buku ini disusun sebagai salah satu kontribusi akademik dalam memperkaya kajian Auditing.

Auditing: Teori, Standar dan Implementasi Profesional merupakan kajian ilmiah perihal proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan independen terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan, serta aktivitas operasional suatu entitas. Auditing tidak hanya berfungsi mencocokkan angka, tetapi juga menilai kewajaran informasi, kecukupan bukti, efektivitas prosedur, dan risiko salah saji material.

Dalam praktik profesional, audit memerlukan dasar teori yang kuat, pemahaman standar pemeriksaan, etika profesi, skeptisisme profesional, serta kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan yang rasional dan terukur. Pemahaman terhadap auditing penting karena audit berperan menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan dan tata kelola organisasi. Melalui audit, laporan keuangan dapat dinilai apakah telah disusun sesuai standar yang berlaku dan bebas dari salah saji material.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan pembaca, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun praktik Auditing.

Kota Serang, Juni 2026

JANVARA

DAFTAR ISI

PRAKATA i

DAFTAR ISI..... iii

BAB 1 KONSEP DAN CAKUPAN AUDITING 1

 Emayanti Christina Hutabarat, S.Ak., M.Ak.

 A. Pendahuluan1

 B. Definisi Audit.....2

 C. Konsep Audit8

 D. Profesi Audit9

 E. Tujuan Audit11

 F. Jenis Audit12

 G. Teknik Audit14

 H. Asersi Manajemen15

BAB 2 STANDAR AUDIT DAN ETIKA PROFESI 21

 Izza Maulida Santoso, S.E., M.Ak., ACPA

 A. Pendahuluan21

 B. Konsep Dasar Audit22

 C. Standar Audit24

 D. Etika Profesi Akuntan28

BAB 3 TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN RISIKO PROFESI AUDITOR..... 37

 Dr. Raya Puspita Sari Hasibuan, S.E., M.Si., CERA., CRP., QGIA

 A. Pendahuluan37

 B. Konsep Dasar Tanggung Jawab Profesi Auditor38

 C. Tanggung Jawab Auditor terhadap Pengguna Laporan Keuangan39

 D. Tanggung Jawab Hukum dan Pengelolaan Risiko Profesi 42

 E. Studi Kasus Manipulasi dan Independensi Auditor44

 F. Kegagalan Deteksi Fraud dan Implikasi Profesional.....47

BAB 4 PROSES AUDIT DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN	53
Syarifah Massuki Fitri, S.E., MSA., Ak., CA.	
A. Pendahuluan	53
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit	54
C. Tahapan Pemeriksaan Audit	57
D. Pendekatan Audit Modern	59
E. Tantangan Dalam Proses Audit	60
F. Teknik dan Prosedur Audit	60
G. Simpulan	62
BAB 5 PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO	67
Tiara Nurpratiwi, S.E., M.Si., Ak., CA	
A. Pendahuluan	67
B. Pengendalian Internal	68
C. Manajemen Risiko	75
D. Hubungan Signifikan antara Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Organisasi	78
BAB 6 BUKTI AUDIT DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	83
Bella Chenia Meitasir, S.E., M.Ak.	
A. Pengertian Bukti Audit	83
B. Sifat Bukti Audit	85
C. Kompetensi Jenis-jenis Bukti Audit	86
D. Teknik Pengumpulan Data Audit	87
E. Pemilihan Item Bukti Audit	88
F. Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Bukti	91
BAB 7 DOKUMENTASI AUDIT DAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN	95
Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.Ftax	
A. Pendahuluan	95
B. Konsep Dasar Dokumentasi Audit	97
C. Kertas Kerja Pemeriksaan	101
D. Penyusunan dan Teknik Dokumentasi Audit	107
BAB 8 PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO DAN MATERIALITAS	111
Nanda Putra Saragi, S.Ak., M.Si.	
A. Pendahuluan	111
B. Perencanaan Audit Berbasis Risiko	112
C. Penilaian Risiko dan Materialitas Audit	117
D. Hubungan Standar Audit dalam Perencanaan Audit	119
E. Ringkasan Bab	120

BAB 9 AUDIT KAS DAN SETARA KAS.....	125
RR. Prima Dita Hapsari, S.E., M.Si., Ak., CA.	
A. Pendahuluan	125
B. Definisi Kas dan Setara Kas.....	126
C. Sifat dan Contoh Kas/Setara Kas	126
D. Evaluasi Pengendalian Internal (<i>Internal Control</i>)	128
E. Tujuan dan Prosedur Audit (Audit Program)	130
F. Pemeriksaan Pembatasan Kas (<i>Restricted Cash</i>) dan Valuta Asing.....	131
G. Deteksi Kecurangan Spesifik: <i>Lapping & Kiting</i>	133
H. Ringkasan.....	134
BAB 10 AUDIT PIUTANG DAN PENDAPATAN.....	139
Wenny Anggeresia Ginting, M.Ak	
A. Pendahuluan	139
B. Hubungan Piutang dan Pendapatan.....	140
C. Tujuan Audit Utama Siklus Piutang dan Pendapatan	140
D. Konsep Audit Siklus Pendapatan.....	141
E. Memahami Proses Bisnis Klien.....	143
F. Materialitas	143
G. Dokumen-Dokumen Terkait	144
H. Prosedur Audit Siklus Pendapatan	144
I. Konsep Siklus Piutang	146
J. Prosedur Audit Siklus Piutang	147
BAB 11 AUDIT SIKLUS PERSEDIAAN DAN PERGUDANGAN ..	151
Armadani S.E., M.A.	
A. Pendahuluan	151
B. Definisi	152
C. Fungsi bisnis dan dokumen terkait	152
D. Bagian-bagian penting dalam audit siklus persediaan dan pergudangan.....	153
E. Merancang dan melaksanakan pengujian audit akuntansi biaya	156
F. Penerapan prosedur analitis substantif pada akun-akun dalam siklus persediaan dan pergudangan.	158
G. Merancang dan melaksanakan pengujian audit observasi fisik untuk inventaris	159
H. Merancang dan melaksanakan pengujian audit terhadap penetapan harga dan penyusunan persediaan.....	161
BAB 12 AUDIT INVESTASI DAN INSTRUMEN KEUANGAN.....	165
Dr. Puji Setya Sunarka, S.Pd., S.E., M.Si.	
A. Konsep Dasar Audit Investasi dan Instrumen Keuangan	165

B.	Karakteristik Investasi dan Instrumen Keuangan.....	167
C.	Risiko Audit pada Investasi dan Instrumen Keuangan ...	170
D.	Prosedur Audit atas Investasi	172
E.	Prosedur Audit atas Instrumen Keuangan	174
F.	Penyajian, Pengungkapan, dan Kesimpulan Audit.....	177
BAB 13 AUDIT ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD		183
Arlina Ginting, S.E., M.Si.		
A.	Pendahuluan	183
B.	Proses Pemeriksaan	184
C.	Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap serta Aset Tidak Berwujud.....	185
D.	Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Penghentian, Pengungkapan, dan Penyajian.....	188
E.	Prosedur Pemeriksaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud.....	193
F.	Simpulan	197
BAB 14 AUDIT KEWAJIBAN DAN EKUITAS.....		201
Widiya Pratiwi, M.Ak		
A.	Konsep Dasar Audit Kewajiban dan Ekuitas.....	201
B.	Karakteristik Kewajiban dalam Laporan Keuangan.....	204
C.	Risiko Audit atas Kewajiban	206
D.	Prosedur Audit atas Kewajiban	208
E.	Audit atas Ekuitas.....	210
F.	Penyajian, Pengungkapan, dan Kesimpulan Audit.....	212
BAB 15 LAPORAN AUDIT DAN OPINI AUDITOR		219
Khoirunnisa Cahya Firdarini, S.E., M.Si.		
A.	Pendahuluan	219
B.	Konsep Laporan Audit.....	220
C.	Format dan Opini Auditor	222
D.	Faktor Penentu Opini Auditor	228
E.	Implikasi Opini Auditor	230
BAB 16 AUDIT DIGITAL DAN TRANSFORMASI PROFESI		235
Refiana Yulawati, S.Pd., M.Akun		
A.	Konsep Dasar Audit Digital	235
B.	Perkembangan Teknologi dalam Praktik Audit.....	238
C.	Pemanfaatan <i>Data Analytics</i> dalam Audit	240
D.	Teknologi Baru dalam Audit Modern	242
E.	Tantangan dan Risiko Audit Digital	244
F.	Transformasi Profesi Auditor di Era Digital.....	245

BAB 1



KONSEP DAN CAKUPAN AUDITING

Emayanti Christina Hutabarat, S.Ak., M.Ak.
Universitas Mulawarman Samarinda

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis dan sektor publik yang semakin kompleks menuntut adanya informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan menjadi salah satu alat utama bagi berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, terdapat potensi kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*) yang dapat menyebabkan informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, adanya pemisahan antara pihak yang mengelola perusahaan (manajemen) dalam hal ini disebut sebagai *agent* dan pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) yang disebut sebagai *principal*, menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pihak independen yang mampu memberikan penilaian objektif terhadap kewajaran informasi yang disajikan. Audit hadir sebagai solusi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan melalui proses pemeriksaan yang sistematis dan berbasis bukti. Dengan demikian, audit menjadi elemen penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*), baik di sektor swasta maupun sektor publik.

B. Definisi Audit

Audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang independen (auditor) dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan *auditee*. Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, mengacu pada bukti pendukung, catatan pembukuan yang telah dikumpulkan. Audit dilakukan dengan sikap rasional bukan berdasarkan asumsi atau intuisi semata. Hasil akhir dari proses audit yaitu berupa opini (pendapat) tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan. Namun dalam perkembangan ilmu auditing, audit tidak lagi terbatas pada aspek keuangan, melainkan juga mencakup audit operasional, audit kepatuhan, audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigatif, hingga audit sektor publik.

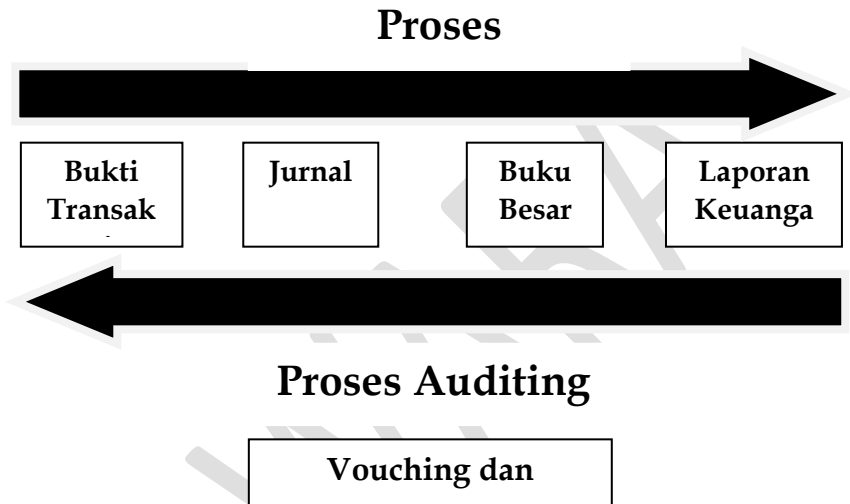
1. Definisi Audit Menurut Para Ahli

- a. Arens (2020)
Audit adalah suatu pemeriksaan pembukuan oleh auditor yang disertai dengan pemeriksaan fisik persediaan untuk memastikan bahwa semua departemen mengikuti sistem pencatatan transaksi yang terdokumentasi.
- b. Sukrisno Agoes (2017)
Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Montgomery (1990)
Audit adalah pemeriksaan sistematis atas catatan organisasi untuk memverifikasi dan melaporkan fakta-fakta mengenai operasi keuangan dan hasilnya.

2. Perbedaan Akuntansi dan Audit

Akuntansi merupakan suatu proses bisnis atas transaksi keuangan yang dimulai dari pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Sedangkan audit adalah proses pemeriksaan dan evaluasi atas laporan keuangan untuk menilai

kewajarannya, dengan mengumpulkan bukti audit, menguji kebenaran data, dan mengevaluasi laporan keuangan. Audit berfokus untuk menentukan apakah informasi yang dicatat benar-benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Hasil dari pemeriksaan audit yaitu pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan. Agar lebih mudah dipahami, definisi audit yaitu membandingkan antara fakta atau kejadian nyata dengan kriteria dan aturan yang ditetapkan.



Gambar 1.1. Alur Proses Akuntansi dan Auditing

Dari gambar diatas, menunjukkan perbedaan yang jelas antara akuntansi dan auditing. Proses akuntansi dimulai dari tahap awal bukti transaksi yakni dokumen sumber yang menunjukkan bahwa suatu transaksi ekonomi benar-benar terjadi, kemudian jurnal merupakan tempat pencatatan awal transaksi secara kronologis. Pada tahap ini akuntan akan mengidentifikasi transaksi, menentukan akun yang berpengaruh, posisi debit dan kredit serta mencatat nilai nominal dari transaksi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar merupakan tempat untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akunnya, misalnya kas, piutang, utang, beban. Pada tahap akhir yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses pengolahan transaksi, dimana saldo-saldo dari buku besar akan disajikan ke dalam laporan keuangan. Proses akuntansi ini merupakan proses pengolahan data transaksi menjadi informasi keuangan.

Sedangkan proses auditing merupakan kebalikan dari proses akuntansi. Tahap awal dari proses auditing yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah objek audit yang akan diuji. Auditor akan menilai apakah laporan disusun sesuai standar akuntansi, apakah angka-angkanya masuk akal, apakah ada akun yang berisiko tinggi, apakah ada indikasi salah saji material. Tahap selanjutnya adalah menelusuri buku besar terdiri dari melihat komposisi saldo suatu akun, mengetahui transaksi apa saja yang membentuk saldo, menilai apakah klasifikasi akun sudah tepat, dan mendeteksi akun yang tampak tidak wajar atau fluktuatif. Kemudian tahap berikutnya adalah jurnal. Pada jurnal auditor mengetahui bagaimana transaksi awal dicatat, apakah tanggal pencatatan sesuai, apakah akun yang digunakan tepat, dan apakah nilai yang dicatat sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Kemudian, tahap akhir dan paling mendasar adalah memeriksa bukti transaksi. Di sini auditor menilai apakah transaksi yang dicatat benar-benar didukung oleh dokumen yang sah dan memadai. Apakah transaksi benar-benar terjadi, apakah transaksi milik entitas, apakah nominalnya benar, apakah tanggalnya sesuai, apakah ada otorisasi yang semestinya, dan apakah dokumen asli mendukung pencatatan tersebut. Bagian dari proses auditing tersebut, auditor melakukan *vouching* yaitu pemeriksaan dari catatan akuntansi menuju dokumen pendukung. Kemudian, auditor melakukan *tracing* yaitu pemeriksaan dari dokumen sumber menuju catatan akuntansi.

3. Pentingnya Audit

Audit sangat penting untuk dilakukan karena laporan keuangan yang disusun oleh manajemen harus dapat dipertanggung jawabkan dan menyediakan informasi yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan tersebut dipergunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Arens (2020) menjelaskan bahwa audit dibutuhkan untuk menurunkan resiko informasi, tanpa audit pengguna informasi harus memverifikasi sendiri data yang mereka terima dan dalam praktiknya enderung mahal, tidak efisien, dan sering tidak realistis. Audit penting dilakukan karena adanya potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit yang terjadi dalam proses pencatatan informasi keuangan. Berikut ini Ada 2 jenis kesalahan atau penyimbangan yang terjadi:

1) Tidak disengaja (disebut *error*)

Kesalahan yang tidak disengaja ini adalah tindakan yang terjadi tanpa niat buruk atau sengaja merugikan pihak lain.

Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian, atau kekurangan informasi, dan tidak melibatkan tujuan atau motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh: kesalahan tulis (*clerical error*), salah mengartikan instruksi, bug sistem yang menyebabkan entri data tidak akurat.

2) Disengaja (disebut kecurangan/*fraud/irregularity*)

Kesalahan yang disengaja ini adalah bentuk kecurangan berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat buruk untuk memperoleh keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Oleh karenanya, niat curang sering kali dapat diidentifikasi melalui pola-pola tertentu dalam tindakan atau perilaku yang dilakukan. Kecurangan biasanya melibatkan perencanaan dan pemikiran strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan, sering kali dengan mengabaikan atau melanggar aturan yang berlaku. Contoh: faktur palsu, penggelapan dana, penyalahgunaan aset perusahaan.

4. Karakteristik Audit

Karakteristik audit tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Setiap karakteristik berperan dalam menjamin kualitas hasil audit, mulai dari proses pengumpulan bukti hingga penyusunan laporan yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Adapun karakteristik audit terdiri dari:

a. Bersifat Sistematis dan Terstruktur

Audit merupakan proses yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang jelas dan terencana. Proses ini dimulai dari perencanaan audit, pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, penilaian risiko, penentuan materialitas, pelaksanaan prosedur audit, evaluasi bukti, hingga penyusunan laporan audit. Sifat sistematis menunjukkan bahwa audit tidak dilakukan secara acak atau spontan, melainkan berdasarkan metodologi yang telah dikembangkan dalam standar audit.

b. Berbasis Bukti (*Evidence-Based*)

Salah satu karakteristik paling fundamental dalam audit adalah ketergantungannya pada bukti. Auditor tidak dapat menyimpulkan sesuatu tanpa didukung oleh bukti yang cukup dan tepat. Bukti audit menjadi dasar dalam membentuk opini, simpulan, maupun rekomendasi. Bukti audit dapat diperoleh melalui berbagai teknik, seperti inspeksi dokumen,

observasi, konfirmasi kepada pihak ketiga, wawancara, rekalkulasi, hingga prosedur analitis. Kualitas audit sangat ditentukan oleh kualitas bukti yang diperoleh. Oleh karena itu, auditor harus mampu menilai keandalan sumber bukti, relevansi bukti terhadap tujuan audit, serta kecukupan jumlah bukti untuk mendukung simpulan yang diambil.

- c. Menggunakan Kriteria atau Standar yang Jelas
Audit dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual dengan kriteria tertentu. Kriteria ini berupa standar akuntansi, peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, prosedur operasional, atau indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya kriteria yang jelas, auditor tidak memiliki dasar untuk menilai apakah suatu kondisi dapat dianggap sesuai atau tidak sesuai.
- d. Bersifat Objektif dan Independen
Objektivitas dan independensi merupakan karakteristik utama yang melekat pada audit. Auditor harus bersikap netral, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu penilaiannya. Independensi tidak hanya berkaitan dengan kondisi faktual, tetapi juga persepsi pihak lain terhadap integritas auditor. Objektivitas mengharuskan auditor untuk menilai berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan pihak tertentu. Sementara itu, independensi memastikan bahwa auditor tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil audit.
- e. Mengandung Unsur Pertimbangan Profesional (*Professional Judgment*)
Audit tidak sepenuhnya bersifat mekanis. Pada praktiknya, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam berbagai tahap, yakni dalam menentukan tingkat materialitas, menilai risiko, memilih prosedur audit, mengevaluasi bukti, serta menyusun simpulan. Pertimbangan profesional didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman auditor terhadap standar dan konteks audit.
- f. Menerapkan Skeptisisme Profesional
Skeptisisme profesional merupakan sikap kritis yang harus dimiliki auditor dalam setiap tahap audit. Auditor tidak boleh menerima informasi begitu saja tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Namun, skeptisisme juga tidak berarti sikap curiga berlebihan, melainkan kewaspadaan rasional terhadap kemungkinan adanya salah saji atau penyimpangan. Auditor akan lebih berhati-hati dalam mengevaluasi bukti dan tidak

mudah terpengaruh oleh penjelasan yang tidak didukung fakta.

- g. Berorientasi pada Risiko (*Risk-Based Approach*)
Audit mengadopsi pendekatan berbasis risiko. Artinya, auditor memfokuskan perhatian pada area yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya salah saji material atau ketidaksesuaian. Pendekatan ini memungkinkan audit dilakukan secara lebih efisien dan efektif, karena sumber daya audit difokuskan pada aspek yang paling signifikan. Auditor terlebih dahulu mengidentifikasi dan menilai risiko, kemudian merancang prosedur audit yang sesuai untuk merespons risiko tersebut.
- h. Memiliki Keterbatasan Inheren
Audit memiliki keterbatasan yang melekat secara alami. Auditor tidak dapat memberikan jaminan absolut bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangan dalam objek yang diaudit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penggunaan teknik sampling, keterbatasan waktu dan biaya, kemungkinan kolusi, serta keterbatasan sistem pengendalian internal. Oleh sebab itu, hasil audit berupa *reasonable assurance*, yaitu tingkat keyakinan yang memadai, bukan kepastian mutlak.
- i. Menghasilkan Laporan sebagai *Output* Utama
Audit diakhiri dengan penyusunan laporan yang berisi hasil pemeriksaan, simpulan, opini, atau rekomendasi. Laporan audit merupakan media komunikasi antara auditor dengan pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan audit sangat menentukan nilai dari keseluruhan proses audit. Laporan harus disusun secara jelas, objektif, ringkas, namun tetap informatif. Pada audit laporan keuangan, laporan audit berbentuk opini auditor. Pada audit internal dan audit pemerintah, laporan biasanya memuat temuan dan rekomendasi perbaikan.
- j. Berbasis Standar dan Etika Profesional
Audit harus dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, baik standar internasional maupun standar nasional. Standar ini mengatur prinsip, prosedur, dan kualitas pelaksanaan audit. Selain itu, auditor juga terikat pada kode etik profesi yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kepatuhan terhadap standar dan etika menjadi jaminan bahwa audit dilakukan secara profesional dan dapat dipercaya.

C. Konsep Audit

Secara konseptual, audit tidak sekadar kegiatan “memeriksa kesalahan”, tetapi merupakan proses pemberian keyakinan yang rasional mengenai apakah suatu objek audit telah disajikan, dijalankan, atau dilaksanakan sesuai dengan standar, kebijakan, regulasi, dan tujuan organisasi. Audit merupakan upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti secara kritis. Auditor tidak bekerja berdasarkan dugaan, melainkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Berdasarkan bukti tersebut, auditor menyusun pertimbangan profesional untuk menyimpulkan apakah terdapat kesesuaian antara kondisi aktual dengan kriteria yang digunakan. Oleh sebab itu, audit memiliki posisi penting dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, audit mencakup tiga unsur pokok terdiri dari:

- 1) Adanya objek yang diaudit, misalnya laporan keuangan, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, atau efektivitas kegiatan operasional.
- 2) Adanya kriteria sebagai dasar pembanding, seperti standar akuntansi, peraturan perundang-undangan, SOP, atau indikator kinerja.
- 3) Adanya bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi untuk mendukung simpulan auditor.

1. Sifat Audit

Untuk memahami audit secara utuh, perlu dipahami terlebih dahulu sifat-sifat dasarnya. Sifat audit merupakan ciri-ciri pokok yang melekat pada setiap proses audit. Sifat audit menggambarkan karakter utama yang membedakan audit dari kegiatan pemeriksaan biasa, yaitu adanya informasi yang diuji, kriteria yang menjadi dasar penilaian, bukti yang dikumpulkan, auditor yang kompeten dan independen, serta pelaporan sebagai hasil akhir dari proses audit. Dengan demikian, sifat audit mencerminkan kerangka konseptual yang menopang seluruh kegiatan audit. Ada 4 jenis sifat audit yang saling berkaitan terdiri dari:

- 1) Informasi dan Kriteria yang telah ditetapkan
Kriteria untuk mengevaluasi informasi bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit. Pada audit laporan keuangan kriteria yang berlaku berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam ini di Indonesia menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Untuk audit pengendalian internal

atas pelaporan keuangan kriterianya adalah kerangka kerja untuk mengembangkan pengendalian internal seperti *Internal Control Integrated Framework* yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*.

2) Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bukti

Bukti (*evidence*) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Bukti memiliki berbagai bentuk terdiri atas:

- Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien)
- Komunikasi tertulis dengan pihak luar
- Observasi oleh auditor
- Data elektronik dan data lain tentang transaksi

3) Kompeten dan Independen

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor harus berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor yang mengeluarkan laporan keuangan perusahaan sering disebut auditor independen.

4) Pelaporan

Tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (*audit report*), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan audit memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

D. Profesi Audit

Profesi audit adalah bidang pekerjaan profesional yang berfokus pada kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan pemberian keyakinan atas informasi, sistem, proses, atau aktivitas suatu entitas. Tujuan utamanya adalah menilai apakah informasi yang disajikan telah sesuai dengan kriteria tertentu, dapat dipercaya, dan bebas dari salah saji material.

Profesi audit ini diperankan oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan menyediakan jasa audit kepada perusahaan (klien).

Seorang Akuntan Publik harus memiliki gelar sertifikasi yaitu *Certified Public Accountant* (CPA). Pemakaian gelar *Certified Public Accountant* (CPA) diatur oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2008 mengatur persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan izin berpraktik di Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memperoleh CPA maka harus memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan dan persyaratan lisensi yang ditetapkan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah kantor yang didirikan oleh Akuntan bersertifikasi Akuntan Publik, untuk melaksanakan praktik jasa profesionalnya sebagai akuntan publik.

2. Jenis-Jenis Auditor

Berikut ini ada beberapa jenis auditor terdiri atas:

a. Auditor Eksternal

Auditor eksternal merupakan auditor independen (pihak eksternal) dari luar organisasi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Setelah proses audit selesai, auditor memberikan opini tentang laporan keuangan apakah sudah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Contohnya : auditor KAP, maupun auditor BPK.

b. Auditor Internal

Auditor internal bagian dari organisasi, namun ditempatkan sedemikian rupa agar tetap objektif dalam mengawasi sistem pengendalian, efektivitas operasi, manajemen risiko, keamanan sistem informasi perusahaan, misalnya melaporkan kepada pimpinan tertinggi atau komite audit tentang operasi perusahaan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Namun, dalam praktiknya auditor internal tidak sepenuhnya independen seperti auditor eksternal karena ada hubungan pegawai dengan perusahaan.

c. Auditor Pemerintahan

Auditor pemerintahan adalah auditor yang bekerja untuk lembaga atau aparat pengawasan negara untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara, kepatuhan terhadap peraturan, dan kinerja program pemerintah. Auditor pemerintah menilai kewajaran informasi keuangan pemerintah, menilai kepatuhan terhadap undang-undang maupun aturan, memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan *good governance*, serta melindungi penggunaan uang publik.

d. Auditor Forensik

Auditor forensik adalah audit investigasi yang berfokus pada pengungkapan, penelusuran, analisis, dan pembuktian dugaan *fraud* atau *misconduct* yang berpotensi berdampak hukum. Auditor forensik berfokus bukan pada kewajaran umum laporan, melainkan pada indikasi penyimpangan tertentu, melakukan pendekatan yang lebih investigative dan tidak hanya pengujian audit rutin. Hasil kerja dari auditor forensik digunakan untuk kepentingan litigasi, arbitrase, atau proses hukum. Auditor ini harus menggabungkan kemampuan akuntansi, audit, investigasi, dokumentasi bukti, dan pemahaman aspek hukum.

E. Tujuan Audit

Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan program audit yang dilakukan auditor. Tujuan audit ini memberikan kerangka kerja bagi auditor untuk mengumpulkan bukti dan memutuskan apakah bukti yang telah dikumpulkan sesuai dengan penugasannya. Tujuan audit dirumuskan sesuai dengan asersi manajemen yang merepresentasikan secara eksplisit tentang laporan keuangan perusahaan. Auditor akan menguji apakah asersi tersebut sudah menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya melalui bukti yang sudah dikumpulkan. Selain itu, tujuan audit juga untuk menilai apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Melalui proses ini, audit berperan dalam meningkatkan keandalan informasi keuangan, mengurangi risiko informasi bagi para pengguna laporan, serta memperkuat kepercayaan *stakeholder* terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas. Dengan demikian, audit tidak hanya berfungsi sebagai sarana verifikasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan audit secara keseluruhan atas audit laporan keuangan meliputi:

- a. Memperoleh keyakinan memadai tentang laporan keuangan apakah bebas dari salah saji material secara keseluruhan, baik yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) maupun kesalahan (*error*). Kemudian auditor memberikan opini tentang laporan keuangan yang telah diperiksa, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

- b. Melaporkan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh standar audit berdasarkan temuan auditor.

F. Jenis Audit

Pada praktiknya, audit dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan pemeriksaan dan pihak yang melaksanakannya. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis audit memiliki fokus, ruang lingkup, prosedur, dan hasil yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis audit, dapat diketahui bahwa audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap efisiensi operasional, kepatuhan terhadap aturan, serta akuntabilitas pengelolaan organisasi. Berikut ini dijelaskan secara rinci tentang jenis audit berdasarkan tujuan dan pelaksanaannya.

1. Berdasarkan Tujuannya

Berdasarkan tujuannya, audit dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yang terdiri atas:

- a. Audit operasional
Audit operasional yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen umumnya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Pada audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, namun juga mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi computer, metode produksi dan bidang lain yang dikuasai oleh auditor.
- b. Audit ketaatan (*compliance audit*)
Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Adapun contoh audit ketaatan seperti menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pengawas perusahaan, menelaah tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum, memeriksa perjanjian kontraktual dengan bank dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan hukum.
- c. Audit laporan keuangan
Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) diimplementasikan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai

dengan kriteria tertentu. Umumnya, kriteria yang berlaku Adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Meskipun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

2. Berdasarkan Pelaksananya

Berdasarkan pelaksananya, audit dibagi menjadi 3 (tiga) jenis terdiri dari:

a. Audit internal

Audit internal adalah audit yang dilaksanakan oleh pihak atau unit yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Pelaksana audit ini umumnya adalah satuan pengawasan internal, unit audit internal, atau pejabat yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan evaluasi atas kegiatan organisasi. Meskipun auditor internal berasal dari dalam organisasi, mereka tetap dituntut untuk bekerja secara objektif, profesional, dan independen secara fungsional terhadap aktivitas yang diperiksanya. Secara konseptual, audit internal berfungsi sebagai alat bantu manajemen. Audit ini dilakukan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik, apakah kegiatan operasional berlangsung secara efisien dan efektif, apakah risiko organisasi telah dikelola dengan memadai, dan apakah setiap unit telah mematuhi kebijakan serta prosedur yang berlaku. Maka dari itu, orientasi audit internal tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan juga pada upaya perbaikan sistem dan peningkatan kinerja organisasi. Ruang lingkup audit internal relatif luas, mencakup pemeriksaan laporan keuangan internal, kepatuhan terhadap SOP, efektivitas operasional, pengelolaan aset, evaluasi manajemen risiko, hingga pemeriksaan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan atau *fraud*.

b. Audit eksternal

Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi yang diperiksa, terutama oleh auditor independen atau kantor akuntan publik. Disebut eksternal karena pelaksananya tidak menjadi bagian dari struktur organisasi klien, sehingga secara kelembagaan lebih independen dibanding auditor internal. Independensi ini menjadi unsur utama karena hasil audit eksternal umumnya digunakan oleh pihak-pihak luar, seperti investor, kreditur, regulator, dan masyarakat. Audit eksternal sering dikaitkan dengan audit

atas laporan keuangan. Pada konteks ini, auditor eksternal bertugas memeriksa apakah laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setelah melakukan audit, auditor eksternal akan menyampaikan opini audit sebagai bentuk simpulan profesional atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

c. Audit pemerintah

Audit pemerintah adalah audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa pemerintah atau aparat pengawasan negara terhadap instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta entitas lain yang mengelola keuangan negara atau keuangan publik. Audit ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola sektor publik yang baik. Pelaksana audit pemerintah dapat berasal dari lembaga pemeriksa eksternal negara maupun aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam konteks Indonesia, audit pemerintah dilakukan antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal sektor publik, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti inspektorat dan BPKP pada ranah pengawasan internal pemerintah. Karena itu, audit pemerintah memiliki karakter yang khas, yaitu berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program publik.

G. Teknik Audit

Teknik audit merupakan sarana yang digunakan auditor dalam pekerjaannya untuk memperoleh bukti audit. Teknik-teknik utama audit terdiri atas:

a. Pemeriksaan Fisik (*Physical Examination*)

Pemeriksaan langsung oleh auditor terhadap aset berwujud seperti kas, persediaan maupun aset tetap untuk memverifikasi keberadaan dan kondisinya. Contohnya: pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*), pemeriksaan fisik aset tetap (*asset opname*).

b. Konfirmasi (*Confirmation*)

Prosedur mendapatkan jawaban tertulis langsung dari pihak eksternal yang independen seperti bank, debitur, maupun kreditur untuk memverifikasi akurasi informasi, yaitu saldo bank, piutang, utang dan modal.

- c. **Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)**
Evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan, termasuk perbandingan rasio atau tren historis. Memeriksa rasio dan saldo yang signifikan.
- d. **Perhitungan Ulang (*Recalculation*)**
Mengecek keakuratan perhitungan klien, seperti perkalian harga dan kuantitas, penjumlahan faktur, atau perhitungan depresiasi. Tidak hanya menghitung ulang, auditor juga harus mengetahui metode akuntansi yang digunakan klien untuk menghasilkan perhitungan tersebut. Contohnya: perhitungan HPP perusahaan dan metode yang digunakan.
- e. **Pengamatan (*Observation*)**
Mengamati secara langsung pelaksanaan suatu prosedur atau aktivitas oleh karyawan klien, seperti pengamatan saat persediaan barang jadi keluar dari gudang, pengamatan perhitungan kas (*cash on hand*).
- f. **Inspeksi (*Inspection*)**
Pemeriksaan rinci terhadap dokumen, catatan internal maupun eksternal), atau aset berwujud. Contohnya: memeriksa surat perjanjian kontrak sewa guna usaha dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penghasilan.
- g. **Dokumentasi (*Documentation*)**
Teknik memeriksa dokumen pendukung seperti voucher, faktur, dan kontrak untuk memastikan transaksi tercatat dengan benar dan sah. Dokumen ini diperiksa untuk melihat validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi yang dilakukan.
- h. **Bertanya kepada klien (*Inquiry to Client*)**
Mendapatkan informasi tertulis atau lisan dari klien melalui pertanyaan, wawancara, atau diskusi mengenai hal-hal yang tidak jelas dalam laporan. Seperti menanyakan sistem pengendalian terhadap aset tetap perusahaan.

H. Asersi Manajemen

Asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh manajemen yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Asersi ini meliputi berbagai deklarasi yang disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab atas laporan tersebut, baik secara implisit maupun eksplisit, untuk dapat digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pada laporan keuangan historis, asersi adalah klaim manajemen yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan atau asersi ini dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu sebagai berikut: Adapun asersi manajemen meliputi:

a. Keberadaan (*Occurance*)

Aseri ini berkaitan dengan apakah aset atau dana perusahaan benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat memang terjadi dalam periode tersebut.

b. Keterjadian (*Existence*)

pernyataan manajemen bahwa transaksi dan peristiwa yang dicatat selama periode pelaporan benar-benar telah terjadi dan berkaitan dengan entitas, sedangkan asersi keberadaan adalah pernyataan manajemen bahwa aset, liabilitas, dan unsur ekuitas yang disajikan pada akhir periode benar-benar ada. Dengan demikian, keterjadian berorientasi pada transaksi, sedangkan keberadaan berorientasi pada saldo akhir

c. Kelengkapan (*Completeness*)

Aseri kelengkapan menjamin bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya ditampilkan dalam laporan keuangan telah dicatat secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, manajemen menyatakan bahwa semua pembelian barang dan jasa telah dicatat serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Begitu pula, utang usaha di neraca mencakup seluruh kewajiban perusahaan.

d. Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligation*)

Aseri ini mengacu pada apakah aset yang tercantum di laporan keuangan benar-benar menjadi hak perusahaan dan apakah utang adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa aset sewa guna usaha yang dicantumkan dalam neraca mencerminkan hak perusahaan atas aset yang disewa, dan kewajiban yang tercatat juga menggambarkan kewajiban perusahaan terkait.

e. Penilaian dan Alokasi (*Valuation and Allocation*)

Aseri mengenai penilaian dan alokasi berkaitan dengan keakuratan pencatatan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen mengasumsikan bahwa aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, dan alokasi biaya dari aset tersebut ke periode akuntansi dilakukan secara tepat. Begitu pula, manajemen mengasersi bahwa piutang usaha yang dicatat di neraca disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan (*Persentation and Disclosure*)

Aseri ini memastikan komponen laporan keuangan disajikan, diklasifikasikan, dan diungkapkan dengan tepat. Contohnya, auditor mengasumsikan bahwa kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo

dalam satu tahun. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa pos luar biasa di laporan laba-rugi diklasifikasikan dan diungkapkan dengan semestinya.

JAWAB

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik (Edisi 5)*. Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach (17th ed.)*. Pearson.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*. ACFE.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. BPK RI.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control-Integrated framework*. COSO.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia efektif per 1 Januari 2025*. IAI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik*. IAPI.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2019). *International Standard on Auditing 315 (Revised 2019): Identifying and assessing the risks of material misstatement*. International Federation of Accountants.
- Montgomery, R. H., O'Reilly, V. M., McDonnell, P. J., Winograd, B. N., Gerson, J. S., & Jaenicke, H. R. (1990). *Montgomery's auditing*. Wiley.
- The Institute of Internal Auditors. (2024). *Global internal audit standards*. The Institute of Internal Auditors.

TENTANG PENULIS



**Emayanti Christina Hutabarat, S.Ak., M.Ak.
Universitas Mulawarman Samarinda**

Penulis lahir di Padang Sidempuan, 02 Mei 1993. Penulis menempuh Pendidikan Diploma 3 di Universitas Indonesia pada Program Studi Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Keuangan, lulus tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Sarjana di Universitas Trisakti dengan Program Studi S1 Akuntansi, lulus tahun 2017 dan melanjutkan Studi Magister tahun 2021 di Universitas Sebelas Maret pada Program Studi Magister Akuntansi, lulus tahun 2023. Penulis merupakan Dosen aktif di Universitas Mulawarman. Buku ini merupakan buku ke lima yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

JANVARA



BAB 2

STANDAR AUDIT DAN ETIKA PROFESI

Izza Maulida Santoso, S.E., M.Ak., ACPA
Politeknik Negeri Lampung

A. Pendahuluan

Profesi akuntan memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian modern karena berkaitan langsung dengan penyediaan informasi keuangan yang andal dan relevan bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga tingkat keandalan dan kredibilitasnya harus dijaga secara konsisten (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2012). Dalam konteks ini, auditor sebagai bagian dari profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Peran auditor tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang tinggi karena hasil audit memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap entitas bisnis. Oleh karena itu, pelaksanaan audit harus didasarkan pada standar yang jelas serta nilai-nilai etika yang kuat. Standar audit memberikan pedoman sistematis mengenai prosedur, teknik, dan tahapan yang harus dilakukan auditor dalam proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2012). Dengan adanya standar

tersebut, kualitas audit dapat dijaga agar tetap konsisten dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas.

Di sisi lain, etika profesi berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap auditor (Hayes et al., 2014). Penerapan etika profesi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa auditor tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kejujuran dan independensi dalam setiap keputusan yang diambil. Ketidadaan penerapan standar audit dan etika profesi yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya kualitas audit, meningkatnya risiko kecurangan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Berbagai kasus skandal keuangan di tingkat global menunjukkan bahwa kegagalan audit sering kali tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis, tetapi juga oleh pelanggaran etika profesi (Agoes, 2017). Hal ini menegaskan bahwa standar audit dan etika profesi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik audit. Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, termasuk digitalisasi dan globalisasi, tuntutan terhadap kualitas audit dan integritas profesi akuntan semakin meningkat. Auditor dituntut untuk tidak hanya memahami standar audit secara mendalam, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dalam setiap aspek pekerjaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai standar audit dan etika profesi menjadi sangat penting, baik bagi praktisi maupun akademisi, dalam rangka meningkatkan kualitas audit dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

B. Konsep Dasar Audit

Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai laporan keuangan guna menentukan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum (Agoes, 2011). Proses ini dilakukan oleh auditor yang independen dengan tujuan memberikan tingkat keyakinan tertentu kepada para pengguna laporan keuangan. Independensi auditor menjadi aspek krusial karena menjamin bahwa opini yang diberikan bebas dari pengaruh pihak manapun dan dapat dipercaya. Secara konseptual, audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi atas sistem pengendalian internal,

kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas operasional entitas (IAI, 2007).

Dengan demikian, audit memiliki peran yang lebih luas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Tujuan utama audit adalah memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material. Opini tersebut didasarkan pada bukti audit yang cukup dan tepat (*sufficient and appropriate audit evidence*), yang diperoleh melalui berbagai prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, dan analisis (Porter et al., 1997). Auditor harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan audit. Dalam pelaksanaannya, audit mengikuti tahapan yang sistematis, yaitu:

Tabel 2.1. Tahapan Audit

Tahapan Audit	Ruang Lingkup
Perencanaan Audit	mencakup pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya serta penilaian risiko kesalahan material
Pelaksanaan Audit	pengumpulan dan pengujian bukti audit
Pelaporan Audit	penyusunan laporan auditor yang berisi opini atas laporan keuangan

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2007)

Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan harus dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku agar hasil audit memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, konsep penting dalam audit adalah materialitas dan risiko audit. Materialitas berkaitan dengan tingkat signifikansi suatu informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, sedangkan risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Agoes, 2011). Auditor harus mempertimbangkan kedua konsep ini dalam merancang prosedur audit agar dapat meminimalkan risiko kesalahan. Dengan demikian, audit merupakan proses yang terstruktur, berbasis bukti, dan memerlukan pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang tinggi. Keberhasilan audit sangat bergantung pada kompetensi auditor, kualitas bukti yang diperoleh, serta kepatuhan terhadap standar audit dan prinsip etika profesi.

C. Standar Audit

1. Pengertian Standar Audit

Standar audit merupakan seperangkat pedoman normatif yang digunakan auditor dalam melaksanakan proses audit agar memenuhi tanggung jawab profesionalnya secara memadai (Agoes, 2011). Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis, tetapi juga sebagai tolok ukur kualitas pelaksanaan audit dan dasar evaluasi kinerja auditor. Dengan adanya standar audit, proses pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan konsisten antar auditor maupun antar periode. Secara konseptual, standar audit mencakup tiga aspek utama, yaitu kompetensi auditor, independensi, serta penerapan prosedur audit yang tepat. Kompetensi mengacu pada kemampuan teknis dan pengetahuan auditor dalam bidang akuntansi dan auditing, sedangkan independensi berkaitan dengan sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain. Adapun prosedur audit mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (IAI, 2007). Dalam konteks global, standar audit juga mengalami harmonisasi melalui penerapan *International Standards on Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants*. Harmonisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas audit serta memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan di tingkat internasional.

2. Jenis Standar Audit

Dalam praktik di Indonesia, standar audit diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan mengacu pada standar internasional. SPAP mengelompokkan standar audit ke dalam tiga kategori utama, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

a. Standar Umum

Standar umum berkaitan dengan kualitas pribadi auditor dan persyaratan dasar dalam pelaksanaan audit, meliputi:

- Audit harus dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
- Auditor harus mempertahankan independensi dalam sikap mental selama pelaksanaan audit.
- Auditor harus menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Standar ini menekankan bahwa kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas auditor.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan mengatur pelaksanaan audit secara operasional, meliputi:

- Audit harus direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai.
- Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sistem pengendalian internal untuk merencanakan audit.
- Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Standar ini memastikan bahwa proses audit dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti.

c. Standar Pelaporan

Standar pelaporan mengatur penyusunan laporan audit dan penyampaian hasil audit kepada pengguna laporan keuangan, meliputi:

- Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Auditor harus mengungkapkan konsistensi penerapan prinsip akuntansi.
- Pengungkapan dalam laporan keuangan harus dianggap memadai.
- Auditor harus menyatakan opini atau memberikan alasan jika tidak dapat memberikan opini.

Standar ini bertujuan memastikan bahwa hasil audit disampaikan secara jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

3. Standar Audit Kontemporer

Perkembangan standar audit hingga tahun 2025 menunjukkan adanya transformasi signifikan menuju audit yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis global dan kemajuan teknologi. Standar audit modern mengacu pada International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* di bawah *International Federation of Accountants*. Di Indonesia, standar tersebut diadopsi dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sehingga praktik audit nasional tetap selaras dengan standar internasional. Fokus utama standar audit

kontemporer mencakup penguatan kualitas audit berbasis risiko, peningkatan transparansi laporan auditor, serta penyesuaian terhadap kompleksitas lingkungan bisnis digital. Selain itu, standar ini juga menekankan pentingnya skeptisisme profesional dan integritas auditor dalam setiap tahap audit.

a. Struktur Standar Audit

- Prinsip Umum dan Tanggung Jawab Auditor
Kelompok ini mengatur tujuan audit serta tanggung jawab auditor dalam menjaga independensi dan skeptisisme profesional. Auditor dituntut untuk melaksanakan audit dengan pendekatan berbasis risiko serta mempertimbangkan kemungkinan kesalahan material.
- Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko
Standar ini menekankan pentingnya pemahaman auditor terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal. Revisi terbaru memperkuat analisis risiko, khususnya terkait potensi kecurangan (*fraud*) dan kompleksitas transaksi.
- Bukti Audit
Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam memberikan opini. Dalam konteks modern, pengumpulan bukti mulai mengintegrasikan teknologi seperti *data analytics* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- Penggunaan Pihak Lain
Standar ini mengatur penggunaan auditor lain atau ahli dalam proses audit, termasuk audit grup. Perkembangan terbaru menekankan koordinasi yang lebih ketat serta evaluasi kompetensi pihak eksternal.
- Pelaporan Auditor
Pelaporan audit mengalami peningkatan transparansi melalui pengungkapan *Key Audit Matters* (KAM), yaitu area audit yang memiliki risiko signifikan. Hal ini bertujuan memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan.

b. Perkembangan Standar Audit 2025

Perkembangan standar audit hingga tahun 2025 ditandai oleh sejumlah perubahan fundamental yang merefleksikan meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis serta kemajuan teknologi. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperkuat aspek profesionalisme dan akuntabilitas auditor.

- Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)
Standar audit modern menekankan pendekatan berbasis risiko, di mana fokus audit diarahkan pada area yang memiliki potensi kesalahan material tertinggi. Auditor tidak lagi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa prioritas, melainkan mengidentifikasi dan memprioritaskan akun, transaksi, atau proses yang memiliki tingkat risiko signifikan. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, sekaligus memastikan bahwa sumber daya audit digunakan secara optimal.
 - Penguatan Skeptisisme Profesional
Auditor dituntut untuk menerapkan skeptisisme profesional secara lebih intensif dalam seluruh tahapan audit. Hal ini mencakup sikap kritis terhadap:
 - Estimasi dan asumsi yang digunakan oleh manajemen
 - Indikasi potensi kecurangan (*fraud*)
 - Ketidakkonsistenan atau anomali dalam data keuangan
 Penguatan skeptisisme profesional bertujuan meminimalkan risiko auditor menerima informasi yang menyesatkan tanpa verifikasi yang memadai.
- c. Integrasi Teknologi dalam Proses Audit
Standar audit 2025 mulai mengakomodasi penggunaan teknologi digital sebagai bagian integral dari prosedur audit. Beberapa teknologi yang mulai diadopsi meliputi:

Tabel 2.2. Teknologi Audit

Jenis Teknologi	Penggunaan
<i>Data analytics</i>	Untuk menganalisis seluruh populasi data secara komprehensif
<i>Artificial Intelligence</i>	Untuk mendeteksi pola dan anomali
<i>Continuous Auditing</i>	Untuk memungkinkan pemantauan secara <i>real time</i>

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2007)

- Integrasi teknologi ini meningkatkan kualitas bukti audit serta mempercepat proses pemeriksaan.
- d. Peningkatan Transparansi Laporan Audit
Melalui penerapan *Key Audit Matters* (KAM), auditor diwajibkan mengungkapkan area audit yang paling signifikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini mencakup:

- Identifikasi area dengan risiko tinggi
- Alasan pemilihan area tersebut sebagai fokus audit
- Ringkasan prosedur audit yang dilakukan

Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi serta memberikan nilai tambah informasi bagi pengguna laporan keuangan.

e. Fokus pada fraud dan going concern

Standar audit terbaru memberikan perhatian lebih besar terhadap risiko kecurangan dan kelangsungan usaha entitas. Auditor dituntut untuk:

- Lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi *fraud*
- Melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*).

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara realistis.

D. Etika Profesi Akuntan

1. Pengertian Etika Profesi

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral, nilai, dan norma perilaku yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalankan aktivitas profesionalnya secara bertanggung jawab. Dalam profesi akuntan, etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan (IAI, 2007). Kepercayaan publik (*public trust*) menjadi elemen fundamental karena laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam praktiknya, profesi akuntan memiliki karakteristik unik sebagai *public interest profession*, yaitu profesi yang keberadaannya tidak hanya melayani kepentingan klien, tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan kepentingan publik.

Hal ini menuntut adanya standar perilaku yang tinggi, karena setiap penyimpangan etika dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Kode etik yang dikembangkan oleh *International Federation of Accountants* memberikan kerangka konseptual dalam mengidentifikasi,

mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip etika. Ancaman tersebut dapat berupa:

- a. *Self-interest* (kepentingan pribadi)
- b. *Self-review* (menilai pekerjaan sendiri)
- c. *Advocacy* (mendukung kepentingan klien)
- d. *Familiarity* (hubungan terlalu dekat dengan klien)
- e. *Intimidation* (tekanan dari pihak tertentu)

Untuk mengatasi ancaman tersebut, auditor harus menerapkan *safeguards* atau langkah pengamanan, seperti rotasi auditor, pengawasan independen, serta penerapan kebijakan etika yang ketat.

2. Prinsip Dasar Etika Profesi

Berdasarkan kode etik internasional yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants*, terdapat lima prinsip dasar yang menjadi landasan utama perilaku profesional akuntan (IAI, 2007). Kelima prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan harus diterapkan secara simultan.

- a. **Integritas.** Integritas mengharuskan akuntan untuk bersikap jujur, transparan, dan konsisten dalam setiap tindakan profesional. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dalam penyajian informasi, tetapi juga mencakup keberanian untuk menolak tekanan yang dapat memengaruhi objektivitas. Dalam praktik audit, integritas tercermin dalam:

- Penyajian temuan audit secara apa adanya
- Penolakan terhadap manipulasi laporan keuangan
- Konsistensi antara fakta dan opini audit

Pelanggaran terhadap integritas dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik serta merusak reputasi profesi secara keseluruhan.

- b. **Objektivitas.** Objektivitas menuntut akuntan untuk bebas dari bias, konflik kepentingan, maupun pengaruh pihak lain dalam membuat pertimbangan profesional. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan independensi auditor.

Dalam konteks audit, ancaman terhadap objektivitas sering muncul dalam bentuk:

- Hubungan keuangan dan klien
- Hubungan pribadi atau keluarga
- Tekanan dari manajemen

Untuk menjaga objektivitas, auditor harus menerapkan langkah-langkah pengamanan seperti pembatasan hubungan dengan klien, rotasi tim audit, serta pengungkapan konflik kepentingan.

- c. **Kompetensi Profesional dan Kehati-Hatian.** Prinsip ini menuntut akuntan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai serta terus memperbarui kompetensinya sesuai perkembangan standar dan teknologi. Selain itu, auditor harus melaksanakan pekerjaannya dengan kehati-hatian (*due care*) dan ketelitian tinggi. Dalam praktik, prinsip ini mencakup:
- Penguasaan standar audit dan akuntansi terkini
 - Kemampuan menggunakan teknologi audit seperti *data analytics*
 - Penerapan *professional judgment* secara tepat
- Ketidakmampuan menjaga kompetensi dapat menyebabkan kesalahan audit yang berdampak pada kualitas laporan keuangan.
- d. **Kerahasiaan**
- Kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk melindungi informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas profesional. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan tanpa izin, kecuali diwajibkan oleh hukum atau peraturan. Penerapan prinsip kerahasiaan meliputi:
- Perlindungan data keuangan klien
 - Pengendalian akses terhadap informasi sensitif
 - Larangan penggunaan informasi untuk keuntungan pribadi
- Dalam era digital, tantangan terhadap kerahasiaan semakin meningkat, sehingga auditor harus memperhatikan aspek keamanan data (*data security*).
- e. **Perilaku Profesional**
- Perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga reputasi profesi. Akuntan harus menghindari tindakan yang dapat merusak citra profesi, baik dalam aktivitas profesional maupun pribadi. Contoh penerapan prinsip ini antara lain:
- Kepatuhan terhadap standar audit dan regulasi.
 - Menghindari praktik tidak etis seperti kecurangan atau manipulasi.
 - Menjaga komunikasi profesional dengan klien
- Perilaku profesional mencerminkan kualitas individu sekaligus integritas profesi secara keseluruhan.

3. Pentingnya Etika Profesi dalam Praktik Audit

Etika profesi memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas audit karena menjadi landasan moral yang membimbing

auditor dalam setiap tahapan proses audit. Meskipun standar audit telah memberikan pedoman teknis yang komprehensif, kualitas hasil audit sangat bergantung pada integritas dan perilaku etis auditor dalam menerapkan standar tersebut. Dengan kata lain, standar audit tanpa etika profesi yang kuat berpotensi menghasilkan audit yang tidak objektif dan tidak dapat dipercaya. Penerapan etika profesi yang konsisten memberikan sejumlah manfaat penting dalam praktik audit. *Pertama*, etika profesi berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Auditor yang menjunjung tinggi integritas dan objektivitas akan menghasilkan opini audit yang kredibel, sehingga meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang disajikan. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam pasar keuangan dan aktivitas ekonomi secara luas. *Kedua*, etika profesi berkontribusi dalam mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi laporan keuangan. Auditor yang memiliki komitmen etis tinggi akan lebih kritis dalam mengevaluasi bukti audit serta lebih peka terhadap indikasi fraud. Sikap skeptisisme profesional yang didukung oleh nilai etika akan mendorong auditor untuk tidak mudah menerima informasi dari manajemen tanpa verifikasi yang memadai.

Ketiga, etika profesi memperkuat independensi auditor, baik secara faktual (*independence in fact*) maupun dalam persepsi (*independence in appearance*). Independensi merupakan syarat utama agar auditor dapat memberikan opini yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain. Tanpa independensi yang kuat, hasil audit berpotensi bias dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika profesi dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa kegagalan audit (*audit failure*). Kegagalan audit terjadi ketika auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari laporan keuangan. Dampak dari kegagalan audit tidak hanya merugikan entitas yang diaudit, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta merusak reputasi profesi akuntan secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, etika profesi tidak dapat dipandang sebagai pelengkap dari standar teknis, melainkan sebagai elemen integral yang harus melekat dalam setiap proses audit. Auditor dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dalam setiap pengambilan keputusan profesional, sehingga mampu menghasilkan audit yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tantangan Etika Profesi di Era Modern

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi telah mengubah lanskap praktik audit secara signifikan. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kompleksitas pekerjaan auditor, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi. Auditor dituntut untuk mampu menjaga integritas dan objektivitas di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terintegrasi. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas transaksi bisnis digital. Munculnya model bisnis berbasis platform, transaksi lintas negara, serta penggunaan teknologi seperti cloud computing dan blockchain menyebabkan auditor harus memahami sistem yang lebih kompleks. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko salah saji serta menyulitkan proses verifikasi bukti audit, sehingga menuntut tingkat kompetensi dan kehati-hatian yang lebih tinggi.

Selain itu, auditor juga menghadapi tekanan dari klien untuk memenuhi target tertentu, baik dalam bentuk penyajian kinerja keuangan yang lebih baik maupun percepatan penyelesaian audit. Tekanan ini dapat mengancam independensi dan objektivitas auditor, terutama apabila terdapat kepentingan ekonomi yang signifikan antara auditor dan klien. Dalam situasi ini, penerapan prinsip etika yang kuat menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kompromi profesional. Tantangan berikutnya adalah risiko kebocoran data dan keamanan informasi. Dalam era digital, auditor memiliki akses terhadap data keuangan yang bersifat sensitif dan strategis. Penggunaan sistem berbasis teknologi meningkatkan risiko serangan siber (*cyber risk*) dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan tidak hanya berkaitan dengan etika, tetapi juga menuntut penerapan sistem keamanan informasi yang memadai.

Selanjutnya, konflik kepentingan dalam lingkungan bisnis yang semakin terintegrasi juga menjadi isu penting. Hubungan bisnis yang kompleks, termasuk afiliasi perusahaan dan keterkaitan kepentingan antar pihak, dapat menimbulkan ancaman terhadap objektivitas auditor. Auditor harus mampu mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan melalui penerapan mekanisme pengendalian dan *safeguards* yang tepat. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif.

- a. Pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan etika profesi menjadi penting untuk membekali auditor dengan kemampuan menghadapi dilema etis.
- b. Kedua, peningkatan pengawasan dan regulasi profesi diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika.
- c. Ketiga, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data.

Dengan demikian, tantangan etika profesi di era modern menuntut auditor untuk tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran etis yang tinggi. Kemampuan dalam mengelola tantangan ini akan menentukan kualitas audit serta keberlanjutan profesi akuntan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011). *AUDITING Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik* (E. Suharsi (ed.); 4th ed.). Salemba Empat.
- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Buku 2* (Ed. 5). Salemba Empat.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. Pearson Education.
<https://books.google.co.id/books?id=AvSoBwAAQBAJ>
- IAI. (2007). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2012). *Standar Profesional Akuntan Publik* (pp. 1–15).
- Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D. (1997). *Principles of External Auditing*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=Ci1oQgAACAAJ>

TENTANG PENULIS



Izza Maulida Santoso, S.E., M.Ak., ACPA
Politeknik Negeri Lampung

Penulis lahir di Kendal, saat ini menetap di Bandar Lampung. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 di Universitas Brawijaya. Selain menjadi dosen, penulis aktif menjadi anggota Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Lampung dan anggota muda pada organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia. Penulis termotivasi untuk menulis karena penulis ingin berkontribusi dan aktif berbagi ilmu dan pengetahuan kepada pembaca dan sebagainya. Sejumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di antaranya *book chapter*, buku ber ISBN, jurnal internasional dan jurnal nasional. Korespondensi melalui email izzamaulida@polinela.ac.id.

JANVARA



BAB 3

TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN RISIKO PROFESI AUDITOR

Dr. Raya Puspita Sari Hasibuan, S.E., M.Si., CERA., CRP., QGIA
Politeknik Negeri Medan

A. Pendahuluan

Profesi auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang telah diaudit memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada pemakai laporan keuangan mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien yang menggunakan jasanya, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas yang mengandalkan laporan auditor dalam membuat keputusan ekonomi (Arens, Elder, & Beasley, 2017). Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi standar profesional, kode etik, serta berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun konsekuensi profesional yang serius. Sejumlah kasus kegagalan audit yang terjadi di berbagai negara, seperti kasus Enron dan WorldCom, menunjukkan bahwa kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan auditor dapat menimbulkan kerugian

besar bagi masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap profesi akuntan publik (Boynton & Johnson, 2006).

Tanggung jawab hukum auditor pada dasarnya berkaitan dengan kemungkinan auditor dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran yang dilakukan dalam proses audit. Sementara itu, tanggung jawab profesi auditor berkaitan dengan kewajiban auditor untuk mematuhi standar profesional dan kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Messier, Glover, & Prawitt, 2017). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum dan profesi auditor menjadi sangat penting bagi auditor agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep tanggung jawab hukum dan tanggung jawab profesi auditor, termasuk bentuk-bentuk tanggung jawab, sumber hukum yang mengaturnya, serta implikasi praktis bagi auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya.

B. Konsep Dasar Tanggung Jawab Profesi Auditor

Tanggung jawab profesi auditor berakar pada kepercayaan publik dan diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar auditing, kode etik, independensi, objektivitas, serta kerahasiaan informasi klien.

1. Kepercayaan Publik dan Standar Profesional

Profesi auditor merupakan profesi yang berbasis pada kepercayaan publik (*public trust*). Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa jasa audit yang diberikan memenuhi standar kualitas yang tinggi serta dapat diandalkan oleh pengguna laporan keuangan (Porter, Simon, & Hatherly, 2014). Tanggung jawab profesi auditor terutama diatur melalui standar auditing dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan. Standar tersebut memberikan pedoman tentang cara auditor harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit secara tepat dan profesional (Arens et al., 2017).

2. Independensi, Objektivitas, dan Kerahasiaan

Menurut Messier et al. (2017), tanggung jawab profesi auditor mencakup beberapa aspek penting, yaitu tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab terhadap profesi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Auditor harus menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya agar hasil audit yang

diberikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Independensi merupakan prinsip fundamental dalam profesi audit. Tanpa independensi, hasil audit tidak akan dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang dapat mengganggu objektivitasnya dalam melakukan audit (Guy, Carmichael, & Whittington, 2015). Selain itu, auditor juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Informasi yang diperoleh selama proses audit tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin yang sah, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2014).

C. Tanggung Jawab Auditor terhadap Pengguna Laporan Keuangan

Lingkup tanggung jawab auditor tidak hanya mencakup hubungan kontraktual dengan klien, tetapi juga mencakup pihak ketiga yang menggunakan laporan audit sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

1. Tanggung Jawab Auditor terhadap Klien

Auditor memiliki tanggung jawab profesional yang sangat penting terhadap klien yang menggunakan jasanya. Hubungan antara auditor dan klien pada dasarnya merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada kontrak kerja atau perikatan audit yang secara formal dituangkan dalam bentuk surat perikatan audit (*engagement letter*). Surat perikatan ini merupakan dokumen penting yang menjelaskan secara rinci ruang lingkup pekerjaan auditor, tujuan audit, tanggung jawab masing-masing pihak, standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit, serta batasan-batasan yang berlaku selama proses audit berlangsung. Melalui dokumen ini, baik auditor maupun klien memiliki pemahaman yang sama mengenai ekspektasi dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan audit laporan keuangan (Arens, Elder, & Beasley, 2017). Dalam hubungan profesional tersebut, auditor memiliki kewajiban untuk melaksanakan audit secara independen, objektif, dan profesional. Auditor harus memastikan bahwa seluruh prosedur audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku serta menggunakan tingkat kehati-hatian profesional yang memadai atau yang dikenal dengan istilah *due professional care*.

Prinsip kehati-hatian profesional ini menuntut auditor untuk menggunakan kompetensi, keterampilan profesional, serta pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit sehingga hasil audit yang diberikan dapat diandalkan oleh pihak yang berkepentingan (Boynton & Johnson, 2006). Konsep *due professional care* juga mengharuskan auditor untuk bersikap skeptis secara profesional (*professional skepticism*). Skeptisisme profesional merupakan sikap mental yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis serta tidak mudah menerima informasi yang diberikan oleh manajemen tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Dengan menerapkan skeptisisme profesional, auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang tidak terdeteksi selama proses audit (Messier, Glover, & Prawitt, 2017).

Tanggung jawab auditor terhadap klien juga mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Auditor sering kali memiliki akses terhadap berbagai informasi penting dan sensitif mengenai kondisi keuangan, strategi bisnis, maupun kebijakan internal perusahaan. Oleh karena itu, auditor memiliki kewajiban etis dan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan klien, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2014). Apabila auditor gagal melaksanakan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian profesional yang memadai dan kegagalan tersebut mengakibatkan kerugian bagi klien, maka auditor dapat dimintai pertanggung jawaban atas kelalaian profesional (*professional negligence*). Kelalaian profesional dapat terjadi apabila auditor tidak melaksanakan prosedur audit yang seharusnya dilakukan, tidak mematuhi standar auditing yang berlaku, atau tidak menggunakan pertimbangan profesional yang memadai dalam proses audit. Dalam situasi seperti ini, klien memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap auditor untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut (Messier et al., 2017).

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tanggung jawab auditor terhadap klien memiliki batasan tertentu. Auditor tidak bertanggung jawab atas seluruh kesalahan atau kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Tanggung jawab utama atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan

terap berada pada manajemen perusahaan. Manajemen memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari kesalahan material maupun kecurangan (Porter, Simon, & Hatherly, 2014). Dalam konteks ini, auditor hanya bertanggung jawab untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan. Opini auditor memberikan tingkat keyakinan yang wajar (*reasonable assurance*), bukan jaminan absolut bahwa laporan keuangan sepenuhnya bebas dari kesalahan atau kecurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan inheren dalam proses audit, seperti keterbatasan waktu, penggunaan teknik sampling, serta kemungkinan adanya kolusi atau manipulasi yang sulit dideteksi (Arens et al., 2017). Dengan demikian, hubungan profesional antara auditor dan klien harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Auditor harus melaksanakan audit secara profesional dan independen, sementara manajemen perusahaan tetap bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang menjadi objek audit.

2. Tanggung Jawab Auditor terhadap Pihak Ketiga

Selain memiliki tanggung jawab kepada klien, auditor juga dapat memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga yang menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit. Pihak ketiga tersebut mencakup berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, analis keuangan, pemerintah, regulator, maupun masyarakat luas yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi (Guy, Carmichael, & Whittington, 2015). Laporan audit yang diterbitkan oleh auditor sering kali menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi pihak-pihak eksternal dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Investor, misalnya, menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit untuk menilai potensi keuntungan dan risiko investasi. Kreditor menggunakan laporan tersebut untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya, sementara pemerintah dan regulator menggunakan laporan keuangan untuk tujuan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Hayes et al., 2014).

Tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga sering kali menjadi isu yang kompleks dalam praktik hukum karena tidak selalu terdapat hubungan kontraktual langsung antara auditor dan

pihak ketiga tersebut. Dalam banyak kasus, pihak ketiga menggunakan laporan audit tanpa memiliki perjanjian langsung dengan auditor. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana auditor dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat kesalahan dalam laporan audit (Porter et al., 2014). Beberapa sistem hukum mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menentukan tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga. Dalam beberapa yurisdiksi, auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam hubungan kontraktual dengan auditor. Namun, dalam yurisdiksi lain, tanggung jawab auditor dapat diperluas kepada pihak ketiga yang secara wajar dapat diperkirakan akan menggunakan laporan audit dalam pengambilan keputusan ekonomi (Boynton & Johnson, 2006).

Untuk membuktikan tanggung jawab auditor terhadap pihak ketiga, biasanya diperlukan bukti bahwa auditor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa laporan auditnya akan digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, pihak ketiga juga harus dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari kelalaian auditor dalam melaksanakan audit (Messier et al., 2017). Kasus-kasus hukum yang melibatkan auditor sering kali berkaitan dengan kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) atau kesalahan material dalam laporan keuangan. Kegagalan tersebut dapat menyebabkan pihak ketiga mengambil keputusan ekonomi yang merugikan karena mereka mengandalkan laporan keuangan yang dianggap telah diverifikasi secara independen oleh auditor (Arens et al., 2017).

Oleh karena itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan standar profesional agar dapat meminimalkan risiko tuntutan hukum dari pihak ketiga. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa laporan audit yang diterbitkan memberikan informasi yang jelas tentang ruang lingkup audit dan tingkat keyakinan yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan.

D. Tanggung Jawab Hukum dan Pengelolaan Risiko Profesi

Pelanggaran standar profesional atau ketentuan hukum dapat menimbulkan konsekuensi perdata, pidana, dan administratif. Karena itu, auditor memerlukan pengelolaan risiko yang terstruktur sejak tahap penerimaan perikatan hingga penerbitan laporan audit.

1. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum Auditor

Tanggung jawab hukum auditor dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administratif. Ketiga bentuk tanggung jawab ini mencerminkan berbagai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila auditor melanggar standar profesional atau ketentuan hukum yang berlaku (Boynton & Johnson, 2006). Tanggung jawab perdata biasanya timbul apabila auditor melakukan kelalaian profesional yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap auditor untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Gugatan perdata terhadap auditor sering kali berkaitan dengan tuduhan bahwa auditor gagal mendeteksi kesalahan material atau kecurangan dalam laporan keuangan yang seharusnya dapat ditemukan melalui prosedur audit yang memadai (Messier et al., 2017).

Sementara itu, tanggung jawab pidana dapat timbul apabila auditor terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penipuan laporan keuangan, manipulasi informasi keuangan, atau memberikan opini audit yang secara sengaja menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dalam kasus seperti ini, auditor dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, pencabutan izin praktik, atau bahkan hukuman penjara apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum secara sengaja (Guy et al., 2015). Selain tanggung jawab perdata dan pidana, auditor juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh regulator atau organisasi profesi apabila terbukti melanggar standar profesional atau kode etik profesi. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan ruang lingkup praktik, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin sebagai akuntan publik (Hayes et al., 2014).

2. Upaya Auditor dalam Mengurangi Risiko Hukum

Untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul dalam praktik audit, auditor harus menerapkan berbagai langkah pencegahan yang sistematis dan terstruktur. Salah satu langkah yang paling penting adalah memastikan bahwa seluruh prosedur audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku secara internasional maupun nasional (Arens et al., 2017). Selain itu, auditor juga harus menyusun dokumentasi audit secara lengkap dan sistematis. Dokumentasi audit merupakan catatan

tertulis yang menjelaskan seluruh prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan yang diambil oleh auditor selama proses audit. Dokumentasi ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit secara profesional apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari (Messier et al., 2017). Langkah lain yang dapat dilakukan auditor untuk mengurangi risiko hukum adalah menjaga komunikasi yang efektif dengan manajemen klien serta pihak-pihak yang terkait dalam proses audit.

Komunikasi yang baik dapat membantu menghindari kesalahpahaman tentang ruang lingkup audit, tanggung jawab masing-masing pihak, serta keterbatasan yang terdapat dalam proses audit (Porter et al., 2014). Selain itu, auditor juga harus terus meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan berkelanjutan (*continuing professional education*). Dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan secara berkala, auditor dapat mengikuti perkembangan standar auditing, teknologi informasi, serta praktik bisnis yang terus berkembang.

E. Studi Kasus Manipulasi dan Independensi Auditor

Studi kasus berikut memperlihatkan hubungan antara kualitas prosedur audit, skeptisisme profesional, independensi, dan risiko hukum yang dapat muncul ketika auditor tidak menjalankan kewajiban profesional secara memadai.

1. Kegagalan Auditor dalam Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan

Uraian Kasus

Sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bahan kimia mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Laporan keuangan perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan laba yang stabil sehingga menarik perhatian banyak investor dan kreditor untuk menanamkan modal. Laporan keuangan perusahaan tersebut telah diaudit oleh sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang cukup terkenal dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Namun, beberapa tahun kemudian terungkap bahwa manajemen perusahaan telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara mengakui pendapatan yang sebenarnya belum terjadi (*premature revenue recognition*). Selain

itu, perusahaan juga menunda pencatatan beberapa beban operasional sehingga laba perusahaan terlihat jauh lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Manipulasi tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan tidak terdeteksi oleh auditor dalam proses audit yang dilakukan. Ketika praktik manipulasi tersebut akhirnya terungkap melalui investigasi regulator pasar modal, harga saham perusahaan tersebut mengalami penurunan drastis dan menimbulkan kerugian besar bagi investor.

Para investor kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap auditor dengan alasan bahwa auditor telah lalai dalam melaksanakan prosedur audit yang memadai sehingga gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Dalam kasus ini, auditor dianggap tidak menerapkan prinsip skeptisisme profesional secara memadai. Auditor terlalu mengandalkan penjelasan manajemen tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti-bukti audit yang tersedia. Selain itu, auditor juga tidak melakukan pengujian yang cukup terhadap transaksi penjualan yang signifikan pada akhir periode pelaporan. Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan auditor dalam menerapkan prosedur audit yang memadai dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik berupa gugatan perdata dari investor maupun sanksi dari regulator profesi.

Solusi

Untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini, auditor harus menerapkan skeptisisme profesional secara konsisten selama proses audit. Auditor tidak boleh menerima informasi dari manajemen begitu saja tanpa melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai terhadap bukti audit yang relevan. Auditor juga harus meningkatkan kualitas prosedur audit, khususnya dalam pengujian terhadap akun-akun yang memiliki risiko tinggi seperti pendapatan dan piutang usaha. Prosedur audit yang dapat dilakukan antara lain pengujian *cut-off* transaksi, konfirmasi piutang kepada pelanggan, serta analisis tren pendapatan untuk mengidentifikasi pola yang tidak wajar dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor harus memperkuat dokumentasi audit sebagai bukti bahwa seluruh prosedur audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Dokumentasi audit yang lengkap dapat membantu auditor dalam mempertahankan posisinya apabila terjadi tuntutan hukum di kemudian hari.

2. Konflik Kepentingan dan Pelanggaran Independensi Auditor

Uraian Kasus

Sebuah perusahaan jasa konstruksi menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan. Dalam proses audit tersebut, auditor diketahui memiliki hubungan bisnis lain dengan perusahaan klien, yaitu memberikan jasa konsultasi manajemen dan perencanaan pajak dengan nilai kontrak yang material. Selama pelaksanaan audit, auditor menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Namun, auditor tidak mengungkapkan secara jelas kelemahan tersebut dalam laporan audit karena khawatir hal tersebut dapat memengaruhi hubungan bisnis yang telah terjalin antara kantor akuntan publik dan perusahaan klien.

Beberapa tahun kemudian, perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan yang serius dan terungkap bahwa laporan keuangan sebelumnya tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Regulator kemudian melakukan investigasi dan menemukan bahwa auditor tidak sepenuhnya independen dalam melaksanakan audit karena memiliki kepentingan finansial melalui kontrak jasa konsultasi yang diberikan kepada klien. Akibatnya, auditor dikenakan sanksi oleh organisasi profesi serta regulator karena melanggar prinsip independensi dan objektivitas dalam profesi audit. Kasus ini juga menimbulkan kerugian bagi para investor dan kreditor yang mengandalkan laporan audit dalam mengambil keputusan investasi.

Solusi

Untuk menghindari konflik kepentingan, auditor harus menjaga independensi baik secara faktual maupun secara penampilan (*independence in fact and independence in appearance*). Auditor tidak boleh memiliki hubungan finansial atau bisnis yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam melakukan audit. Kantor akuntan publik juga perlu menerapkan kebijakan internal yang ketat mengenai pemberian jasa non-audit kepada klien audit. Dalam beberapa kasus, pemberian jasa konsultasi kepada klien audit dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu independensi auditor. Selain itu, organisasi profesi dan regulator perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik audit untuk memastikan bahwa auditor

mematuhi standar etika profesi. Auditor juga harus mengikuti pelatihan dan pendidikan profesional secara berkelanjutan agar selalu memahami perkembangan standar etika dan regulasi yang berlaku.

F. Kegagalan Deteksi Fraud dan Implikasi Profesional

Risiko profesi auditor juga berkaitan dengan kemungkinan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan internal. Evaluasi pengendalian, audit berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi dengan komite audit menjadi unsur penting dalam pencegahannya.

1. Kegagalan Auditor dalam Mendeteksi Fraud Internal

Uraian Kasus

Sebuah perusahaan distribusi barang konsumsi mengalami kerugian yang cukup besar akibat praktik kecurangan yang dilakukan oleh salah satu manajer keuangan perusahaan. Manajer tersebut melakukan manipulasi terhadap catatan kas dan melakukan penggelapan dana perusahaan selama beberapa tahun dengan cara memalsukan dokumen transaksi serta memanipulasi laporan keuangan internal. Selama periode tersebut, laporan keuangan perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang setiap tahunnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, praktik kecurangan tersebut baru terungkap setelah dilakukan audit investigatif oleh auditor internal perusahaan yang baru diangkat oleh dewan direksi. Setelah kecurangan tersebut terungkap, perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan dan manajemen perusahaan mempertanyakan mengapa auditor eksternal tidak mampu mendeteksi praktik kecurangan tersebut selama proses audit.

Dalam investigasi lebih lanjut diketahui bahwa auditor tidak melakukan pengujian yang cukup terhadap pengendalian internal perusahaan, khususnya dalam proses pengelolaan kas dan rekonsiliasi bank. Auditor juga terlalu mengandalkan laporan yang disiapkan oleh manajemen tanpa melakukan verifikasi yang memadai terhadap dokumen pendukung. Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan auditor dalam memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi.

Solusi

Untuk mengatasi risiko kecurangan dalam perusahaan, auditor harus melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor perlu mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan, seperti pengelolaan kas, persediaan, dan transaksi keuangan yang bernilai besar. Auditor juga harus meningkatkan penggunaan teknik audit berbasis risiko (*risk-based auditing*), yaitu pendekatan audit yang memfokuskan prosedur audit pada area yang memiliki potensi risiko kesalahan atau kecurangan yang tinggi. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk lebih efektif dalam mendeteksi potensi *fraud* dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor perlu memanfaatkan teknologi audit modern seperti *data analytics* dan audit berbantuan komputer untuk menganalisis transaksi keuangan secara lebih mendalam. Teknologi ini dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan. Terakhir, auditor harus memperkuat komunikasi dengan komite audit dan manajemen perusahaan mengenai berbagai temuan yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal. Dengan adanya komunikasi yang efektif, perusahaan dapat segera mengambil langkah perbaikan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada masa mendatang.

2. Implikasi bagi Penguatan Profesi Auditor

Tanggung jawab hukum dan profesi auditor merupakan aspek fundamental dalam praktik audit modern. Auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien yang menggunakan jasanya, tetapi juga kepada berbagai pihak lain yang mengandalkan laporan audit dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi standar profesional, menjaga independensi, serta menerapkan tingkat kehati-hatian profesional yang tinggi. Auditor juga harus memahami berbagai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran standar profesional atau kelalaian dalam pelaksanaan audit. Dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis dan tuntutan transparansi keuangan di era globalisasi, peran auditor menjadi semakin penting dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan. Oleh karena itu, auditor harus senantiasa meningkatkan kompetensi profesional, memperkuat integritas, serta mematuhi prinsip-prinsip etika profesi agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum dan profesi auditor tidak hanya membantu auditor dalam menjalankan tugasnya secara efektif, tetapi juga dapat meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dalam praktik audit serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

JAWABARA

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services*. Pearson.
- Boynton, W., & Johnson, R. (2006). *Modern Auditing*. Wiley.
- Carmichael, D. (2004). *The PCAOB and the Social Responsibility of the Independent Auditor*. Accounting Horizons.
- Coffee, J. (2006). *Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance*. Oxford University Press.
- DeAngelo, L. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*.
- Elder, R., Beasley, M., & Arens, A. (2019). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.
- Francis, J. (2004). What Do We Know About Audit Quality? *British Accounting Review*.
- FRC. (2018). *International Standards on Auditing*.
- Gendron, Y. (2017). *Auditing and Accountability*. Routledge.
- Guy, D., Carmichael, D., & Whittington, O. (2015). *Audit Sampling*. Wiley.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principles of Auditing*. Pearson.
- IAASB. (2016). *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review*.
- IFAC. (2018). *Code of Ethics for Professional Accountants*.
- Knechel, W. (2016). *Auditing: Assurance and Risk*. Routledge.
- Mautz, R., & Sharaf, H. (1961). *The Philosophy of Auditing*.
- Messier, W., Glover, S., & Prawitt, D. (2017). *Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach*. McGraw Hill.
- Palmrose, Z. (1988). An Analysis of Auditor Litigation. *The Accounting Review*.
- Porter, B., Simon, J., & Hatherly, D. (2014). *Principles of External Auditing*. Wiley.
- Watts, R., & Zimmerman, J. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Whittington, O., & Pany, K. (2016). *Principles of Auditing and Other Assurance Services*. McGraw Hill.

TENTANG PENULIS



**Dr. Raya Puspita Sari Hasibuan, S.E., M.Si.,
CERA., CRP., QGIA**

Politeknik Negeri Medan

Penulis merupakan seorang dosen jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, lahir dan besar di Kota Medan serta menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 Jurusan akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Raya sudah menjadi seorang dosen sejak tahun 2017. Memiliki pengalaman mengajar di Universitas Al-Azhar Medan, Universitas Medan Area dan Asistensi di Universitas Sumatera Utara. Raya juga merupakan bahagian dari Ikatan Akuntan Indonesia, dimana pada tahun 2016 pernah menjadi staf pajak di Kawasan Industri Medan. Sejak Kuliah S1 Raya sudah aktif melakukan beberapa penelitian bersama dosen-dosen di Jurusan Akuntansi dan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 merupakan manajemen eksekutif di Ikatan Akuntan Indonesia. Komitmen Raya menjadi seorang PNS adalah bahwa Raya akan senantiasa mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat termasuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa, melaksanakan tugas dengan baik dan tentunya menjaga integritas.

JANVARA



BAB 4

PROSES AUDIT DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN

Syarifah Massuki Fitri, S.E., MSA., Ak., CA.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

A. Pendahuluan

Audit merupakan salah satu mekanisme utama dalam menjamin kredibilitas informasi keuangan. Dalam lingkungan bisnis modern yang semakin kompleks, audit memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut Arens et al (2017) audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang kegiatan ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Standar audit internasional diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* melalui *International Standards on Auditing* (ISA). Di Indonesia, standar tersebut diadopsi dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Adapun tujuan audit sebagaimana diatur dalam ISA 200 adalah untuk memperoleh keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*).

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit

Audit laporan keuangan bertujuan memberikan opini independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan yang berlaku (ISA 200). Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan seluruh siklus transaksi, sistem pengendalian internal, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Menurut Messier, pendekatan audit modern berbasis risiko (*risk-based auditing*) menekankan identifikasi area dengan risiko salah saji material tertinggi sebagai dasar perancangan prosedur audit (Kieso et al., 2011).

1. Tujuan Audit

Secara konseptual, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi klasik ini dikemukakan oleh Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley yang menyatakan bahwa auditing adalah “*a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events...*” (Arens et al., 2017).

Secara normatif, tujuan audit laporan keuangan ditegaskan dalam standar internasional. Dalam International Auditing and Assurance Standards Board melalui *International Federation of Accountants*, khususnya dalam International Standard on Auditing 200 (ISA 200), dinyatakan bahwa tujuan auditor adalah:

“to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion...” (ISA 200, par. 3). Kutipan tersebut menegaskan dua tujuan utama audit, yaitu:

- a. Memperoleh *reasonable assurance* (keyakinan memadai).
- b. Memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan.

Menurut Boynton dan Johnson (2006), tujuan audit tidak hanya sebatas pemberian opini, tetapi juga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata para pengguna seperti investor, kreditur, dan regulator. Mereka menyatakan bahwa audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternal untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik. Dalam perspektif teori agensi, audit bertujuan meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen dan

Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi menimbulkan biaya keagenan (*agency costs*), dan audit eksternal merupakan salah satu mekanisme untuk menekan biaya tersebut melalui verifikasi independen atas laporan keuangan. Selain tujuan umum tersebut, audit juga memiliki tujuan spesifik, antara lain:

- a. Menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (IFRS atau PSAK).
- b. Menilai efektivitas pengendalian internal terkait pelaporan keuangan.
- c. Mendeteksi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*).
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan melalui management letter.

Dalam literatur akademik, Knechel et al. (2013) dalam *Auditing: Assurance and Risk* menekankan bahwa audit modern berbasis risiko (*risk-based auditing*), sehingga tujuan audit tidak hanya bersifat verifikatif, tetapi juga evaluatif terhadap risiko bisnis dan risiko pelaporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan audit mencakup dimensi:

- a. Normatif (memberikan opini sesuai standar);
- b. Ekonomis (mengurangi asimetri informasi);
- c. Pengendalian (meningkatkan tata kelola);
- d. Sosial (meningkatkan kepercayaan publik).

2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit (*scope of audit*) merujuk pada batasan, cakupan, dan kedalaman prosedur yang dilakukan auditor dalam melaksanakan penugasan audit. Ruang lingkup ini ditentukan oleh standar audit, peraturan perundang-undangan, perikatan audit, serta pertimbangan profesional auditor. Dalam *International Standard on Auditing* 200 dijelaskan bahwa ruang lingkup audit mencakup seluruh prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit sesuai standar profesional. Artinya, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (*sufficient and appropriate audit evidence*). Menurut Arens et al. (2017), ruang lingkup audit laporan keuangan meliputi:

- a. Pemeriksaan sistem pengendalian internal yang relevan dengan pelaporan keuangan.
- b. Pengujian transaksi dan saldo akun melalui prosedur substantif.
- c. Prosedur analitis untuk menilai kewajaran hubungan antar akun.

- d. Evaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara keseluruhan.

Ruang lingkup audit tidak berarti memeriksa seluruh transaksi (100%), melainkan menggunakan pendekatan sampling dan berbasis risiko. Hal ini ditegaskan dalam literatur audit bahwa audit memberikan *reasonable assurance*, bukan *absolute assurance*. Oleh karena itu, selalu terdapat risiko audit (*audit risk*) yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Secara konseptual, ruang lingkup audit juga dipengaruhi oleh:

- a. Materialitas

Menurut *International Accounting Standards Board*, informasi dianggap material jika penghilangan atau salah saji dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Auditor menggunakan konsep materialitas untuk menentukan luasnya pengujian.

- b. Risiko Audit

Model risiko audit terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menentukan luas dan jenis prosedur audit.

- c. Jenis Audit

Ruang lingkup audit berbeda tergantung pada jenis audit, antara lain sebagai berikut:

- Audit laporan keuangan
- Audit kepatuhan
- Audit operasional
- Audit investigatif (forensik)

Menurut Hayes et al. (2014) dalam *Principles of Auditing*, ruang lingkup audit laporan keuangan berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan audit operasional memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena menilai efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

3. Keterbatasan Ruang Lingkup Audit

Penting untuk dipahami bahwa audit memiliki keterbatasan inheren. Dalam *International Standard on Auditing 200* disebutkan bahwa keterbatasan tersebut timbul karena:

- a. Penggunaan pengujian berbasis sampel.
- b. Sifat bukti audit yang persuasif, bukan konklusif.
- c. Kemungkinan adanya kolusi atau manajemen override.
- d. Pertimbangan profesional auditor.

Oleh karena itu, audit tidak menjamin bahwa seluruh kecurangan akan terdeteksi. Hal ini juga ditegaskan dalam

penelitian akademik bahwa ekspektasi publik terhadap audit sering kali melebihi kapasitas riil audit (*audit expectation gap*).

C. Tahapan Pemeriksaan Audit

Secara umum tahapan pemeriksaan audit meliputi lima fase utama, yaitu Perencanaan audit, pengujian pengendalian (*test of controls*), pengujian substantif, penyelesaian audit, dan pelaporan audit. Kerangka ini sejalan dengan pendekatan audit berbasis risiko yang menjadi landasan utama dalam standar audit modern.

1. Perencanaan Audit (*Audit Planning*)

Perencanaan audit merupakan tahap awal yang menentukan arah dan strategi pelaksanaan audit. Auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal. Adapun kegiatan utama dalam tahap ini meliputi:

- a. Memahami bisnis klien dan lingkungan industri
- b. Melakukan penilaian risiko (*risk assessment*)
- c. Menentukan tingkat materialitas
- d. Menyusun strategi dan program audit

Standar *International Standard on Auditing* 300 menekankan bahwa perencanaan audit bertujuan untuk memastikan audit dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik memungkinkan auditor untuk memfokuskan perhatian pada area yang memiliki risiko salah saji material yang tinggi.

2. Pengujian Pengendalian (*test of controls*)

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh entitas. Pada tahap ini auditor melakukan beberapa hal, seperti:

- a. *Walkthrough* atas proses transaksi
- b. Pengujian desain pengendalian
- c. Pengujian efektivitas operasional pengendalian

Pada tahapan ini jika pengendalian internal dinilai efektif, maka auditor dapat mengurangi tingkat pengujian substantif audit. Hal ini diatur dalam *International Standard on Auditing* 315 yang menekankan pentingnya pemahaman pengendalian internal dalam penilaian risiko audit.

3. Pengujian Substantif

Pengujian substantif dilakukan untuk mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Tahap ini merupakan inti dari

proses audit karena berhubungan langsung dengan bukti audit. Pengujian substantif terdiri dari:

- a. Prosedur analitis: membandingkan data keuangan dengan ekspektasi
- b. Pengujian rincian (): memverifikasi transaksi dan saldo akun

Standar *International Standard on Auditing* 330 mengatur bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur substantif sebagai respons terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Contoh prosedur dalam pengujian substantif, seperti: Konfirmasi piutang, Observasi fisik persediaan, dan Pemeriksaan dokumen pendukung audit lainnya.

4. Penyelesaian Audit

Pada tahap ini auditor melakukan evaluasi akhir terhadap seluruh bukti audit yang telah diperoleh. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Review keseluruhan laporan keuangan
- b. Evaluasi kecukupan dan kesesuaian bukti audit
- c. Penilaian asumsi *going concern*
- d. Evaluasi peristiwa setelah tanggal laporan keuangan (*subsequent events*)

Standar seperti *International Standard on Auditing* 560 dan *International Standard on Auditing* 570 menjadi pedoman penting dalam tahap ini. Tahap penyelesaian memastikan bahwa seluruh prosedur audit telah dilakukan secara memadai sebelum auditor memberikan opini.

5. Pelaporan Audit

Pelaporan audit merupakan tahap akhir dalam proses audit, dimana auditor menyampaikan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan audit. Laporan audit berisi:

- a. Opini auditor atas laporan keuangan
- b. Dasar opini auditor
- c. Tanggung jawab manajemen dan auditor
- d. Penjelasan tambahan (jika diperlukan)

Dalam laporan audit, ada beberapa jenis opini audit yang dikeluarkan oleh auditor, meliputi:

- a. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

- b. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.
- c. Tidak wajar (*adverse opinion*). Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. Tidak memberikan opini (*disclaimer*). Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Pada akhirnya seluruh tahapan audit saling terintegrasi dalam suatu siklus yang berkesinambungan. Pendekatan berbasis risiko menekankan bahwa fokus audit diarahkan pada area berisiko tinggi, penggunaan sumber daya audit lebih efisien, dan kualitas audit meningkat melalui pemahaman mendalam terhadap entitas. Pendekatan ini telah menjadi praktik standar dalam audit modern yang diadopsi secara global.

D. Pendekatan Audit Modern

Perkembangan audit modern dewasa ini seiring dengan kompleksitas bisnis, digitalisasi, dan tuntutan adanya transparansi. Jika audit tradisional berfokus pada pemeriksaan transaksi secara detail (*substantive testing*), maka audit modern lebih berbasis risiko, teknologi, dan pemahaman bisnis secara menyeluruh. Berikut ini beberapa bentuk pendekatan audit modern, yaitu:

a. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk - based Audit*)

Pendekatan ini menjadi inti audit modern, dimana auditor tidak lagi memeriksa semua transaksi, tetapi fokus pada area yang memiliki risiko salah saji material tertinggi. Tujuan melakukan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Hal yang akan dilakukan oleh auditor dengan pendekatan ini adalah mengidentifikasi risiko, penilaian pengendalian internal, dan penentuan prosedur audit berbasis risiko.

b. Pendekatan Berbasis Sistem (*System - Based Audit*)

Pendekatan ini menekankan pada evaluasi sistem pengendalian internal, terutama dalam lingkungan yang berbasis teknologi informasi. Dengan pendekatan ini auditor akan fokus pada hala-

hal berikut, yaitu sistem informasi akuntansi yang dimiliki perusahaan, pengendalian internal (internal control), dan IT controls perusahaan. Prinsip pendekatan berbasis sistem ini adalah jika sistem yang dimiliki kuat maka pengujian substantif dalam proses audit bisa dikurangi.

c. Pendekatan Audit Berbasis Data (Data Analytics Audit)

Audit modern yang menggunakan pendekatan ini memanfaatkan teknologi seperti *Big Data*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Data analytics tools*. Dengan pendekatan audit berbasis data, auditor dapat menganalisis seluruh populasi data (bukan sampling) dan dapat mendeteksi anomali dan fraud lebih cepat. Adapun keunggulan dari pendekatan ini adalah real-time audit dan peningkatan kualitas bukti audit.

E. Tantangan Dalam Proses Audit

Dalam proses pemeriksaan audit, auditor mendapatkan berbagai macam tantangan, antara lain:

- a. Kompleksitas transaksi. Kompleksitas transaksi dalam audit merujuk pada tingkat kesulitan dan kompleksitas yang dihadapi oleh auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Ini mencakup berbagai aspek, seperti, jumlah informasi yang perlu diproses, tahap pekerjaan yang harus dilakukan, dan hubungan antara pekerjaan-pekerjaan lainnya.
- b. Risiko Fraud (ISA 240). Risiko fraud pada audit adalah risiko yang muncul akibat dari adanya kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, pemegang saham ataupun pihak terkait lainnya. Auditor memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi risiko fraud dan menerapkan prosedur yang efektif untuk mencegahnya.
- c. Keterbatasan Waktu Audit. Keterbatasan waktu audit akan dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas dari proses audit. Keterbatasan waktu ini juga dapat mempengaruhi penyelesaian audit sampai selesai, yang merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh auditor. Keterbatasan ini juga dapat mengurangi kompetensi auditor dan kualitas audit yang dibutuhkan oleh klien.

F. Teknik dan Prosedur Audit

Dalam melakukan audit, auditor menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Pemilihan teknik audit tergantung pada risiko dan tujuan audit. Menurut Boynton et al. (2014), teknik audit meliputi:

- a. Inspeksi (*Inspection*). Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, atau aset fisik. Adapun tujuannya adalah memastikan keberadaan (*existence*) dan keakuratan data. Contoh: memeriksa faktur pembelian, kontrak, atau menghitung persediaan secara fisik.
- b. Observasi (*Observation*). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu proses atau prosedur yang dijalankan oleh klien. Adapun tujuannya adalah menilai apakah prosedur berjalan sesuai kebijakan. Contoh: mengamati proses stock opname atau prosedur pengendalian internal. Akan tetapi observasi memiliki kelemahan yaitu perilaku klien bisa berubah saat diawasi (*observer effect*).
- c. Konfirmasi (*Confirmation*). Konfirmasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga yang independen. Adapun tujuannya adalah meningkatkan keandalan dari bukti audit. Contoh: konfirmasi saldo piutang kepada pelanggan atau saldo kas di bank. Konfirmasi ini ada 2 jenis, yaitu: Konfirmasi positif (meminta respon) dan Konfirmasi negatif (respon hanya jika tidak setuju)
- d. Wawancara (*Inquiry*). *Inquiry* dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pihak internal maupun eksternal. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman awal sebelum audit dilakukan dan untuk melakukan klarifikasi kepada klien. Contoh: bertanya kepada manajemen tentang kebijakan akuntansi atau transaksi tertentu. Akan tetapi wawancara ini perlu didukung bukti lain karena sifatnya subjektif.
- e. *Reperformance* – pengujian ulang. *Reperformance* adalah auditor melakukan kembali suatu prosedur yang sebelumnya dilakukan oleh klien. Adapun tujuan dilakukan ini adalah untuk menguji keakuratan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh klien. Keunggulan dari pengujian ulang ini dapat menghasilkan bukti yang sangat andal dalam proses audit. Contoh: menghitung ulang depresiasi atau melakukan rekonsiliasi bank.
- f. *Analytical Procedures*. Prosedur analitis melibatkan evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antar data. Adapun tujuannya adalah untuk mengidentifikasi anomali atau risiko salah saji material. Prosedur ini digunakan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian audit. Contoh: analisis rasio keuangan, tren penjualan, atau perbandingan anggaran vs realisasi.

G. Simpulan

Proses audit merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dimulai dari perencanaan hingga pelaporan audit. Setiap tahapan dalam audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa audit yang dilakukan telah menghasilkan opini yang andal dan dapat dipercaya. Pemahaman mendalam terhadap tahapan pemeriksaan audit akan membantu auditor meningkatkan kualitas audit serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

JAWABARA

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach*. Pearson.
- Boynton, W. C., & Johnson, R. N. (2006). *Modern auditing: Assurance services and the integrity of financial reporting*. John Wiley & Sons.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principles of auditing: An introduction to international standards on auditing*. Pearson Education.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (n.d.). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- International Accounting Standards Board. (n.d.). *International Financial Reporting Standards*. IFRS Foundation.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 200: Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with International Standards on Auditing*. International Federation of Accountants.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 240: The auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements*. International Federation of Accountants.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 300: Planning an audit of financial statements*. International Federation of Accountants.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 315: Identifying and assessing the risks of material misstatement*. International Federation of Accountants.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 330: The auditor's responses to assessed risks*. International Federation of Accountants.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 560: Subsequent events*. International Federation of Accountants.
- International Auditing and Assurance Standards Board. (n.d.). *International Standard on Auditing 570: Going concern*. International Federation of Accountants.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate accounting: Problem solving survival guide* (Vol. 1). John Wiley & Sons.
- Knechel, W. R., & Salterio, S. E. (2016). *Auditing: Assurance and risk*. Routledge.

JANVARA

TENTANG PENULIS



Syarifah Massuki Fitri, S.E., MSA., Ak., CA.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Penulis lahir di Selong, 08 Juni 1986. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Mataram dengan Program Studi S1 Akuntansi, lulus tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Profesi Akuntansi tahun 2009 dan Studi Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2013. Penulis sejak tahun 2014 telah menjadi dosen tetap program studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Selain menjadi Dosen, penulis aktif sebagai Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berperan serta sebagai salah satu pengurus wilayah IAI wilayah NTB sampai dengan saat ini. Selain itu, penulis juga merupakan anggota Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA). Buku ini merupakan buku ketiga yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

JANVARA



BAB 5

PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Tiara Nurpratiwi, S.E., M.Si., Ak., CA
Politeknik Negeri Sriwijaya

A. Pendahuluan

Dinamika lingkungan bisnis global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian telah menempatkan organisasi pada tekanan ganda: di satu sisi dituntut untuk beroperasi secara efisien dan menghasilkan nilai, sementara di sisi lain harus mampu menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Dalam lanskap yang demikian, dua pilar fundamental tata kelola organisasi pengendalian internal dan manajemen risiko bukan lagi sekadar instrumen teknis kepatuhan, melainkan merupakan prasyarat keberlangsungan dan keandalan sebuah entitas bisnis. Serangan siber terhadap Sony Pictures pada November 2014 merupakan peringatan keras bagi dunia korporasi global. Dalam satu malam, sistem komputer lumpuh, data keuangan tersandera, dan jadwal pelaporan laba triwulanan Sony terpaksa ditunda (Elder et al., 2019). Peristiwa ini bersama dengan skandal Enron dan WorldCom di awal 2000-an menjadi katalis lahirnya regulasi ketat seperti *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) di Amerika Serikat, yang mewajibkan manajemen dan auditor perusahaan publik untuk menilai serta melaporkan efektivitas

pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Di Indonesia, urgensi serupa tercermin dalam serangkaian kegagalan korporasi besar. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp 802 miliar, kolapsnya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang meninggalkan utang Rp 6 triliun kepada 14 bank kreditur, hingga kebangkrutan PT Jamu Cap Nyonya Meneer setelah lebih dari satu abad beroperasi semuanya memperlihatkan benang merah yang sama: absennya sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan manajemen risiko yang efektif.

B. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan keseluruhan kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Elder et al. (2019) mendefinisikannya sebagai "kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya." Keyakinan ini bersifat memadai, bukan mutlak sebuah distinosi penting yang membedakan sistem pengendalian yang realistis dari ilusi keamanan penuh.

Elder et al. (2019) mengidentifikasi tiga tujuan utama yang mendasari perancangan sistem pengendalian internal yang efektif, antara lain:

- a. Pertama, keandalan pelaporan (*reliability of reporting*): pengendalian harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku, baik GAAP maupun IFRS.
- b. Kedua, efisiensi dan efektivitas operasi (*efficiency and effectiveness of operations*): pengendalian mendorong penggunaan sumber daya secara optimal dan menyediakan informasi keuangan maupun nonkeuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan.
- c. Ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (*compliance with laws and regulations*): pengendalian membantu organisasi mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan, perlindungan lingkungan, dan anti-kecurangan.

Tiga tujuan ini selaras dengan tiga kategori yang dirumuskan dalam kerangka COSO (2013) dan diadopsi secara global sebagai tolok ukur pengendalian internal korporasi (Adegoke, 2025). Dalam konteks audit, pemahaman terhadap pengendalian internal merupakan tahapan yang tidak dapat dilewatkan. Standar auditing mengharuskan setiap auditor untuk "mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji

material berdasarkan pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas" (Elder et al., 2019). Auditor berfokus terutama pada pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan dan pengendalian atas kelas transaksi, karena akurasi saldo akun bergantung sepenuhnya pada akurasi input dan pemrosesan transaksi. Ketika pengendalian dinilai kuat, auditor dapat mengurangi lingkup pengujian substantif; sebaliknya, kelemahan pengendalian memaksa perluasan pengujian secara signifikan.

Dua konsep fundamental yang mendasari perancangan pengendalian internal adalah keyakinan memadai dan keterbatasan inheren. Keyakinan memadai (*reasonable assurance*) mengakui bahwa pengendalian dikembangkan setelah manajemen mempertimbangkan biaya dan manfaatnya secara proporsional. Ini berarti bahwa tingkat pengendalian yang dipilih harus memadai dengan probabilitas rendah bahwa salah satu material tidak dapat dicegah atau dideteksi tetapi tidak harus sempurna (Elder et al., 2019). Keterbatasan *inheren* mengingatkan bahwa bahkan sistem pengendalian terbaik pun rentan terhadap kegagalan manusia. Jika dua karyawan yang bertugas menghitung persediaan secara independen keduanya lalai, hasil hitung akan keliru. Dengan begitu yang lebih mengkhawatirkan adalah praktik kolusi yaitu tindakan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk mencuri aset atau memalsukan catatan (Elder et al., 2019). Manajemen dapat mengabaikan prosedur (*management override*) untuk memoles laporan keuangan.

Berbagai kasus Indonesia mengkonfirmasi keterbatasan ini yaitu dalam kasus Jiwasraya, BPK telah berulang kali memberikan peringatan melalui laporan auditnya, namun pengendalian yang ada gagal menghentikan praktik investasi berisiko tinggi. Keterbatasan yang bersifat kultural: ketika pengendalian berubah menjadi rutinitas birokratis yang penuh formalitas tanpa substansi jebakan *paper works* maka pengendalian kehilangan fungsi esensinya. Ini menjadi tantangan utama bagi auditor dalam menilai apakah pengendalian yang ada bukan sekadar memenuhi syarat di atas kertas, melainkan benar-benar efektif dalam operasional sehari-hari.

1. Kerangka Kerja Pengendalian Intern COSO

Kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) merupakan standar pengendalian internal yang paling luas diterima di dunia. Pertama diterbitkan pada 1992 dan diperbarui pada 2013, kerangka ini memberikan panduan berbasis prinsip yang relevan bagi seluruh jenis entitas, berapa pun ukurannya dan di sektor apa pun. Pembaruan 2013 secara khusus

memperkuat relevansinya di era bisnis yang semakin global, kompleks, dan berbasis teknologi (Elder et al., 2019).



Gambar 5.1 Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO Integrated Framework 2013

Sumber: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013

Gambar 5.1 memvisualisasikan COSO dalam bentuk kubus tiga dimensi yang secara elegan menggambarkan keterkaitan antara tiga dimensi pengendalian internal. Dimensi pertama (wajah atas kubus) menampilkan tiga kategori tujuan pengendalian: operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Dimensi kedua (wajah samping) mewakili struktur organisasi: entitas, divisi, unit operasi, dan fungsi menandakan bahwa pengendalian beroperasi di setiap lapisan hierarki. Dimensi ketiga (wajah depan) menampilkan lima komponen pengendalian internal yang menjadi inti kerangka. Relasi antardimensi ini menggarisbawahi bahwa setiap komponen pengendalian harus diterapkan di setiap tingkatan organisasi dan mendukung setiap kategori tujuan secara simultan (Elder et al., 2019; Adegoke, 2025). Kerangka COSO 2013 memuat 17 prinsip yang harus seluruhnya hadir dan berfungsi agar pengendalian dapat dinyatakan efektif. Kelima komponen yang masing-masing ditopang oleh prinsip-prinsip tersebut membentuk satu kesatuan yang saling bergantung (Elder et al., 2019):

- a. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
Lingkungan pengendalian adalah "payung" yang menaungi keempat komponen lainnya. Elder et al. (2019) menjelaskannya sebagai tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, dewan direksi, dan

pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian. Lima prinsip yang menyusun komponen ini mencakup:

- integritas dan nilai etika (standar perilaku yang dikomunikasikan dan diperkuat melalui contoh nyata dari kepemimpinan);
- dewan direksi dan komite audit yang independen (badan pengawas yang efektif dan objektif untuk mengurangi kemungkinan manajemen *override*);
- struktur organisasi dan jalur pelaporan yang jelas;
- komitmen terhadap kompetensi (rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi personel yang memadai); serta
- akuntabilitas (pemberian insentif dan pertanggungjawaban atas tugas pengendalian).

Auditor yang menilai integritas manajemen apakah target penjualan tidak realistis, apakah terdapat dominasi individu tertentu memperoleh gambaran awal yang krusial tentang kualitas seluruh sistem pengendalian (Elder et al., 2019).

b. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko)

Penilaian risiko adalah proses manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Dalam konteks COSO, empat prinsip turunannya mengharuskan:

- penetapan tujuan yang jelas sebagai basis identifikasi risiko; penentuan strategi pengelolaan risiko;
- pertimbangan atas potensi kecurangan; serta
- pemantauan perubahan yang dapat memengaruhi pengendalian.

Elder et al. (2019) menekankan perlunya perhatian khusus pada risiko teknologi informasi, mengingat kegagalan sistem IT dapat melumpuhkan operasi organisasi atau menghasilkan informasi yang tidak andal sebagaimana dibuktikan oleh kasus Sony Pictures. Penilaian risiko manajemen berbeda dari penilaian risiko auditor: manajemen menilai risiko dalam rangka merancang pengendalian, sedangkan auditor menilai risiko untuk menentukan bukti yang dibutuhkan dalam audit.

c. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur spesifik yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan dan risiko dikelola ke tingkat yang dapat diterima. Elder et al. (2019) mengklasifikasikannya ke dalam lima kategori utama:

- Pemisahan tugas yang memadai, termasuk pemisahan antara penyimpanan aset dengan pencatatan, otorisasi dengan penyimpanan, tanggung jawab operasional

dengan pencatatan, serta tugas IT dengan departemen pengguna;

- otorisasi yang layak atas transaksi dan aktivitas, baik otorisasi umum (kebijakan) maupun spesifik (per transaksi);
- dokumen dan catatan yang memadai prenomor berurutan, disiapkan tepat waktu, dan dirancang untuk mencegah kesalahan;
- pengendalian fisik atas aset dan catatan, termasuk keamanan siber (*cybersecurity*); serta
- pemeriksaan independen (*independent checks*) atas kinerja, yang meliputi verifikasi silang, rekonsiliasi, dan pengujian otomatis berbasis sistem.

d. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

Sistem informasi dan komunikasi berfungsi untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas serta memelihara akuntabilitas atas aset terkait. Elder et al. (2019) menekankan bahwa prinsip turunan komponen ini mensyaratkan penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas, komunikasi internal yang efektif tentang tujuan dan tanggung jawab pengendalian, serta komunikasi kepada pihak eksternal yang relevan. Sistem akuntansi harus memenuhi seluruh asersi manajemen yang relevan keutuhan, akurasi, keterjadian, dan pengungkapan untuk setiap kelas transaksi. Adegoke (2025) melengkapi perspektif ini dengan menekankan bahwa dalam era digital, integritas informasi yang mengalir lintas fungsi dan lapisan organisasi menjadi prasyarat mutlak efektivitas pengendalian.

e. *Monitoring Activities* (Aktivitas Pemantauan)

Pemantauan adalah penilaian berkelanjutan atau periodik atas kualitas kinerja pengendalian internal untuk memastikan pengendalian beroperasi sebagaimana dimaksud. Sumber informasi pemantauan meliputi studi pengendalian yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian, laporan regulator, umpan balik personel operasional, dan keluhan pelanggan (Elder et al., 2019). Bagi perusahaan besar, fungsi audit internal merupakan instrumen pemantauan yang paling esensial. Agar efektif, audit internal harus dilaksanakan oleh staf yang independen dari departemen operasional dan akuntansi, serta melapor langsung kepada manajemen puncak atau komite audit. Standar PCAOB juga mengatur sejauh mana auditor eksternal dapat memanfaatkan hasil kerja auditor

internal dalam pelaporan pengendalian internal berdasarkan Pasal 404..

2. Kerangka Kerja Pengendalian Lainnya

Meskipun COSO merupakan kerangka yang paling dominan, dunia internasional mengenal beberapa kerangka alternatif yang dikembangkan dalam konteks yang berbeda. Sementara di Kanada, CoCo (*Criteria of Control*) yang dikembangkan oleh *Canadian Institute of Chartered Accountants* mendekati pengendalian dari sudut pandang nilai, komitmen, dan kemampuan menekankan bahwa pengendalian yang efektif lahir dari budaya, bukan sekadar prosedur. Di Inggris, *Turnbull Report* diterbitkan oleh *Financial Reporting Council* sebagai *Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business Reporting* mewajibkan dewan direksi perusahaan terdaftar untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam membangun sistem pengendalian internal. Pada tataran yang lebih kontemporer, pendekatan GRC (*Governance, Risk Management, and Compliance*) mengintegrasikan ketiga fungsi tersebut dalam satu kerangka kohesif. Studi kasus sebuah perusahaan asuransi *go-public* di Indonesia menunjukkan bahwa GRC terintegrasi memungkinkan kolaborasi berkelanjutan antara fungsi-fungsi assurance, peningkatan kecepatan pengambilan keputusan, dan eliminasi duplikasi proses. Dalam konteks regulasi OJK yang mewajibkan perusahaan asuransi melapor secara terpisah atas GCG dan manajemen risiko, pendekatan GRC terintegrasi bukan lagi sekadar opsi strategis, melainkan kebutuhan operasional.

3. Peran dan Tanggung Jawab atas Pengendalian Intern

Pemahaman tentang siapa bertanggung jawab atas apa merupakan prasyarat atas efektivitas pengendalian. Elder et al. (2019) dengan tegas memisahkan tanggung jawab manajemen dari tanggung jawab auditor. Manajemen adalah bukan auditor dan bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal entitas. Tanggung jawab ini konsisten dengan prinsip bahwa manajemen pula yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Di Amerika Serikat, Pasal 404(a) *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) mengoperasionalkan tanggung jawab ini dengan mewajibkan manajemen perusahaan publik untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup:

- a. Pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penetapan dan pemeliharaan pengendalian yang memadai, dan
- b. Penilaian atas efektivitas pengendalian tersebut per akhir tahun fiskal.

Setiap *material weakness* yang ditemukan harus diungkapkan, dan satu kelemahan material saja sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif (Elder et al., 2019). Pasal 404(b) selanjutnya mewajibkan auditor dari perusahaan publik besar untuk menerbitkan laporan opini atas efektivitas pengendalian tersebut. Penilaian manajemen mencakup dua aspek yaitu desain pengendalian (apakah pengendalian dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material) dan efektivitas operasional (apakah pengendalian berjalan sebagaimana dirancang dan apakah pelaksanaannya memiliki kewenangan dan kualifikasi yang diperlukan) (Elder et al., 2019). Di Indonesia, dimensi pertanggungjawaban ini diperkuat oleh PERMA 13/2016 yang menegaskan bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegagalan pengendalian yang memfasilitasi tindak korupsi.

Pada tataran operasional, kerangka tiga lini pertahanan menggambarkan pembagian tanggung jawab secara terstruktur. Lini pertama adalah manajemen operasional yang mengelola risiko dan pengendalian secara langsung. Lini kedua adalah fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang menyediakan keahlian dan pengawasan. Lini ketiga adalah audit internal yang memberikan assurance independen kepada dewan dan manajemen senior tentang efektivitas kedua lini pertama (Adegoke, 2025). Kasus SNP *Finance* mengekspos konsekuensi fatal ketika lini kedua dan ketiga gagal berfungsi: dugaan rekayasa pembukuan lolos dari pengawasan komite audit hingga mengakibatkan kerugian Rp 1,4 triliun.

4. Evaluasi Pengendalian Intern

Evaluasi pengendalian internal mencakup penilaian atas efektivitas desain dan efektivitas operasional. Dalam konteks audit, evaluasi ini menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit yang akan dirancang. Proses evaluasi umumnya melewati empat tahap berurutan:

- 1) Pemahaman sistem yaitu mendokumentasikan pengendalian melalui wawancara, observasi, dan *walkthrough*;
- 2) Penilaian risiko pengendalian yaitu menilai seberapa besar risiko bahwa salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi;
- 3) Pengujian pengendalian yaitu memverifikasi bahwa pengendalian yang akan diandalkan benar-benar berfungsi efektif sepanjang periode yang diaudit; dan
- 4) Pelaporan kelemahan yaitu mengomunikasikan setiap kelemahan kepada manajemen dan, apabila signifikan, kepada komite audit (Adegoke, 2025).

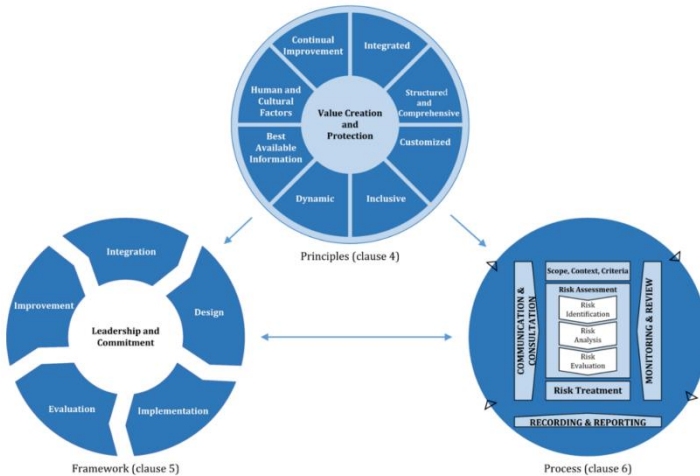
Asesmen pendahuluan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya satu kali yang mencakup peninjauan proses bisnis dengan prinsip PDCA (*Plan-Do-Check-Action*), evaluasi kecukupan struktur organisasi, serta tinjauan kompetensi dan tanggung jawab setiap jabatan. Rekomendasi ini sejalan dengan standar auditing yang menekankan bahwa auditor internal tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan pengendalian, tetapi juga memberikan saran konstruktif dan berkontribusi pada upaya mitigasi risiko yang berkelanjutan (Adegoke, 2025).

C. Manajemen Risiko

Manajemen risiko telah berevolusi dari sekadar pembelian asuransi atau pengelolaan risiko murni dalam paradigma konvensional namun telah menuju enterprise risk management (ERM) yang mengintegrasikan pengelolaan risiko secara holistik dalam penciptaan nilai perusahaan (Alijoyo, Priyarsono & Suroto, eds., n.d.). ISO 31000:2018 mendefinisikan manajemen risiko sebagai "aktivitas-aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko" sebuah formulasi yang mengandung tiga implikasi yaitu koordinasi lintas fungsi, bukan tindakan terisolasi; sifat direktif dan proaktif; serta cakupan pada organisasi secara keseluruhan (ISO 31000:2018).

Dalam konteks audit, Elder et al. (2019) mencatat bahwa semakin banyak organisasi yang mengadopsi paradigma ERM sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian global yaitu percepatan inovasi teknologi, ancaman siber, pergeseran geopolitik, dan fluktuasi regulasi. Pada 2017, COSO memperbarui kerangka ERM-nya menjadi *Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance*, yang menekankan integrasi ERM dengan strategi dan kinerja organisasi. Bagi auditor, pemahaman tentang pendekatan ERM klien yaitu mengidentifikasi jenis risiko bisnis, respons manajemen terhadap risiko

prioritas, serta pengawasan dewan hal ini memberikan wawasan berharga untuk asesmen risiko salah saji material.



Gambar 5.2. Kerangka ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines
Sumber: International Organization for Standardization. ISO 31000:2018

Gambar 5.2 mengilustrasikan arsitektur ISO 31000:2018 dalam tiga lapisan konsentris yang saling menopang yaitu:

- 1) Lapisan terluar menampilkan prinsip-prinsip manajemen risiko termasuk penciptaan nilai, integrasi, pendekatan terstruktur, keterbukaan informasi, faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan.
- 2) Lapisan tengah menggambarkan kerangka kerja (*framework*) yang mencakup kepemimpinan dan komitmen, desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan.
- 3) Lapisan terdalam berisi proses manajemen risiko dari penetapan konteks, melalui penilaian risiko (identifikasi, analisis, evaluasi), penanganan risiko, hingga pemantauan dan revidi yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan komunikasi dan konsultasi sebagai benang merah.

Prinsip bahwa risiko harus menyatu dengan seluruh proses bisnis organisasi bukan hanya proses tertentu merupakan gagasan inti yang membedakan ISO 31000 dari pendekatan manajemen risiko yang parsial.

1. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko ISO 31000 ke dalam empat langkah yang membentuk siklus berkelanjutan, antara lain:

- a. Identifikasi risiko: mengenali seluruh peristiwa atau kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, baik dari konteks internal (strategi, proses bisnis, budaya) maupun eksternal (regulasi, pasar, teknologi).
- b. Penilaian risiko: menganalisis kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak potensial (*impact*) setiap risiko, kemudian memprioritaskannya berdasarkan tingkat keparahan relatif.
- c. Respons risiko: memilih strategi yang paling tepat mitigasi melalui penguatan pengendalian, transfer melalui asuransi atau kontrak, penghindaran, atau penerimaan disesuaikan dengan selera risiko (*risk appetite*) organisasi.
- d. Pemantauan dan revaluasi: memastikan sistem manajemen risiko berfungsi efektif dari waktu ke waktu melalui indikator kinerja risiko (KRI) dan mekanisme eskalasi yang jelas.

2. Faktor Manusia dan Implementasi

Salah satu prinsip ISO 31000:2018 yang paling sering terabaikan dalam perancangan sistem adalah bahwa manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Tanpa pembekalan pengetahuan yang memadai, karyawan tidak akan *engaged* terhadap manajemen risiko karena tidak memahami manfaatnya. Studi sertifikasi manajemen risiko di Indonesia (2016–2018) mengungkapkan dua pendekatan strategis yaitu *top-down* yang dominan di sektor jasa keuangan karena tuntutan regulasi OJK yang mensyaratkan pimpinan puncak bersertifikasi terlebih dahulu; sementara *bottom-up* memastikan kompetensi manajemen risiko dipahami di tataran operasional harian. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, tetapi keberhasilan implementasi pada akhirnya bergantung pada kombinasi keduanya: komitmen pimpinan puncak yang didukung oleh budaya risiko yang mengakar di seluruh lapisan organisasi (Alijoyo, Priyarsono & Suroto, eds., n.d.).

3. Studi Kasus: Pelajaran dari Kegagalan Manajemen Risiko di Indonesia

Tiga kasus korporasi di Indonesia memberikan pelajaran empiris yang tak ternilai. Kasus Pertamina mengangkat risiko kepatuhan dan hukum dari ambiguitas prosedural: eksekusi akuisisi 10% blok BMG oleh PT Pertamina Hulu Energi sebelum persetujuan formal Dewan Komisaris diperoleh secara definitif menjadi titik sengketa hukum yang berujung pada tuduhan korupsi (Alijoyo, Priyarsono & Suroto, eds., n.d.). Kasus ini

menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam prosedur otorisasi salah satu aktivitas pengendalian COSO dapat mengekspos eksekutif pada risiko hukum serius bahkan untuk keputusan yang mungkin diambil dengan itikad baik.

Kasus Jiwasraya merupakan kegagalan sistemik pada hampir seluruh komponen COSO: lingkungan pengendalian yang bermasalah, penilaian risiko yang tidak memadai, aktivitas pengendalian yang tidak efektif atas penempatan investasi, serta pemantauan yang gagal merespons peringatan BPK secara tepat waktu. Produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi berujung pada gagal bayar Rp 802 miliar kepada 17.000 nasabah. Kasus Nyonya Meneer mewakili dimensi risiko strategis: kegagalan organisasi berusia lebih dari satu abad untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat mengakibatkan kebangkrutan dengan utang kepada 35 kreditur senilai Rp 89 miliar. Ketiga kasus ini secara kolektif mengafirmasi bahwa tanpa manajemen risiko yang matang dan terintegrasi, bahkan organisasi dengan rekam jejak panjang pun rentan terhadap kehancuran yang tiba-tiba.

D. Hubungan Signifikan antara Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Organisasi

Pengendalian internal dan manajemen risiko bersifat saling bergantung (*interdependent*) dimana pengendalian internal dirancang untuk mereduksi risiko ke tingkat yang dapat diterima, sementara manajemen risiko menyediakan kerangka strategis yang menentukan di mana dan bagaimana pengendalian harus ditempatkan. Hubungan ini bersifat hierarkis sekaligus sirkuler. Secara hierarkis, manajemen risiko berada pada tataran strategi ia menetapkan arah melalui penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* sementara pengendalian internal hadir sebagai respons operasional. Secara sirkuler, output sistem pengendalian temuan, insiden, laporan efektivitas menjadi umpan balik penting bagi proses manajemen risiko untuk memperbarui asesmen risikonya. Tanpa manajemen risiko yang efektif, pengendalian akan dirancang tanpa panduan prioritas; tanpa pengendalian yang kuat, strategi manajemen risiko tetap menjadi rencana di atas kertas.

Ketika organisasi memiliki proses manajemen risiko yang terdokumentasi dengan baik dan pengendalian yang *sound*, auditor memperoleh keyakinan lebih besar tentang keandalan data keuangan sehingga dapat menyesuaikan intensitas pengujian substantifnya. Sebaliknya, kegagalan manajemen dalam mengidentifikasi atau

merespons risiko signifikan memaksa auditor mengumpulkan bukti yang jauh lebih banyak (Elder et al., 2019). Pendekatan ini memiliki efisiensi yang sangat signifikan. Ketika manajemen mengidentifikasi risiko secara efektif dan menerapkan pengendalian yang responsif, auditor dengan memahami dan menguji pengendalian tersebut dapat memfokuskan sumber daya auditnya pada area berisiko tinggi. Ini menghasilkan audit yang lebih efisien sekaligus lebih bernilai tambah bagi organisasi: bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan instrumen verifikasi yang benar-benar bermakna (Adegoke, 2025). Pengendalian Internal sebagai Instrumen Mitigasi Risiko yang Paling Operasional. Jika manajemen risiko beroperasi pada tataran strategi dan kebijakan, maka pengendalian internal beroperasi pada tataran implementasi dan eksekusi. Dalam hierarki instrumen mitigasi risiko, pengendalian internal merupakan yang paling konkret, paling operasional, dan paling langsung terasa dampaknya dalam keseharian aktivitas organisasi.

Setiap aktivitas pengendalian yang ada dalam suatu organisasi baik itu prosedur otorisasi, segregasi tugas, rekonsiliasi periodik, maupun kontrol sistem informasi pada dasarnya merupakan respons terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai memerlukan pengendalian. Ketika pengendalian-pengendalian ini berfungsi efektif, eksposur risiko organisasi berkurang. Ketika pengendalian gagal atau diabaikan, risiko yang tadinya terkendali berubah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan nilai organisasi. Ilustrasi paling gamblang tentang pengendalian internal sebagai instrumen mitigasi risiko dapat dilihat pada kasus *SNP Finance*. Kegagalan fungsi pengawasan dewan komisaris dan komite audit untuk mendeteksi rekayasa pembukuan menunjukkan bahwa pengendalian detektif yang seharusnya mengidentifikasi penyimpangan dan memungkinkan tindakan koreksi tepat waktu sama sekali tidak berfungsi. Konsekuensinya, risiko kecurangan yang seharusnya dapat dimitigasi sejak dini berkembang menjadi bencana korporasi dengan kerugian mencapai Rp 1,4 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegoke, A. (2025). *Understanding Internal Control Systems and Risk Management in Audit*. Risk & Audit Insight, LinkedIn Pulse, 2 Juni 2025. <https://www.linkedin.com/pulse/understanding-internal-control-systems-risk-audit-abidemi-adegoke-j5s1f>
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2019). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Hoboken, NJ: Pearson Education.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. Durham, NC: COSO. (Dikutip dalam Adegoke, 2025).
- Institute of Internal Auditors (IIA). (2017). *International Professional Practices Framework (IPPF)*. Lake Mary, FL: IIA.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 – Risk Management – Guidelines*. Geneva: ISO.
- Moeller, R.R. (2011). *COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Processes*. Hoboken, NJ: Wiley.

TENTANG PENULIS



Tiara Nurpratiwi, S.E., M.Si., Ak., CA.

Politeknik Negeri Sriwijaya

Tiara Nurpratiwi Politeknik Negeri Sriwijaya, Penulis lahir di Palembang, 03 Mei 1991 Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Sriwijaya dengan Program Studi S1 Ekonomi Akuntansi, lulus tahun 2012, dan Penulis melanjutkan Studi Magister tahun 2015 di Universitas Sriwijaya pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi Akuntansi, lulus tahun 2018. dan sekarang Tahun 2026 ini penulis sedang melanjutkan Program Doktor Ilmu Ekonomi BKU Akuntansi di Universitas Sriwijaya.

JANVARA



BAB 6

BUKTI AUDIT DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Bella Chenia Meitasir, S.E., M.Ak.
Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Liwa

A. Pengertian Bukti Audit

Auditor harus menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan yang sesuai dengan keadaan yang ada guna mendapatkan data audit yang memadai dan berkaitan. Informasi audit tersebut bersifat krusial untuk menguatkan kesimpulan dalam laporan auditor. Informasi ini sifatnya juga terakumulasi dan diperoleh melalui tahapan-tahapan audit. Tahapan audit mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, rekalkulasi, rerunning, serta prosedur analisis, dan kerap memadukan berbagai metode untuk menanyakan informasi kepada manajemen. Bukti audit merupakan seluruh data, baik tertulis maupun lisan, yang digunakan auditor untuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar dan kriteria yang relevan disebut sebagai bukti. Bukti audit adalah sekumpulan informasi yang dikumpulkan auditor untuk mendukung atau mengurangi keyakinan mereka. Bukti dapat berupa informasi positif (+), negatif (-), kombinasi baik/buruk (-+), atau konsisten baik (++), serta buruk (-). Bukti audit positif dapat memperkuat keyakinan auditor mengenai kecukupan informasi.

Sebaliknya, bukti negatif mengurangi tingkat keyakinan auditor. Auditor menetapkan keputusan berdasarkan keyakinan awal terhadap objek audit, lalu menyesuaikannya (*anchoring*) berdasarkan bukti yang diperoleh. Dokumen audit mencakup data yang ada dalam pembukuan keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, atau informasi tambahan semacam audit terdahulu serta tinjauan mutu dari firma audit yang bersangkutan mengenai penerimaan dan kelanjutan kerja sama dengan klien. Para auditor ditugaskan untuk menjalankan berbagai tahapan dalam pemeriksaan guna mengumpulkan bukti audit yang cukup dan sesuai. Ketersediaan bukti audit dievaluasi berdasarkan kuantitasnya, sementara relevansinya dinilai dari kualitasnya. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh pertimbangan auditor mengenai tingkat risiko kekeliruan yang signifikan serta kualitas bukti tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bukti audit meliputi segala bentuk informasi yang dimanfaatkan oleh auditor guna membuktikan keabsahan terhadap laporan keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 SA Seksi 150 Tentang Standar Auditing bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Auditor mengkaji berbagai faktor dengan berlandaskan pada penilaian mereka mengenai sejauh mana risiko terkait dengan tugas yang diemban. Dalam prosesnya, auditor menetapkan empat keputusan penting berkaitan dengan temuan audit, yaitu:

- a. Bukti apa yang dapat diperoleh (sifat)
- b. Bilamana dapat diperoleh bukti (saat)
- c. Berapa banyak bukti yang dapat diperoleh (luas)
- d. Siapa yang ditugaskan untuk memperoleh bukti (penetapan staf).

Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah bukti dapat dikatakan layak untuk dipakai. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, auditor tidak diperkenankan untuk menggunakan bukti tersebut.

- a. Relevansi. Keterkaitan bukti sangat ditentukan oleh tipe audit yang dilaksanakan serta cara informasi tersebut diperoleh dan dianalisis dalam konteks keseluruhan.
- b. Sumber. Aspek sumber merupakan salah satu elemen penting yang berpengaruh terhadap keandalan bukti audit. Informasi yang berasal dari luar biasanya lebih diutamakan dibandingkan yang berasal dari dalam, karena dinilai lebih objektif.
- c. Sifat. Bukti audit dianggap mencukupi ketika informasi disampaikan melalui presentasi, konfirmasi di lapangan, atau dokumen resmi.

- d. Kecukupan. Bukti audit juga mempertimbangkan materi yang disajikan, seperti laporan bank, yang selanjutnya berkontribusi dalam menentukan posisi keuangan perusahaan..

Saat menentukan langkah-langkah audit yang akan dijalankan, auditor perlu mengumpulkan bukti yang memadai untuk menunjang tercapainya sasaran audit, sekaligus membedakan antara sasaran audit yang bersifat umum dan sasaran audit yang bersifat spesifik.

- a. Sasaran Audit Umum. Secara fundamental, tujuan pokok audit adalah menerbitkan pendapat tentang kewajaran posisi finansial berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- b. Sasaran Audit Spesifik. Fokus utama audit spesifik adalah investigasi terhadap komponen-komponen dalam laporan keuangan yang merupakan klaim dari pihak manajemen.

B. Sifat Bukti Audit

Bukti audit sangat esensial untuk memperkuat kesimpulan yang disajikan dalam laporan auditor. Sifatnya yang terakumulasi, bukti audit didapatkan melalui pelaksanaan berbagai tahapan audit. Tahapan audit ini meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan ulang, pelaksanaan kembali, dan penerapan prosedur analitis, yang seringkali diperkaya dengan berbagai pertanyaan kepada manajemen. Adapun prosedur-prosedur dalam memperoleh bukti audit, antara lain :

- a. Penilaian risiko yang sedang berjalan
- b. Tahapan audit berikutnya terdiri dari:
 - Pengujian kontrol, jika disyaratkan oleh SA atau jika auditor memilih untuk melakukannya
 - Prosedur substantif, termasuk uji rinci dan prosedur analitis substantif

Informasi akuntansi dan seluruh data pendukung yang tersedia bagi auditor merupakan dasar dari bukti audit untuk laporan keuangan. Di dalamnya termasuk catatan jurnal, buku besar, serta buku asisten, materi pendukung akuntansi yang sesuai, dan juga lembar kerja serta dokumen spreadsheet yang berguna untuk alokasi biaya, kalkulasi, dan pemantauan menyeluruh merupakan bukti yang menopang laporan finansial. Data akuntansi yang berdiri sendiri tidaklah memadai sebagai penunjang laporan keuangan. Bukti pendukung audit mencakup cek, rekam jejak dana elektronik, kwitansi pembayaran, perjanjian tertulis, risalah pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, dan pernyataan resmi dari orang-orang yang kompeten. Informasi yang diperoleh auditor dari dialog, observasi, peninjauan, dan pengecekan fisik, ditambah dengan data lain yang dihimpun atau

tersedia bagi auditor, memungkinkan penarikan kesimpulan yang kokoh. Untuk diyakini, audit trail mesti sah dan bersesuaian. Bukti audit yang berasal dari luar organisasi, dari pihak independen, cenderung lebih terpercaya daripada bukti yang berasal dari internal perusahaan.

- a. *Physical Evidence*, yaitu segala sesuatu yang dapat dikuantifikasi, dijaga, diamati, dan yang paling penting, berguna dalam mencapai maksud atau tujuan keberadaan. Contohnya termasuk bukti konkret dari pengecekan stok, pengamatan terhadap perhitungan fisik barang yang ada, verifikasi dokumen penting secara fisik, dan pencatatan aset tetap.
- b. *Confirmation Evidence*, yaitu temuan yang mengindikasikan kepemilikan atau penilaian, datang secara langsung dari pihak eksternal yang bukan klien. Contoh konkretnya adalah tanggapan konfirmasi utang, barang titipan, tanggung jawab keuangan, dan juga konfirmasi dari kuasa hukum klien.
- c. *Documentary Evidence*, yaitu meliputi pembukuan kas serta berbagai surat berharga yang menunjang setiap aktivitas jual beli. Contohnya adalah kuitansi pembelian, fotokopi faktur penjualan, serta catatan jurnal.
- d. *Mathematical Evidence*, yaitu merupakan proses telaah, pemeriksaan kembali, serta modifikasi yang dilakukan oleh pemeriksa. Sebagai ilustrasi, dapat dijumpai dalam penjumlahan seluruhnya, penghitungan paralel, perincian serta pemanjangan persediaan, alokasi dan penetapan ongkos penyusutan, kalkulasi bunga, untung/rugi dari pelepasan aset tetap, dan kewajiban pajak atas pendapatan.
- e. *Analytical Evidence*, yaitu hasil yang diperoleh dari analisis mendalam terhadap informasi finansial klien. Pendekatan analitis bisa diterapkan melalui *Trend* dan *Common Size Analysis*.

C. Kompetensi Jenis-jenis Bukti Audit

Pertama, mutu pengendalian internal klien sangat berpengaruh pada kecakapan berbagai macam audit. Contohnya, catatan di sebuah organisasi dengan pengendalian internal yang mumpuni akan lebih dapat dipercaya karena dokumen-dokumen tersebut cenderung lebih akurat. Begitu pula, analisis prosedural takkan dianggap sebagai bukti audit yang sah jika kendali yang semestinya menghasilkan data malah menyajikan informasi keliru. *Kedua*, inspeksi fisik dan perhitungan yang kemungkinan besar dilakukan bisa memberikan tingkat kepastian yang kokoh apabila pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya, sekalipun terdapat perbedaan yang jelas dalam

penerapan kedua jenis bukti tersebut. Kedua jenis bukti audit ini secara efektif mengindikasikan bahwa walau bukti audit boleh saja punya tingkat kredibilitas yang setara, hasilnya bisa berbeda jauh. *Ketiga*, ragam bukti audit yang spesifik jarang mampu menyajikan bukti audit yang cukup hanya dengan bergantung pada satu tipe bukti untuk mencapai beberapa sasaran audit.

D. Teknik Pengumpulan Data Audit

Standar Akuntansi Pemeriksaan (SAK) menguraikan tugas auditor dalam audit umum, yaitu mengevaluasi kecukupan bukti audit demi memberikan opini yang meyakinkan atas laporan keuangan. Auditor, yang bertugas mengaudit laporan keuangan klien, bertanggung jawab penuh untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit guna memenuhi sasaran audit. Sasaran auditor dalam memperoleh bukti audit yang relevan dan cukup adalah memverifikasi kesesuaian informasi yang disajikan klien dengan kerangka standar audit yang berlaku. Kolaborasi efektif antara auditor dan klien memfasilitasi penjelasan atas data keuangan. Hal ini krusial mengingat auditor akan membagikan hasil auditnya kepada para pemakai laporan keuangan. Demi menjamin mutu dan relevansi bukti audit, auditor akan mengecek apakah bukti yang didapat mengandung salah saji material yang tidak dapat dikoreksi, baik secara terpisah maupun gabungan. Auditor kemudian akan merumuskan kesimpulan dari evaluasi bukti audit tersebut untuk disajikan dalam laporan audit, yang merinci seluruh langkah audit yang telah dijalani.

Proses audit sangat bergantung pada pengumpulan data yang akurat. Kualitas informasi yang dikumpulkan secara langsung berdampak pada kejituan hasil audit sistem informasi. Maka, penting sekali untuk cermat dalam menentukan cara memperoleh data agar audit yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. Jika cara pengumpulan datanya keliru, audit yang dihasilkan bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi nyata perusahaan dan kurang tepat sasaran. Auditor dapat memperoleh temuan audit dengan melakukan langkah-langkah pemeriksaan berikut.

- a. Inspeksi. Cara merupakan untuk meneliti secara detail suatu dokumen atau situasi spesifik. Dengan melakukan pengecekan fisik, auditor dapat menentukan keabsahan dokumen tersebut.
- b. Observasi. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh keterangan visual atau material mengenai jalannya suatu proses dengan cara menyaksikan langsung aktivitas tersebut di tempatnya.
- c. Permintaan Keterangan (*Enquiry*). Prosedur pemeriksaan ini dijalankan dengan cara meminta keterangan lisan. Informasi yang

diperoleh melalui permintaan ini dapat mengungkap data baru atau menguatkan alat bukti audit yang telah terkumpul.

- d. *Konfirmasi (Confirmation)*. Konfirmasi adalah sebuah tindakan penyelidikan yang memungkinkan pemeriksa memperoleh keterangan langsung dari pihak eksternal yang netral. Hasilnya bisa berupa dokumen tertulis, baik asli maupun salinan digital, guna memastikan kebenaran data yang diperoleh dari klien.
- e. *Penelusuran (Tracing)*. Penelusuran diaplikasikan pada bukti-bukti yang berwujud dokumen. Pemeriksa akan menelusuri informasi dari awal pencatatan data pada dokumen, kemudian dilanjutkan dengan melacak bagaimana proses pengolahan data tersebut di dalam sistem akuntansi.
- f. *Pengecekan Dokumen Pendukung (Vouching)*. Langkah pertama adalah menelaah catatan pembukuan terlebih dahulu, baru kemudian beralih ke dokumen yang menjadi dasar catatan tersebut. Sebagai ilustrasi, auditor akan melihat jurnal pembelian, kemudian membandingkannya dengan faktur yang relevan dan dokumen penerimaan barang.
- g. *Penghitungan Fisik (Counting)*. Metode ini melibatkan penghitungan langsung aset-aset fisik milik perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian antara catatan dengan jumlah aset yang sebenarnya ada.
- h. *Pemindaian (Scanning)*. Prosedur ini dilakukan dengan cara meninjau secara kilat untuk mengidentifikasi adanya hal-hal yang janggal atau tidak lazim dalam kumpulan data atau dokumen.
- i. *Pelaksanaan Kembali (Reperforming)*. Metode ini adalah melakukan kembali aktivitas yang sebelumnya telah dikerjakan oleh klien, termasuk di dalamnya adalah proses penghitungan dan rekonsiliasi yang sudah mereka lakukan.
- j. *Audit Berbantuan Komputer*. Para akuntan akan mengaudit catatan digital menggunakan bantuan mesin komputer atau *Computer Assisted Techniques (CAT)*.

E. Pemilihan Item Bukti Audit

Dalam memilih item untuk memperoleh bukti audit, seorang auditor dapat menggunakan cara-cara yang dapat digunakan oleh auditor untuk memilih elemen pengujian yaitu sebagai berikut:

1. Memilih semua elemen (pemeriksaan 100%)

Auditor mungkin mengambil keputusan untuk memeriksa seluruh populasi elemen yang membentuk kategori transaksi atau saldo akun (atau satu strata dalam populasi tersebut) sebagai

metode yang paling sesuai. Pemeriksaan 100% umumnya tidak diterapkan dalam pengujian pengendalian, tetapi sering digunakan dalam pengujian rinci. Pengujian 100% tepat dilakukan jika, misalnya:

- a. Populasi terdiri dari sejumlah kecil elemen dengan nilai masing-masing yang besar.
- b. Ada risiko signifikan dan metode lainnya tidak dapat memberikan bukti audit yang memadai dan relevan.
- c. Proses atau penghitungan yang diulang oleh sistem informasi secara otomatis membuat pemeriksaan 100% lebih efisien dari segi biaya.

2. Memilih elemen tertentu

Auditor dapat memilih elemen tertentu dalam suatu populasi. Elemen-elemen yang mungkin berpengaruh dalam pengambilan keputusan ini meliputi pemahaman auditor mengenai entitas, risiko yang telah diidentifikasi atas kesalahan penyajian yang material, serta karakteristik populasi yang sedang diuji. Pemilihan berdasarkan elemen tertentu masih mengandung risiko nonsampling. Elemen spesifik yang dipilih dapat mencakup:

- a. Elemen kunci dengan nilai tinggi. Auditor dapat memilih elemen tertentu dalam populasi karena nilai yang tinggi, atau karena elemen tersebut memiliki beberapa karakteristik lain, misalnya mencurigakan, tidak biasa, berisiko tertentu, atau memiliki catatan kesalahan.
- b. Semua elemen yang memiliki nilai di atas ambang tertentu. Auditor dapat memeriksa elemen yang nilainya melebihi angka tertentu untuk memverifikasi proporsi total dari kategori transaksi atau saldo akun.
- c. Elemen-elemen untuk mendapatkan informasi. Auditor bisa memeriksa elemen-elemen untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal seperti entitas atau sifat transaksi.

Meski teliti terhadap beberapa komponen saja dalam kategori transaksi atau saldo akun kerap jadi cara jitu mengumpulkan bukti audit, ini tak sama dengan sampling audit. Kesimpulan dari langkah audit yang diterapkan pada bagian terpilih ini tidak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi, sehingga pemeriksaan terfokus pada elemen-elemen tertentu tidak menyediakan bukti audit untuk bagian populasi yang terlewat.

3. Teknik Sampling Audit

Kata "tes" atau "uji" bisa diartikan sebagai sampling, yaitu ketika sejumlah item (beberapa piutang usaha, sebagian barang

persediaan, beberapa nota tagihan, dan sebagainya) diambil atau dipilih untuk diteliti. Maksud dari sampel audit adalah untuk menjadi landasan yang memadai bagi auditor dalam membuat kesimpulan mengenai populasi asal pemilihan sampel tersebut. Sampling audit adalah penerapan beberapa prosedur audit untuk komponen yang kurang dari 100 persen dalam populasi terkait audit, sehingga setiap unit dalam sampel memiliki kesempatan untuk dipilih dalam upaya memberikan dasar yang tepat bagi auditor untuk mengambil kesimpulan mengenai seluruh populasi. Pengalihan bukti audit dari berbagai sumber atau dengan sifat yang berbeda-beda dapat menunjukkan bahwa suatu elemen bukti audit tidak andal, misalnya ketika bukti audit yang diperoleh tidak konsisten. Bukti yang diperoleh dari sumber lain. Contoh kasus ini bisa muncul ketika terdapat ketidakcocokan dalam tanggapan terhadap permintaan informasi dari manajemen, auditor internal, dan pihak lain, atau ketika tanggapan atas permintaan informasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan tidak selaras dengan tanggapan manajemen. Metode utama dalam memilih sampel adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan acak, yang dilakukan melalui pembuatan angka acak atau generator nomor acak, misalnya tabel angka acak.
- b. Pemilihan sistematis, sehingga jumlah unit sampel dalam populasi dibagi dengan jumlah sampel untuk memperoleh interval sampel, misalnya 50, dan setelah menentukan titik awal dalam 50 unit sampling pertama, setiap unit sampling ke-50 akan dipilih. Meskipun titik awal bisa ditentukan secara acak, pemilihan sampel akan lebih acak jika menggunakan generator angka acak menggunakan komputer atau tabel acak. Saat menerapkan pemilihan sistematis, auditor harus memastikan bahwa unit sampling dalam populasi tidak teratur sehingga interval sampling mengikuti pola tertentu.
- c. Sampling unit moneter adalah jenis pemilihan yang menimbang nilai, di mana ukuran sampel, pemilihan, dan evaluasi hasil digunakan untuk menarik kesimpulan tentang jumlah moneter.
- d. Pemilihan sembarang, sehingga auditor memilih sampel tanpa mengikuti teknik yang terstruktur. Meskipun tidak menggunakan teknik terstruktur, auditor harus menghindari keberpihakan yang disengaja atau yang dapat diprediksi (seperti menghindari kesulitan menemukan elemen tertentu, atau selalu memilih atau menghindari entri di awal atau akhir halaman), sehingga memastikan bahwa semua elemen yang terdaftar dalam populasi memiliki kesempatan yang sama

- untuk dipilih. Pemilihan sembarang tidak sesuai ketika menggunakan teknik statistik dalam sampling.
- e. Pemilihan blok melibatkan pengambilan satu blok yang terdiri dari elemen-elemen yang berdekatan dalam populasi. Pemilihan blok biasanya tidak tepat digunakan dalam audit karena sebagian besar populasi tersusun sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dalam suatu urutan dapat diharapkan memiliki karakteristik yang sama di antara mereka, tetapi berbeda dari elemen lain dalam populasi. Meskipun dalam beberapa kondisi mungkin cocok untuk memeriksa suatu blok elemen, teknik pemilihan sampel ini jarang digunakan jika auditor ingin menarik kesimpulan yang dapat diandalkan tentang keseluruhan populasi berdasarkan sampel tersebut.

F. Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Bukti

Saat mengumpulkan bukti, auditor akan mencari dan menyeleksi keterangan yang dapat dipercaya dan sah agar dapat menggambarkan situasi perusahaan sesungguhnya. Seluruh hal yang memengaruhi keandalan keterangan tertera di bawah ini:

- a. Bukti yang diperoleh dari luar perusahaan atau perusahaan melalui sumber independen, dianggap lebih andal.
- b. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keandalan bukti adalah bentuk pencatatannya. Jika direkam dalam bentuk dokumenter melalui media kertas atau elektronik dalam format legal, dianggap lebih dapat diandalkan.
- c. Jika pengendalian terkait yang diterapkan oleh korporasi atau firma benar-benar efektif, bukti adalah yang paling dapat diandalkan.
- d. Jika Bukti diperoleh melalui Akuntan Publik atau Auditor secara langsung, maka akan dianggap lebih andal jika dibandingkan dengan memperoleh dokumen bukti Audit dari sumber tidak langsung atau melalui inferensi lainnya.
- e. Dokumen bukti asli lebih dapat diandalkan daripada fotokopi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). Auditing. Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Buku 2, Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Driya, P., D., Putra, R., A., L., G., Q., Pradnyana, A., M., I. (2021). Teknik Pengumpulan Data Pada Audit Sistem Informasi Dengan Framework Cobit. *INSERT: Informasi System and Emerging Technology Journal*, 2(2).
- Koerniawan, I. *Auditing Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*. (2021). Yayasan Prima Agus Teknik. 2021.
- MDP. Oktiawati, H. *Auditing*. (2022) CV. Agus Salim Press.
- Muhsin. (2021). Pengetahuan, Profesionalisma, Urutan Bukti Audit dan Audit Judgment. *Jurnal Ilmiah STIE*. 10(2).
- Musfiroh, L. Auditing I Berbasis ISA: Prinsip Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan. (2021). IAIN Jember.
- Rahmawati, A., D., Sudarma, M. (2022). Pengaruh Fee Audit, Bukti Audit, Dan Auditor Attributes Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota Surabaya Dan Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Ramadhani, F., N., Triani, A., N., N. (2022). Penerapan Teknologi Berbasis IoT (*Internet of Things*) Dalam Pengumpulan Bukti Audit Di Masa Pandemi Covid-19. *Accounting Global Journal*, 6(1).
- Sari, R., A., Winarto, H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Bukti Audit Terhadap Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(1).

TENTANG PENULIS



Bella Chenia Meitasir, S.E., M.Ak.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
Liwa

Penulis lahir di Krui pada tanggal 10 Mei 1997. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Liwa. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung dengan Program Studi Akuntansi Syariah, dan S2 di Universitas Lampung dengan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi. Penulis termotivasi untuk menulis karena ingin berkontribusi dan aktif berbagi ilmu pengetahuan kepada pembaca. Koresponden melalui email bellachenia89@gmail.com.

JANVARA



BAB 7

DOKUMENTASI AUDIT DAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.Ftax
Universitas Bina Mandiri Gorontalo

A. Pendahuluan

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, kebutuhan akan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, audit laporan keuangan menjadi instrument penting untuk memberikan keyakinan keuangan menjadi instrument penting dalam memberikan keyakinan keuangan atas kewajaran penyajian laporan terseut. Audit laporan keuangan hadir sebagai mekanisme inependen untuk memberikan keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Dalam konteks ini, dokumentasi audit dan kertas kerja pemeriksaan menjadi elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari proses audit itu sendiri.

Salah satu aspek penting dalam proses audit adalah dokumentasi audit. Menurut *Internasional Auditing and Assurance Standards Board* melalui *Internasional Standard on Auditing* (ISA) (230),

dokumentasi audit adalah catatan yang mencakup prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. Dokumentasi ini harus cukup untuk memungkinkan auditor lain yang berpengalaman memahami pekerjaan yang telah dilakukan tanpa keterlibatan langsung dalam audit tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik audit juga mengalami transformasi, khususnya dalam hal dokumentasi. Digitalisasi dokumentasi audit memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data, namun juga menimbulkan tantangan terkait keamanan, integritas, dan kerahasiaan informasi. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk tidak hanya memahami teknik penyusunan dokumentasi secara manual, tetapi juga mampu mengadaptasi teknologi dalam proses audit (Hall, 2016).

Lebih lanjut, dokumentasi audit yang memadai memiliki implikasi langsung terhadap kualitas audit. Dokumentasi yang lengkap dan akurat dapat memperkuat posisi auditor dalam menghadapi pemeriksaan kualitas (*quality review*) maupun potensi sengketa hukum. Sebaliknya, dokumentasi yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko audit yang signifikan, termasuk kegagalan dalam mendeteksi salah saji material (Messier et. Al., 2018). Sejalan dengan hal tersebut, literatur audit seperti yang dikemukakan oleh Arens, Alvin A., dalam buku *Auditing and Assurance Services* menegaskan bahwa dokumentasi audit mencakup seluruh informasi yang dikumpulkan auditor untuk mendukung opini audit. Dokumentasi ini harus disusun secara sistematis dan terorganisir agar memudahkan proses review, supervisi, serta sebagai referensi untuk audit periode berikutnya. Oleh karena itu, dokumentasi audit tidak bersifat umum semata, tetapi memerlukan alat yang lebih teknis dan rinci untuk mengorganisasikan informasi tersebut secara efektif. Kebutuhan akan dokumentasi yang lebih terstruktur tersebut diwujudkan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan (*audit working paper*).

Kertas kerja pemeriksaan merupakan bagian dari dokumentasi audit yang berisi rincian prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta hasil pengujian yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Kertas kerja pemeriksaan (*audit working paper*) merupakan bagian integral dari dokumentasi audit. Menurut Arens et al. (2017), kertas kerja audit berfungsi sebagai dasar bagi auditor dalam merumuskan opini serta sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar profesional. Selain itu, Mulyadi (2016) menegaskan bahwa kertas kerja harus disusun secara sistematis, lengkap, dan jelas agar dapat mendukung kesimpulan audit secara memadai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi audit dan kertas kerja pemeriksaan memiliki peranan strategis dalam

menjamin kualitas audit dan akuntabilitas profesional auditor. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek ini menjadi sangat penting. Dokumentasi audit dan kertas kerja pemeriksaan merupakan elemen krusial dalam proses audit. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai bukti pelaksanaan audit tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan opini auditor dan alat perlindungan hukum.

B. Konsep Dasar Dokumentasi Audit

Dokumentasi audit merupakan elemen fundamental dalam proses audit yang berfungsi sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan prosedur sesuai standar profesional. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep dasar dokumentasi audit menjadi hal yang esensial dalam menjaga kualitas dan kredibilitas hasil audit.

1. Pengertian Dokumentasi Audit

Dokumentasi audit merupakan salah satu elemen paling penting dalam proses audit karena menjadi bukti bahwa auditor telah melaksanakan prosedur audit sesuai standar. Menurut *Internasional Standard on Auditing* (ISA, 230), dokumentasi audit adalah catatan yang memuat prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan yang dicapai oleh auditor.

Menurut Mulyadi (2016) dalam buku *Auditing*, dokumentasi audit adalah :

“Catatan yang disusun oleh auditor mengenai prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta kesimpulan yang diambil selama proses audit berlangsung.”

Dapat dijelaskan bahwa dokumentasi audit harus disusun secara sistematis dan memadai agar dapat :

- a. Mendukung pendapat auditor,
- b. Menjadi bukti bahwa audit dilaksanakan sesuai standar,
- c. Memudahkan proses review dan supervisi.

2. Tujuan Dokumentasi Audit

Dalam setiap proses audit, dokumentasi audit memegang peranan yang sangat krusial sebagai fundamental yang mendukung seluruh tahapan pemeriksaan. Tujuan utama dokumentasi audit adalah untuk menyediakan bukti yang memadai dan relevan atas prosedur yang telah dilakukan auditor, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan opini audit.

Menurut IAASB (2016), dokumentasi harus cukup untuk memungkinkan auditor lain memahami pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun tujuan utama dari dokumen audit adalah :

- a. Mendukung opini auditor
- b. Bukti kepatuhan terhadap standar audit
- c. Mempermudah supervisi dan review
- d. Sarana perencanaan dan pengendalian
- e. Sebagai bukti hukum
- f. Referensi audit berikutnya
- g. Meningkatkan kualitas audit

Berikut penjelasan tujuan utama dokumentasi dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 1. Tujuan Utama Dokumentasi Audit

No.	Tujuan Dokumentasi	Penjelasan	Contoh Praktis
1.	Mendukung Opini Auditor	Dokumentasi menjadi dasar bukti bahwa auditor telah melakukan prosedur audit sesuai standar	Kertas kerja yang menunjukkan pengujian saldo
2.	Bukti Kepatuhan terhadap Standar Audit	Menunjukkan bahwa audit telah dilakukan sesuai standar profesional	Chekccklist prosedur audit sesuai standar
3.	Mempermudah Supervisi dan Review	Memudahkan atasan dalam menilai pekerjaan auditor	Review kertas kerja oleh partner audit
4.	Sarana Perencanaan dan Pengendalian	Membantu auditor dalam merencanakan dan mengontrol jalannya audit	Program audit tahunan
5.	Sebagai Bukti Hukum	Digunakan jika terjadi sengketa atau tuntutan hukum	Dokumentasi audit sebagai alat pembelaan
6.	Referensi Audit Berikutnya	Menjadi acuan untuk audit periode selanjutnya	Kertas kerja tahun sebelumnya sebagai pembandingan
7.	Meningkatkan Kualitas Audit	Membantu memastikan audit dilakukan secara sistematis dan lengkap	Dokumentasi prosedur pengujian <i>internal control</i>

Sumber : Arens et al.,(2017)

3. Karakteristik Dokumentasi Audit

Menurut IAAS (2016) dan Institut Akuntan Publik Indonesia, dokumentasi audit harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat mendukung kualitas dan akuntabilitas audit. Adapun karakteristik dokumentasi audit dalam tabel berikut :

Tabel 2. Karakteristik Dokumentasi Audit

Karakteristik	Uraian	Contoh
Lengkap (<i>Complete</i>)	Kelengkapan dokumentasi ini penting agar auditor lain yang berpengalaman dapat memahami proses audit tanpa perlu penjelasan tambahan	Kertas kerja audit yang memuat prosedur pengujian, hasil konfirmasi, dan kesimpulan atas kewajaran saldo.
Jelas dan Mudah Dipahami (<i>Clear and Understandable</i>)	Dokumentasi harus disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang jelas sehingga dapat dipahami oleh auditor lain terutama dalam proses review	Penggunaan tick mark, indeks, dan penjelasan singkat pada kerja yang menjelaskan langkah-langkah pengujian.
Relevan (<i>Relevant</i>)	Informasi yang didokumentasikan harus berkaitan langsung dengan tujuan audit dan mendukung opini auditor. Informasi yang tidak relevan sebaiknya tidak dimasukkan agar tidak mengaburkan fokus audit	Hanya mencatat transaksi yang material atau beresiko tinggi, bukan seluruh transaksi kecil yang tidak signifikan.
Andal (<i>Reliable</i>)	Dokumentasi harus didasarkan pada bukti audit yang valid dan dapat dipercaya, baik dari sumber internal maupun eksternal	Konfirmasi bank langsung dari pihak bank lebih andal dibandingkan data yang hanya berasal dari klien.
Tepat Waktu (<i>Timely</i>)	Dokumentasi harus dibuat secara tepat waktu, yaitu pada saat atau segera setelah	Auditor langsung mendokumentasikan hasil observasi

	prosedur audit dilakukan, agar informasi yang dicatat tetap akurat dan tidak terlupakan	persediaan saat <i>stock opname</i> berlangsung.
Terstruktur dan Sistematis (<i>Organized</i>)	Dokumentasi audit harus disusun dengan sistem pengarsipan yang rapi dan terstruktur untuk memudahkan pencarian dan penelusuran kembali	Penggunaan indeks kertas kerja seperti A (kas), B (piutang), C (persediaan), dan seterusnya.
Dapat Ditelusuri (<i>Traceable</i>)	Dokumentasi harus memungkinkan penelusuran dari laporan keuangan ke bukti audit (<i>vouching</i>) maupun sebaliknya (<i>tracing</i>)	Saldo persediaan di laporan keuangan dapat ditelusuri ke kartu persediaan dan hasil <i>stock opname</i> .

Sumber : Mulyadi (2016)

4. Jenis-Jenis Dokumentasi Audit

Menurut standar profesional seperti *Internasional Federation of Accountants* melalui ISA 230 (2017) dapat diklasifikasikan Jenis-jenis dokumentasi audit yang mencerminkan tahapan dan fungsi yang berbeda dalam proses audit, yang secara umum meliputi :

- Program audit; rencana rinci yang berisi prosedur audit yang dilakukan untuk setiap area pemeriksaan, dokumen ini menjadi pedoman kerja auditor selama proses audit.
- Kertas kerja utama; merupakan ringkasan dari akun-akun utama dalam laporan keuangan yang menghubungkan saldo laporan keuangan dengan rincian audit.
- Kertas kerja pendukung; dokumen berisi rincian yang mendukung angka dalam *lead schedule* dan merupakan hasil pengujian audit secara rinci.
- Memorandum audit; catatan naratif yang menjelaskan pertimbangan auditor, isu penting, serta kesimpulan atas suatu area audit.
- Dokumen bukti audit; dokumen ini mencakup seluruh bukti yang dikumpulkan auditor, baik dari internal maupun eksternal.
- Kertas kerja penyesuaian dan koreksi; dokumen yang mencatat usulan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan temuan audit.

- g. Dokumentasi review dan supervisi; dokumentasi yang menunjukkan bahwa pekerjaan audit telah direview oleh auditor senior atau partner.

C. Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan (*audit working papers*) adalah catatan yang disusun oleh auditor selama proses audit berlangsung, yang mencakup prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diambil. Kertas kerja pemeriksaan merupakan elemen penting dalam proses audit yang berfungsi sebagai bukti pelaksanaan audit dan dasar dalam pemberian opini auditor. Kertas kerja pemeriksaan membantu auditor dalam menyusun, mengorganisir, dan menyimpulkan hasil audit secara efektif.

1. Pengertian Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan merupakan elemen teknis yang sangat penting dalam audit karena berfungsi sebagai bukti pelaksanaan audit, dasar kesimpulan, serta alat kontrol kualitas. Penyusunan kertas kerja harus dilakukan secara sistematis, lengkap, dan sesuai standar.

Menurut Mulyadi (2017), kertas kerja pemeriksaan adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang dicapai selama audit. Sedangkan menurut Arens et al., (2020), *audit documentation (working papers)* merupakan catatan utama yang mendukung laporan audit dan menunjukkan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

Kertas kerja ini menjadi penghubung antara bukti audit dengan opini auditor.

2. Tujuan dan Fungsi Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan memiliki peran strategis dalam proses audit karena menjadi dasar utama dalam pembentukan opini auditor. Secara umum, tujuan kertas kerja adalah untuk mendokumentasikan seluruh proses audit secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mulyadi (2017), tujuan kertas pemeriksaan adalah untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan serta sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar auditing. Sedangkan menurut Arens, Elder, & Beasley (2020), *audit working papers serve as the principal record of the auditor's work and the basis for the audit report.*

Adapun tujuan utama kertas kerja pemeriksaan adalah :

- a. Mendukung opini auditor; kertas kerja mejadi dasar dalam menyatakan opini audit (wajar, wajar dengan pengecualian, dll). semua kesimpulan auditor harus didukung oleh bukti yang terdokumentasi.
- b. Membuktikan kepatuhan terhadap standar audit; dokumentasi menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan prosedur sesuai standar seperti ISA 230 (2019) atau SPAP (2021).
- c. Memfasiltasi supervisi dan review; kertas kerja memungkinkan auditor senior atau partner melakukan evaluasi terhadap pekerjaan tim audit.
- d. Sebagai dokumentasi hsitoris; kertas kerja disimpan sebagai arsip untuk audit periode berikutnya.
- e. Membantu perencanaan audit berikutnya; data audit sebelumnya membantu dalam memahami risiko dan menentukan strategi audit ke depan.

Tabel 3. Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan

No.	Tujuan	Penjelasan	Contoh Praktis
1	Mendukung opini auditor	Dasar kesimpulan audit	Kertas kerja pengujian akun
2	Kepatuhan standar	Bukti audit sesuai standar	Checklist audit
3	Supervisi dan review	Memudahkan evaluasi	Tanda tangan reviewer
4	Dokumentasi historis	Arsip audit	File audit tahun sebelumnya
5	Perencanaan audit	Dasar strategi audit	Risk assessment

Sumber : Messier et al., (2017)

Selain tujuan, kertas kerja juga memiliki fungsi operasional dalam pelaksanaan audit. Menurut Messier, Glover, & Prawitt (2017), fungsi utama kertas kerja pemeriksaan adalah : *to provide evidence of the auditor's basis for a conclusion and evidence that the audit was planned and performed properly*. Secara teknis, fungsi kertas kerja meliputi :

- a. Mendukung opini auditor
- b. Sebagai alat supervisi dan review
- c. Sebagai bukti hukum
- d. Sebagai referensi audit berikutnya.
- e. Sebagai alat kontrol kualitas audit

Tabel 7.4. Fungsi Kertas Kerja Pemeriksaan

No.	Fungsi	Penjelasan	Contoh
1	Bukti audit	Mendukung hasil audit	Konfirmasi bank
2	Perencanaan	Dasar strategi audit	Risk assessment
3	Koordinasi	Komunikasi tim	Program audit
4	Dasar laporan	Penyusunan opini	Ringkasan audit
5	Pengendalian kualitas	Menjamin standar	Review kertas kerja
6	Pertanggungjawaban hukum	Bukti jika sengketa	Dokumen audit lengkap

Sumber : Messier et al., (2017)

3. Karakteristik Kertas Kerja Pemeriksaan

Karakteristik kertas kerja pemeriksaan adalah sifat atau ciri yang harus dimiliki oleh dokumentasi audit agar dapat memenuhi standar profesional dan berfungsi secara optimal dalam mendukung proses audit.

Menurut Arens et al., (2020) dokumentasi audit harus disusun sedemikian rupa sehingga: auditor berpengalaman yang tidak terlibat dalam audit dapat memahami pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai, hal ini juga ditegaskan dalam ISA 230 (IAASB, 2019). Karakteristik utama kertas kerja pemeriksaan, adalah :

- Lengkap (*Completeness*); kertas kerja harus memuat seluruh informasi penting terkait proses audit, mulai dari prosedur, bukti, hingga kesimpulan.
- Jelas dan mudah dipahami (*Clarity*); dokumentasi harus disusun dengan bahasa yang jelas sehingga dapat dipahami oleh auditor lain tanpa penjelasan tambahan.
- Sistematis dan terorganisir (*Systematic Organization*); kertas kerja harus disusun secara terstruktur, menggunakan indeks, kode dan urutan logis.
- Relevan (*Relevance*); hanya informasi yang berkaitan dengan tujuan audit yang dimasukkan dalam kertas kerja.
- Akurat (*Accuracy*); data dalam kertas kerja harus mencerminkan kondisi sebenarnya dan bebas dari kesalahan.
- Tepat waktu (*Timeliness*); kertas kerja harus disusun pada saat audit berlangsung, bukan setelah audit selesai.
- Dapat direview (*Reviewability*); kertas kerja harus memungkinkan dilakukan review oleh auditor senior atau pihak lain.

- h. Rahasia (*Confidentiality*); kertas kerja mengandung informasi sensitif sehingga harus dijaga kerahasiaannya.
- i. Ekonomis dan efisien (*Efficiency*); dokumentasi harus dibuat secara efektif tanpa berlebihan, tetapi tetap memenuhi standar.

Tabel 7.5. Ringkasan Karakteristik Kertas Kerja Pemeriksaan

No.	Karakteristik	Penjelasan	Contoh
1	Lengkap	Memuat semua informasi audit	Semua akun terdokumentasi
2	Jelas	Mudah dipahami	Ada penjelasan naratif
3	Sistematis	Terstruktur	Ada indeks/kode
4	Relevan	Sesuai tujuan audit	Bukti terkait akun
5	Akurat	Data benar	Rekonsiliasi cocok
6	Tepat waktu	Disusun saat audit	Dokumentasi langsung
7	Dapat direview	Bisa diperiksa ulang	Tanda tangan reviewer
8	Rahasia	Informasi terlindungi	Penyimpanan aman
9	Efisien	Tidak berlebihan	Ringkasan data

Sumber : Arens et al., (2020)

4. Jenis dan Isi Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi utama dalam audit yang berisi seluruh bukti, prosedur, dan kesimpulan auditor. Untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan, kertas kerja diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis serta memiliki isi (*content*) yang standar sesuai ketentuan profesional. Menurut Arens et al., (2020), dokumentasi audit mencakup: *records of the procedures performed, evidence obtained, and conclusions reached by the auditor*.

Jenis kertas kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan :

- a. Berdasarkan periode penggunaannya:
 - *Permanent file* (file permanen); kertas kerja yang berisi informasi yang berguna untuk audit lebih dari satu periode. Isi umum dalam file permanen:
 - Akta pendirian perusahaan
 - Struktur organisasi
 - Kebijakan akuntansi
 - Perjanjian penting
 - *Current file* (file tahun berjalan); kertas kerja yang berkaitan dengan audit periode tertentu. Isi umum dalam file tahun berjalan:

- Program audit
 - Bukti audit
 - Kertas kerja pengujian
 - Laporan audit
- b. Berdasarkan fungsi audit:
- Program audit (*audit program*); daftar prosedur audit yang akan dilakukan. Contoh daftar prosedur audit:
 - Pengujian kas
 - Konfirmasi piutang
 - *Working trial balance*; neraca saldo yang telah disesuaikan oleh auditor. Contoh neraca saldo dalam tabel:

Tabel 7.6. Working Trial Balance

Akun	Saldo Klien	Penyesuaian	Saldo Audit
Kas	50.000.000	(1.500.000)	48.500.000

Sumber : Arens, Elder, & Beasley (2020)

- *Supporting schedule*; rincian dari akun tertentu. Contoh dari *supporting schedule*:
 - Rincian piutang per pelanggan
 - Rincian persediaan
 - *Adjusting Entries*; jurnal penyesuaian yang dibuat auditor. Contoh dari *adjusting entries*:
 - Koreksi pencatatan beban
 - Penyesuaian penyusutan
 - *Analytical working papers*; kertas kerja yang berisi analisis rasio atau tren. Contoh dari *Analytical working papers*:
 - Analisis gross profit margin
 - Perbandingan tahun sebelumnya
 - *Lead schedule* (ikhtisar utama); ringkasan akun utama yang menghubungkan trial balance dengan rincian.
- Kertas kerja pemeriksaan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti periode penggunaan, fungsi, dan teknik audit yang digunakan. Berikut ringkasannya:

Tabel 7.7. Periode Penggunaan

Jenis	Penjelasan	Contoh
<i>Permanent File</i>	Digunakan untuk beberapa periode	Akta pendirian, kebijakan akuntansi
<i>Current File</i>	Digunakan untuk periode berjalan	Kertas kerja audit tahun berjalan

Tabel 7.8. Berdasarkan Fungsi

Jenis	Penjelasan	Contoh
<i>Program Audit</i>	Rencana prosedur audit	Audit plan
<i>Working Trial balance</i>	Neraca saldo audit	Trial balance
<i>Supporting Schedule</i>	Rincian akun	Rincian piutang
<i>Adjust Entries</i>	Jurnal penyesuaian	Koreksi beban
<i>Lead Schedule</i>	Ringkasan akun utama	Ikhtisar kas
<i>Analytical Working Paper</i>	Analisis data	Rasio keuangan

Tabel 7.9. Berdasarkan Teknik Audit

Jenis	Penjelasan	Contoh
Kertas Kerja Inspeksi	Pemeriksaan dokumen	Faktur
Kertas Kerja Observasi	Pengamatan langsung	Stock opname
Kertas Kerja Konfirmasi	Pihak ketiga	Konfirmasi bank
Kertas Kerja Analitis	Analisis hubungan data	Tren laba
Kertas Kerja Inquiry	Tanya jawab	Wawancara manajemen

Sumber : Mulyadi (2017)

Isi Kertas Kerja Pemeriksaan, menurut ISA 230 (IAASB, 2019), isi kertas kerja harus memungkinkan auditor memahami proses audit secara menyeluruh. Adapaun isi kertas kerja pemeriksaan adalah:

- a. Elemen Utama Isi Kertas Kerja
 - Identitas Kertas Kerja:
 - Nama klien
 - Periode audit
 - Judul kertas kerja
 - Indeks/kode
- b. Tujuan Audit; menjelaskan tujuan dari prosedur yang dilakukan. Contoh: untuk memastikan saldo kas wajar.
- c. Prosedur Audit; langkah-langkah audit yang dilakukan. Contoh:
 - Rekonsiliasi bank
 - Konfirmasi saldo
- d. Bukti Audit; data atau informasi yang diperoleh. Contoh:
 - Rekening koran
 - Faktur
 - Konfirmasi pihak ketiga
- e. Hasil Pengujian; temuan dari prosedur audit.
- f. Kesimpulan Auditor; penilaian akhir atas akun yang diperiksa.

- g. Tanda Tangan dan Review, yang melakukan tanda tangan dan review adalah auditor pelaksana dan supervisor.

D. Penyusunan dan Teknik Dokumentasi Audit

Dalam disiplin ilmu auditing, dokumentasi audit merupakan elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari proses pemeriksaan. Dokumentasi audit mencerminkan seluruh aktivitas auditor dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyimpulkan bukti audit. Secara teoritis, dokumentasi audit berakar pada konsep akuntabilitas profesional, yaitu kewajiban auditor untuk mempertanggungjawabkan setiap prosedur yang dilakukan. Secara teori, dokumentasi audit juga berkaitan erat dengan:

- a. Teori bukti audit (*audit evidence theory*)
- b. Teori pengendalian internal (*internal control theory*)
- c. Teori kualitas audit (*audit quality theory*)

Penyusunan dan teknik dokumentasi audit merupakan elemen penting dalam proses audit yang dapat mendukung kualitas audit secara keseluruhan. Adapun dalam penyusunan dan teknik dokumentasi audit sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumentasi audit
 - Teori kepatuhan terhadap standar (*Compliance Theory*); penyusunan dokumentasi audit harus mengacu pada standar profesional seperti:
 - ISA 230 (*Audit Documentation*)
 - SPAP (Standard Profesional Akuntan Publik)
 - Teori akuntabilitas; dokumentasi audit merupakan bentuk pertanggungjawaban auditor terhadap:
 - Klien
 - Regulator
 - Pengguna laporan keuangan
 - Teori *evidence-based auditing*; teori ini menekankan bahwa seluruh opini auditor harus didasarkan pada bukti yang cukup dan kompeten (*sufficient and appropriate audit evidence*). Dokumentasi audit menjadi:
 - Media penyimpanan bukti
 - Dasar evaluasi kesimpulan audit
 - Teori efisiensi dan efektivitas; dalam persepektif ini, penyusunan dokumentasi audit harus:
 - Efisien (tidak berlebihan)
 - Efektif (mencakup hal penting)

b. Teknik dokumentasi audit; teknik dokumentasi audit merupakan metode yang digunakan auditor untuk menyusun dan menyajikan informasi audit secara sistematis, dokumentasi audit merupakan bentuk pertanggungjawaban auditor terhadap:

- Teori simbolisasi (*Tick Mark Theory*); penggunaan simbol atau tanda bertujuan untuk:
 - Menyederhanakan dokumentasi
 - Mempercepat proses audit
 - Menghindari pengulangan penjelasan
- Teori keterkaitan informasi (*Cross Referencing Theory*); teori ini menjelaskan bahwa dokumentasi audit harus saling terhubung agar:
 - Memudahkan penelusuran bukti
 - Menghindari inkonsistensi data
- Teori pengkodean (*Indexing Theory*); bertujuan untuk:
 - Mengorganisasi dokumen audit
 - Mempermudah pencarian data
 - Meningkatkan efisiensi review
- Teori naratif (*Narrative Theory*); dalam teknik ini, auditor menjelaskan sisten atau proses dalam bentuk deskriptif.
- Teori visulalisasi (*Flowchart Theory*); flowchart digunakan untuk menggambarkan:
 - Sistem pengendalian internal
 - Alur transaksi
- Teori digitalisasi audit; dalam perkembangan modern, dokumentasi audit beralih ke sistem digital, dengan konsep utama:
 - *Paperless audit*
 - *Realtime documentation*
 - *Cloud-based audit system*

Secara teoritis, penyusunan dan teknik dokumentasi audit merupakan kombinasi antara prinsip kepatuhan standar, akuntabilitas, dan efisiensi. Dokumentasi audit tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi sebagai alat utama dalam membangun kredibilitas dan kualitas hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and Assurance Services*. Pearson.
- IAASB. (2019). *International Standard on Auditing (ISA) 230: Audit Documentation*.
- IAASB. (2019). *ISA 500: Audit Evidence*.
- IAASB. (2019). *ISA 230: Audit Documentation*.
- IAPI. (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*.
- IAPI. (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*.
- Koerniawan, I. (2021). *Auditing "Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi"*. Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing & Assurance Services*. McGraw-Hill
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiadi. (2019). *Pemeriksaan Akuntansi*. Benny Pustaka. Yogyakarta

TENTANG PENULIS



Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.Ftax

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 01 Januari 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Selain menjadi dosen, penulis aktif menjadi pembicara, menulis jurnal dan/atau artikel, kegiatan pengabdian masyarakat dan organisasi kompetensi pada bidang akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia, Persatuan Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Asosiasi Dosen Vokasi).

Penulis termotivasi untuk menulis karena penulis ingin berkontribusi dan aktif berbagi ilmu dan pengetahuan kepada pembaca dan sebagainya. Sejumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan di antaranya: Bunga Rampai “Kebijakan Perpajakan di Indonesia”, Sistem Informasi Akuntansi – Teori dan Aplikasi, Akuntansi Biaya, dan Pengenalan Akuntansi Untuk Pebisnis (Penerbit Media Sains Indonesia Bandung dan eureka media aksara Purbalingga). Untuk kontak informasi ke email : dedy.suryadi@ubmg.ac.id

BAB 8



PERENCANAAN AUDIT BERBASIS RISIKO DAN MATERIALITAS

Nanda Putra Saragi, S.Ak., M.Si.
Universitas Pelita Harapan

A. Pendahuluan

Proses perencanaan audit merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses audit. Perencanaan yang dilakukan secara matang akan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan audit. Selain itu, perencanaan audit yang baik juga menjadi faktor utama dalam memperoleh bukti audit yang memadai dan kompeten sebagai dasar penyusunan laporan audit (Suwanda and Rusdia, 2023). Dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, auditor juga berperan untuk melaksanakan perencanaan audit dengan strategi audit secara keseluruhan. Tujuan utama audit adalah memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sesuai dengan Standar Audit 300, perencanaan audit yang efektif dan efisien memberikan manfaat bagi audit, diantaranya :

- a. Memberikan panduan bagi auditor untuk memusatkan perhatian pada area yang memiliki tingkat signifikansi tertinggi dalam pelaksanaan audit.

- b. Memfasilitasi auditor dalam mengidentifikasi serta merespons potensi permasalahan sejak dini sehingga dapat ditangani secara tepat waktu.
- c. Membantu auditor dalam merencanakan dan mengoordinasikan perikatan audit secara terstruktur agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Mendukung penentuan komposisi tim audit yang memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan dengan tingkat risiko yang dihadapi, sekaligus menetapkan pembagian tanggung jawab yang sesuai.
- e. Memberikan wadah dalam memberikan panduan dan juga supervisi kepada pihak-pihak perikatan yang terlibat, kemudian memberikan waktu untuk menelaah hasil yang dikerjakan.
- f. Memberikan dukungan, apabila diperlukan, dalam mengoordinasikan hasil dari penilaian dan audit yang dilakukan auditor kepada partner ataupun tenaga ahli.

Dalam praktik modern, audit dilakukan dengan pendekatan risk-based audit atau audit berbasis risiko. Pendekatan ini menekankan bahwa auditor harus memfokuskan prosedur audit pada area yang memiliki risiko kemungkinan kesalahan penyajian material yang paling tinggi.

Selain risiko, auditor juga harus mempertimbangkan konsep materialitas. Materialitas membantu auditor menentukan tingkat kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Standar audit di Indonesia yang berkaitan dengan topik ini antara lain:

- a. SA 300 – Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan
- b. SA 315 – Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material
- c. SA 320 – Materialitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
- d. SA 330 – Respons Auditor terhadap Risiko yang Dinilai
- e. SA 220 – Manajemen Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan
- f. SA 230 – Dokumentasi Audit (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2025b)

B. Perencanaan Audit Berbasis Risiko

1. Pengertian Perencanaan Audit Berbasis Risiko

Perencanaan audit berbasis risiko adalah proses dimana auditor melakukan pengidentifikasian dan mengasesmen risiko terhadap salah satu material di laporan keuangan dan mendesain prosedur audit. Dalam Standar Audit 315 (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2025c) tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko

Kesalahan Penyajian Material, Risiko pada tingkat laporan keuangan berkaitan secara menyeluruh dengan laporan keuangan dan dapat memengaruhi banyak asersi. Risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi terdiri atas dua komponen utama, yaitu risiko inheren dan risiko pengendalian.

- a. Risiko inheren adalah tingkat kerentanan yang melekat pada suatu asersi yang berkaitan dengan kelompok transaksi, saldo akun, maupun pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap kemungkinan terjadinya salah saji material. Risiko ini dapat muncul baik secara individual maupun secara kumulatif bersama salah saji lainnya, sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas. (Murifal *et al.*, 2021).
- b. Risiko pengendalian merujuk pada kemungkinan bahwa salah saji yang berkaitan dengan suatu asersi atas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dalam laporan keuangan—yang berpotensi bersifat material, baik secara individual maupun secara kumulatif—tidak berhasil dicegah, diidentifikasi, ataupun dikoreksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas. Pendekatan berbasis risiko ini memberikan beberapa manfaat, yaitu:
 - meningkatkan efisiensi audit
 - memfokuskan audit pada area yang signifikan
 - mengurangi kemungkinan auditor gagal menemukan kesalahan material

Konsep ini dijelaskan terutama dalam SA 300 dan SA 315.

2. Strategi Audit

Strategi audit merupakan pendekatan umum yang digunakan auditor untuk melaksanakan audit. Strategi ini menentukan arah audit serta menjadi dasar bagi penyusunan rencana audit yang lebih rinci.

Strategi audit mencakup:

- a. ruang lingkup audit
- b. waktu pelaksanaan audit
- c. arah atau fokus audit
- d. panduan pengembangan rencana audit

Dalam SA 300, auditor diwajibkan menetapkan strategi audit secara keseluruhan sebelum menyusun rencana audit yang lebih rinci.

Contoh Strategi Audit

Misalnya auditor mengaudit perusahaan manufaktur dengan karakteristik :

- a. nilai persediaan sangat besar
- b. transaksi pembelian bahan baku sangat banyak
- c. pengendalian internal belum kuat

Strategi audit dapat berupa:

- a. fokus pada persediaan dan pembelian
- b. turut hadir pada proses stock opname
- c. melakukan pengujian harga pokok penjualan

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit yang direncanakan mencakup komponen-komponen yang diperkirakan akan menjadi tempat pelaksanaan prosedur audit dalam rangka audit grup, serta sejauh mana keterlibatan auditor komponen dalam proses tersebut. Sesuai dengan SA 300 tentang Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan, penentuan ruang lingkup audit merupakan bagian penting dari penyusunan strategi audit secara keseluruhan (overall audit strategy). Penetapan ruang lingkup ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti karakteristik perikatan, tujuan pelaporan, serta faktor-faktor signifikan yang dapat memengaruhi fokus dan arah pelaksanaan audit. Dengan menetapkan ruang lingkup secara tepat, auditor dapat merencanakan prosedur audit yang memadai sehingga audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa contoh ruang lingkup audit sebagai berikut :

- a. audit laporan keuangan konsolidasi
- b. audit laporan keuangan entitas tunggal
- c. audit pada beberapa cabang perusahaan

Waktu Pelaksanaan Audit

Waktu pelaksanaan audit merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan audit yang berkaitan dengan penentuan jadwal dan tahapan pelaksanaan prosedur audit. Auditor perlu mempertimbangkan waktu pelaksanaan berbagai prosedur audit agar pekerjaan audit dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu. Penentuan waktu ini mencakup kapan prosedur audit akan dilakukan, seperti prosedur pada tahap interim maupun pada akhir periode pelaporan. Selain itu, auditor juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan informasi keuangan, kompleksitas transaksi, serta kebutuhan koordinasi dengan manajemen dan pihak lain yang terlibat dalam proses audit. Dengan perencanaan waktu yang tepat, auditor dapat

mengalokasikan sumber daya secara efisien serta memastikan bahwa seluruh prosedur audit yang diperlukan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku., misalnya:

- a. interim audit (audit sebelum akhir tahun)
- b. final audit (audit setelah laporan keuangan selesai)

Dalam koordinasinya, kepala tim audit perlu mengevaluasi apakah suatu penugasan konsultasi yang diajukan layak diterima dengan melihat sejauh mana penugasan tersebut dapat memperbaiki manajemen risiko, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan kinerja operasional organisasi. Jika penugasan tersebut disetujui, maka harus dimasukkan ke dalam rencana kerja audit (Pickett, 2010).

Arah Audit

Arah audit mengacu pada penentuan fokus utama auditor dalam pelaksanaan audit berdasarkan risiko dan area yang dianggap signifikan. Auditor perlu menetapkan arah audit sebagai bagian dari strategi audit secara keseluruhan agar prosedur audit dapat difokuskan pada area yang memiliki risiko salah saji material yang lebih tinggi. Penetapan arah audit mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hasil penilaian risiko, kompleksitas transaksi, perubahan dalam lingkungan bisnis entitas, serta pertimbangan profesional auditor. Dengan menentukan arah audit secara tepat, auditor dapat memprioritaskan area-area yang memerlukan perhatian lebih besar, sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Contoh, jika perusahaan memiliki nilai persediaan yang besar, auditor akan memberikan perhatian khusus pada akun persediaan.

3. Pengembangan Rencana Audit Berbasis Strategi

Rencana audit merupakan pengembangan rinci dari strategi audit. Rencana audit memuat prosedur audit yang akan dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika strategi audit menjelaskan arah audit secara umum, maka rencana audit menjelaskan langkah - langkah audit secara detail. Adapun komponen rencana audit, bisa terdiri atas langkah - langkah berikut :

- a. Prosedur Penilaian Risiko

Prosedur ini dilakukan untuk memahami entitas dan lingkungannya.

Contoh:

- wawancara dengan manajemen
- analisis laporan keuangan
- observasi proses bisnis

Standar terkait: SA 315

b. Pengujian Pengendalian (Test of Control)

Pengujian ini dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan.

Contoh:

Auditor memeriksa apakah setiap transaksi pembelian harus mendapat persetujuan manajer pembelian.

Standar terkait: SA 330

c. Prosedur Substantif

Prosedur substantif bertujuan mendeteksi kesalahan penyajian material.

Jenis prosedur substantif:

- pengujian rincian transaksi
- prosedur analitis

Contoh:

- konfirmasi piutang
- pengujian kas
- analisis rasio keuangan

d. Perubahan Selama Audit Dilaksanakan

Selama proses audit berlangsung, auditor dapat menemukan kondisi baru yang memerlukan perubahan rencana audit.

Contoh perubahan:

- ditemukan kesalahan yang signifikan
- risiko baru muncul
- perubahan sistem akuntansi klien

Auditor harus menyesuaikan rencana audit agar prosedur audit tetap efektif.

Standar terkait : SA 300, SA 315

4. Pengawasan dan Peninjauan (Reviu)

Pengawasan merupakan proses dimana pekerjaan auditor diperiksa oleh auditor yang lebih senior untuk memastikan bahwa audit dilakukan sesuai standar audit. Rekan perikatan menggunakan pertimbangan profesional dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan pertimbangan signifikan oleh tim perikatan. Kebijakan atau prosedur KAP dapat menguraikan hal-hal tertentu yang umumnya diharapkan menjadi pertimbangan signifikan. Pertimbangan signifikan yang berkaitan dengan

perikatan audit dapat mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan strategi audit secara keseluruhan serta rencana audit dalam pelaksanaan perikatan, proses pelaksanaan perikatan itu sendiri, dan kesimpulan keseluruhan yang dihasilkan oleh tim perikatan (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2025a).

Struktur tim audit biasanya terdiri dari:

- a. junior auditor
- b. senior auditor
- c. manajer audit
- d. partner audit

Standar terkait: SA 220

Proses Dokumentasi

Dokumentasi audit merupakan pencatatan prosedur audit, bukti audit, dan kesimpulan audit. Dokumentasi audit sering disebut sebagai kertas kerja audit. Tujuan dokumentasi audit:

- a. mendukung opini auditor
- b. memfasilitasi supervisi
- c. menjadi bukti audit

Standar terkait: SA 230

C. Penilaian Risiko dan Materialitas Audit

1. Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko bahwa auditor memberikan opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material.

Risiko audit terdiri dari:

- a. risiko inheren
- b. risiko pengendalian
- c. risiko deteksi

Standar terkait: SA 315

2. Diagram Model Risiko Audit

Model risiko audit dapat digambarkan sebagai berikut :

$$AR = IR \times CR \times DR$$

Dimana :

IR= Inherent Risk

CR= Control Risk

DR= Detection Risk (Tjiptono, 2021).

Dari audit risk model diatas dapat diartikan bahwa risiko audit dipengaruhi oleh kombinasi tiga jenis risiko tersebut. Semakin tinggi risiko inheren dan risiko pengendalian, maka auditor harus menurunkan risiko deteksi dengan meningkatkan prosedur audit.

3. Materialitas Audit

Auditor perlu menetapkan tingkat materialitas pada tahap awal untuk keseluruhan laporan keuangan, karena opini yang diberikan auditor berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. (Koerniawan, 2021). Penentuan materialitas dilakukan dengan mengacu pada SA 320 dan apabila diperlukan, meliputi :

- a. Penetapan materialitas pelaksanaan untuk setiap komponen serta komunikasi dengan auditor komponen yang terkait sesuai dengan ketentuan SA 600.
- b. Penentuan ekspektasi awal terkait jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang diperkirakan memiliki signifikansi (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2025d).

Materialitas digunakan auditor untuk menentukan ruang lingkup audit, jumlah sampel audit, jenis prosedur audit. Auditor biasanya menentukan materialitas berdasarkan persentase tertentu dari ukuran keuangan seperti laba sebelum pajak, total aset, pendapatan.

Menentukan Materialitas untuk Audit Laporan Keuangan

Materialitas laporan keuangan merupakan batas kesalahan yang dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan.

Contoh:

Laba sebelum pajak adalah Rp20.000.000.000,-, jika auditor menggunakan tingkat materialitas 5% maka, materialitasnya adalah Rp1.000.000.000,-. Kesalahan di bawah nilai tersebut biasanya dianggap tidak material.

Standar terkait: SA 320

Menentukan Materialitas untuk Transaksi dan Akun Laporan Keuangan

Auditor juga dapat menentukan materialitas khusus untuk akun tertentu. Sebagai contoh, materialitas laporan keuangan secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,-. Namun, auditor dapat menetapkan tingkat materialitas yang lebih rendah untuk akun-akun tertentu yang memiliki risiko lebih tinggi. Misalnya, materialitas untuk akun persediaan ditetapkan sebesar

Rp500.000.000, untuk piutang sebesar Rp400.000.000, dan untuk kas sebesar Rp300.000.000. Penetapan materialitas yang berbeda ini dilakukan karena akun-akun tersebut dianggap memiliki tingkat risiko salah saji yang lebih tinggi sehingga memerlukan perhatian audit yang lebih besar.

Standar terkait : SA 320, SA 315

D. Hubungan Standar Audit dalam Perencanaan Audit

Beberapa standar audit mengatur tahapan penting dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan, penilaian risiko, penentuan materialitas, respons auditor, hingga pengendalian mutu dan dokumentasi. Ringkasan standar audit tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hubungan Standar Audit dalam Perencanaan Audit

Standar Audit	Topik	Fungsi
SA 300	Perencanaan audit	Mengatur strategi dan rencana audit
SA 315	Penilaian risiko	Mengidentifikasi risiko kesalahan material
SA 320	Materialitas	Menentukan tingkat materialitas
SA 330	Respons auditor	Menentukan prosedur audit untuk merespons risiko
SA 220	Pengendalian mutu	Mengatur supervisi tim audit
SA 230	Dokumentasi	Mengatur kertas kerja audit

Sumber : Penulis (2026)

1. Contoh Kasus Audit

Kasus Audit Perusahaan Dagang

Suatu perusahaan dagang memiliki informasi keuangan sebagai berikut:

- a. Total aset : Rp150.000.000.000
- b. Laba sebelum pajak : Rp15.000.000.000
- c. Nilai persediaan : Rp40.000.000.000

Auditor menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan berdasarkan 5% dari laba sebelum pajak. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Materialitas} = 5\% \times \text{Rp15.000.000.000}$$

$$\text{Materialitas} = \text{Rp750.000.000,-}$$

Dengan demikian, materialitas laporan keuangan secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp750.000.000. Namun, karena

akun persediaan memiliki nilai yang signifikan dan berpotensi memiliki risiko salah saji yang lebih tinggi, auditor menetapkan materialitas khusus (*specific materiality*) untuk akun persediaan sebesar Rp400.000.000,-. Penetapan materialitas yang lebih rendah pada akun tertentu bertujuan agar auditor memberikan perhatian yang lebih besar pada akun tersebut selama pelaksanaan prosedur audit. Strategi audit yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut:

- a. fokus pada persediaan
- b. menghadiri stock opname
- c. melakukan pengujian harga pokok

E. Ringkasan Bab

Bab ini menjelaskan bahwa perencanaan audit merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses audit laporan keuangan karena menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan arah dan ruang lingkup pemeriksaan. Perencanaan audit yang disusun secara memadai memungkinkan auditor menjalankan proses pemeriksaan secara efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada standar audit yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam praktik audit kontemporer, pelaksanaan audit umumnya menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pentingnya bagi auditor untuk terlebih dahulu mengidentifikasi serta mengevaluasi potensi risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebelum menentukan jenis dan lingkup prosedur audit yang akan diterapkan. Risiko tersebut dapat berasal dari risiko inheren yang berkaitan dengan karakteristik transaksi atau akun tertentu serta risiko pengendalian yang berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang mencakup penentuan ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit, serta arah atau fokus audit sehingga proses pemeriksaan dapat diarahkan pada area yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Selain penilaian risiko, auditor juga harus mempertimbangkan konsep materialitas dalam perencanaan audit. Materialitas digunakan untuk menentukan batas kesalahan yang dianggap signifikan bagi pengguna laporan keuangan serta membantu auditor dalam menentukan ruang lingkup audit, jumlah sampel yang akan diuji, dan jenis prosedur audit yang diperlukan. Penentuan materialitas biasanya didasarkan pada ukuran keuangan tertentu seperti laba sebelum pajak, total aset, atau pendapatan perusahaan. Hubungan antara risiko audit dan materialitas menjadi dasar dalam menentukan intensitas prosedur

audit, dimana akun atau transaksi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi biasanya akan diberikan tingkat materialitas yang lebih rendah agar auditor dapat melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Dengan menggabungkan pendekatan perencanaan audit berbasis risiko, strategi audit, dan penetapan materialitas, auditor dapat merancang rencana audit yang sistematis, memfokuskan pemeriksaan pada area yang paling signifikan, serta memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

JAWABARA

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2025a) "Standar Profesional Akuntan Publik - Standar Audit 220," in *Standar Profesional Akuntan Publik - Standar Audit 320*. Available at: <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2025b) "Standar Profesional Akuntan Publik - Standar Audit 300," in Ikatan Akuntan Publik Indonesia (ed.) *Standar Audit 300*. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Available at: <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2025c) "Standar Profesional Akuntan Publik - Standar Audit 315," in Ikatan Akuntan Publik Indonesia (ed.) *Standar Audit 315*. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Available at: <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2025d) "Standar Profesional Akuntan Publik - Standar Audit 320," in *Standar Profesional Akuntan Publik - Standar Audit 320*. Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Available at: <https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>.
- Koerniawan, I. (2021) *Akuntansi (Konsep Teori Pemeriksaan Akuntansi)*.
- Murifal, B. et al. (2021) "Pemeriksaan Akuntansi : Teori dan Kasus," *Expert*, p. 240.
- Pickett, K.H.S. (2010) *The Internal Auditing Handbook*. Edited by K.H.S. Pickett. Chichester, United Kingdom: A John Wiley and Sons, Ltd.
- Suwanda, D. and Rusdia, U. (2023) "Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan," p. 123.

TENTANG PENULIS



Nanda Putra Saragi, S.Ak., M.Si.

Universitas Pelita Harapan

Penulis lahir di Medan pada tahun 1995. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di Universitas Pelita Harapan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Medan Area dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Sebelum meniti karier sebagai akademisi, penulis memiliki pengalaman profesional di dunia industri. Penulis pernah berkarier sebagai staf pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Taspen (Persero) sejak tahun 2014 hingga 2024, posisi terakhir pada Divisi Akuntansi Kantor Pusat Jakarta, dan juga seorang Tutor di Program Studi Akuntansi Keuangan Publik di Universitas Terbuka. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman praktis yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi, sistem pelaporan keuangan.

Berbekal latar belakang akademik dan pengalaman profesional di sektor industri, penulis berkomitmen menjembatani teori akuntansi di lingkungan akademik dengan praktik di dunia industri. Melalui karya tulis ini, penulis berupaya menghadirkan literatur akuntansi yang tidak hanya konseptual tetapi juga aplikatif, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Korespondensi dengan penulis dapat disampaikan melalui email nanda.saragi@uph.edu

JANVARA



BAB 9

AUDIT KAS DAN SETARA KAS

RR. Prima Dita Hapsari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Utpadaka Swastika

A. Pendahuluan

Audit kas dan setara kas merupakan titik kritis dalam setiap proses audit karena sifat aset ini yang sangat likuid, mudah dipindahtangankan, dan memiliki frekuensi transaksi yang masif. Secara teoretis, kas dianggap sebagai "muara" dari seluruh siklus akuntansi; hampir setiap transaksi dalam siklus pendapatan, pengeluaran, hingga pendanaan pada akhirnya akan memengaruhi saldo kas. Oleh karena itu, auditor tidak hanya melihat angka nominal di neraca, tetapi juga menggunakannya sebagai indikator untuk menilai integritas sistem pengendalian internal perusahaan secara keseluruhan, mengingat risiko bawaan (*inherent risk*) seperti pencurian atau manipulasi (*fraud*) pada akun ini sangatlah tinggi.

Dalam konteks audit, cakupan kas melampaui uang tunai di brankas (*cash on hand*), mencakup saldo bank yang tidak dibatasi penggunaannya serta setara kas berupa investasi jangka pendek yang sangat likuid (jatuh tempo ≤ 3 bulan). Auditor memikul tanggung jawab besar untuk memastikan asersi keberadaan dan kelengkapan terpenuhi, guna menghindari praktik manipulasi seperti lapping atau kiting. Di era digital saat ini, tantangan audit semakin kompleks dengan adanya transaksi elektronik dan *e-wallet*, yang menuntut

auditor untuk beralih dari sekadar pemeriksaan fisik ke pengujian keandalan sistem teknologi informasi dan rekonsiliasi data pihak ketiga secara presisi (Sangkala, 2022).

B. Definisi Kas dan Setara Kas

Dalam konteks audit dan akuntansi (berdasarkan PSAK 2 atau IAS 7), definisi Kas dan Setara Kas harus dipahami secara spesifik karena menentukan ketepatan penyajian di Laporan Posisi Keuangan.

1. Kas (*Cash*)

Kas adalah aset keuangan yang paling likuid, yang terdiri dari uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat ditarik setiap saat tanpa penalti atau batasan.

- a. Kas di Tangan (*Cash on Hand*): Meliputi uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, dan money orders.
- b. Kas di Bank (*Cash in Bank*): Saldo rekening koran (*demand deposits*) atau tabungan yang tersedia untuk digunakan sewaktu-waktu guna membiayai kegiatan operasional perusahaan.

2. Setara Kas (*Cash Equivalents*)

Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dapat segera dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Suatu investasi biasanya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Jatuh Tempo Singkat: Mempunyai masa jatuh tempo yang sangat pendek, biasanya 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b. Sangat Likuid: Dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat.
- c. Risiko Rendah: Tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga yang dapat mengubah nilainya secara drastis.

C. Sifat dan Contoh Kas/Setara Kas

Pada bagian ini, kita akan membedah karakteristik unik dari kas dan setara kas yang membedakannya dari aset lainnya dalam audit, serta instrumen apa saja yang masuk dalam kategori ini menurut standar akuntansi.

1. Sifat Kas dan Setara Kas

Dalam audit, kas memiliki sifat-sifat fundamental yang menentukan pendekatan risiko yang diambil oleh auditor:

- a. Aset Paling Likuid: Kas adalah standar pertukaran dan dasar bagi pengukuran serta pelaporan semua pos lainnya. Likuiditasnya yang tinggi menjadikannya target utama pencurian atau penyalahgunaan.
- b. Media Pertukaran Universal: Hampir semua transaksi perusahaan (pembelian, penjualan, penggajian) pada akhirnya melibatkan kas. Oleh karena itu, kesalahan pada akun lain sering kali terdeteksi melalui pengujian kas.
- c. Risiko Bawaan Tinggi: Karena tidak memiliki identitas kepemilikan fisik (seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan), kas sangat rentan terhadap manipulasi seperti lapping (menunda pencatatan penerimaan) atau kiting (transfer antar-bank fiktif).
- d. Tidak Memberikan Laba Langsung: Kas yang menganggur (*idle cash*) tidak menghasilkan keuntungan, sehingga manajemen biasanya mengubahnya menjadi Setara Kas untuk mendapatkan imbal hasil kecil tanpa kehilangan likuiditas (Fisdiana & Wilasittha, 2025).

2. Contoh Kas (*Cash*)

Kas mencakup alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan segera untuk mendanai kegiatan operasional tanpa batasan hukum atau kontrak.

- a. Uang Tunai (*Cash on Hand*): Uang kertas dan logam yang tersimpan di brankas perusahaan atau di kasir (*petty cash*).
- b. Saldo Bank (*Cash in Bank*): Rekening koran atau tabungan di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu (*demand deposits*).
- c. Instrumen Pembayaran Lainnya: Cek tunai, cek kasir (*cashier's checks*), dan *certified checks* yang diterima dari pelanggan namun belum disetorkan ke bank.

3. Contoh Setara Kas (*Cash Equivalents*)

Menurut PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan.

- a. Persyaratan Utama: Harus memiliki jatuh tempo yang sangat pendek, biasanya 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan (bukan tanggal neraca).

- b. Instrumen yang termasuk:
- Deposito Berjangka: Jika jatuh temponya ≤ 3 bulan.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI): Instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan bank sentral.
 - *Commercial Paper*: Surat berharga komersial yang diterbitkan perusahaan dengan peringkat kredit tinggi.
 - *Treasury Bills (T-Bills)*: Surat utang pemerintah jangka pendek.

4. Item yang Sering Disalahartikan (Bukan Kas/Setara Kas)

Sebagai auditor, Anda harus memastikan item berikut dikeluarkan dari saldo kas dan setara kas:

- a. Kas yang Dibatasi (*Restricted Cash*): Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu (misalnya jaminan bank) yang tidak dapat digunakan secara bebas.
- b. Cek Mundur (*Post-dated Checks*): Dianggap sebagai piutang hingga tanggal yang tertera pada cek tersebut tiba.
- c. Prangko dan Materai: Dikategorikan sebagai perlengkapan kantor (*supplies*).
- d. I.O.U (Bon Sementara): Dikategorikan sebagai piutang karyawan.

D. Evaluasi Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Evaluasi pengendalian internal adalah tahap krusial dalam audit kas karena kas merupakan aset yang paling mudah diselewengkan. Auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu per satu, melainkan menguji apakah sistem yang dibuat perusahaan cukup kuat untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Berikut adalah komponen utama dalam evaluasi pengendalian internal kas:

1. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*)

Prinsip dasar pengendalian internal adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang mengendalikan transaksi kas dari awal hingga akhir. Auditor akan memeriksa apakah ada pemisahan antara:

- a. Fungsi Penyimpanan: Orang yang memegang fisik kas (kasir).
- b. Fungsi Pencatatan: Orang yang mencatat transaksi ke dalam buku besar (akuntan).
- c. Fungsi Otorisasi: Orang yang menyetujui pengeluaran kas (manajer/direktur).

- d. Fungsi Rekonsiliasi: Orang yang melakukan rekonsiliasi bank (idealnya pihak independen yang tidak memegang kas maupun mencatat transaksi harian).

2. Pengendalian atas Penerimaan Kas

Auditor mengevaluasi apakah seluruh kas yang diterima telah dicatat dan disetorkan secara utuh.

- a. Penyetoran Harian (*Intact Deposit*): Semua penerimaan kas (tunai/cek) harus segera disetorkan ke bank pada hari yang sama atau keesokan harinya untuk menghindari penggunaan uang tersebut secara tidak resmi.
- b. Daftar Pra-penerimaan: Adanya catatan awal saat surat atau pembayaran diterima sebelum masuk ke sistem akuntansi.

3. Pengendalian atas Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas lebih berisiko terhadap penyalahgunaan wewenang.

- a. Penggunaan Cek/Transfer Elektronik: Kecuali untuk kas kecil, semua pengeluaran harus menggunakan cek bernomor urut tercetak (*pre-numbered checks*) atau transfer bank yang terlacak.
- b. Penyajian Dokumen Pendukung: Cek hanya boleh ditandatangani jika disertai dokumen pendukung yang lengkap (*invoice*, laporan penerimaan barang, dan pesanan pembelian).
- c. Pencoretan Dokumen (*Voucher Cancellation*): Dokumen pendukung harus dicap "LUNAS" setelah dibayar agar tidak digunakan kembali untuk pembayaran ganda.

4. Rekonsiliasi Bank Independen

Rekonsiliasi bank adalah alat kontrol paling efektif. Auditor memastikan bahwa:

- a. Rekonsiliasi dilakukan setiap bulan.
- b. Dilakukan oleh karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab atas penanganan atau pencatatan kas.
- c. Selisih yang ditemukan (seperti biaya admin atau kesalahan catat) segera ditindaklanjuti dengan jurnal penyesuaian.

5. Pengelolaan Kas Kecil (*Petty Cash*)

Jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap (*Imprest Fund System*), auditor akan melihat apakah:

- a. Ada plafon tertentu untuk kas kecil.
- b. Setiap pengeluaran didukung oleh bukti pengeluaran kas kecil yang sah.

- c. Dilakukan penghitungan fisik secara mendadak oleh atasan kasir.

E. Tujuan dan Prosedur Audit (Audit Program)

Sub-bab ini merupakan inti dari kerja lapangan auditor. Audit Program kas dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa saldo kas yang disajikan di neraca adalah akurat, sah, dan lengkap.

Berikut adalah rincian Tujuan Audit (Asersi) dan Prosedur Audit yang dijalankan:

1. Tujuan Audit (Asersi Manajemen)

Sebelum melakukan prosedur, auditor harus menetapkan apa yang ingin dicapai:

- a. Keberadaan (*Existence*): Memastikan kas di bank dan kas di tangan benar-benar ada pada tanggal neraca.
- b. Kelengkapan (*Completeness*): Memastikan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat (tidak ada yang disembunyikan).
- c. Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligations*): Memastikan perusahaan memiliki hak hukum atas saldo kas tersebut (bukan milik pribadi atau pihak lain).
- d. Penilaian dan Alokasi (*Accuracy/Valuation*): Memastikan saldo kas telah dikonversi ke mata uang pelaporan dengan kurs yang benar dan dijumlahkan dengan akurat.

2. Prosedur Audit Utama (Uji Substantif)

Auditor melakukan langkah-langkah konkret berikut untuk menguji asersi di atas:

- a. Perhitungan Fisik Kas (*Cash Count*)
Auditor melakukan penghitungan fisik uang tunai di brankas (*Petty Cash dan Cash on Hand*).
 - Prosedur: Dilakukan secara mendadak (*surprise audit*) untuk mencegah manipulasi.
 - Dokumentasi: Hasil hitung fisik dibandingkan dengan saldo buku kas. Auditor harus memastikan semua kasir hadir dan semua kotak kas dihitung secara bersamaan untuk menghindari pemindahan dana antar-kasir.
- b. Konfirmasi Bank (*Bank Confirmation*)
Auditor mengirimkan surat konfirmasi langsung ke semua bank yang bekerja sama dengan klien.
Penting: Surat harus dikirim oleh auditor dan balasan harus diterima langsung oleh auditor (bukan melalui klien).

Tujuan: Memverifikasi saldo rekening koran, pinjaman bank, bunga, dan jaminan (agunan).

- c. **Pengujian Rekonsiliasi Bank**
Auditor tidak hanya melihat rekonsiliasi yang dibuat klien, tetapi menguji validitasnya:
 - *Deposit in Transit*: Memastikan setoran akhir tahun benar-benar muncul di rekening koran bulan berikutnya (Januari).
 - *Outstanding Checks*: Memastikan cek yang belum dicairkan adalah sah dan sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh klien (Famiyanti & Wilasittha, 2024).
- d. **Uji Pisah Batas (*Cut-off Test*)**
Auditor memeriksa transaksi beberapa hari sebelum dan sesudah 31 Desember. Tujuannya untuk memastikan penerimaan kas tahun depan tidak dicatat di tahun ini (*window dressing*) untuk mempercantik laporan keuangan.
- e. **Pemeriksaan Transfer Antar-Bank (*Interbank Transfer Schedule*)**
Prosedur ini dilakukan untuk mendeteksi *Kiting*, yaitu praktik memindahkan dana antar-rekening bank klien untuk menciptakan saldo ganda pada tanggal neraca. Auditor membandingkan tanggal pencatatan di buku dengan tanggal efektif di bank.

Ringkasan Prosedur dalam tabel:

Prosedur	Asersi Utama Yang Diuji
<i>Cash Count</i>	Keberadaan (<i>Existence</i>)
Konfirmasi Bank	Keberadaan, Hak, & Kewajiban
Rekonsiliasi Bank	Penilaian & Akurasi
<i>Cut-off Test</i>	Kelengkapan & Pisah Batas

F. Pemeriksaan Pembatasan Kas (*Restricted Cash*) dan Valuta Asing

Sub-bab ini sangat penting karena sering menjadi temuan audit terkait Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation & Disclosure*). Auditor harus memastikan bahwa kas yang dilaporkan benar-benar tersedia untuk operasional dan dinilai dengan kurs yang akurat.

1. Pemeriksaan Kas yang Dibatasi (*Restricted Cash*)

Tidak semua saldo di bank dapat dikategorikan sebagai "Kas dan Setara Kas" dalam aset lancar. Ada kalanya kas "terkunci" karena alasan hukum atau kontrak.

- a. **Identifikasi Pembatasan:** Auditor memeriksa perjanjian kredit (*loan agreement*) atau korespondensi bank untuk melihat

apakah ada syarat *Compensating Balance* (saldo minimum yang harus mengendap sebagai jaminan pinjaman).

- b. Dana Cadangan (*Sinking Funds*): Memastikan dana yang disisihkan untuk pelunasan utang jangka panjang atau ekspansi pabrik tidak digabung ke dalam kas operasional.
- c. Kas yang Disita/Dibekukan: Jika perusahaan sedang dalam sengketa hukum dan rekeningnya dibekukan, auditor harus mengeluarkan saldo tersebut dari aset lancar.
- d. Penyajian di Neraca:
 - Jika pembatasan < 12 bulan: Masuk ke Aset Lancar Lainnya.
 - Jika pembatasan > 12 bulan: Masuk ke Aset Tidak Lancar.

2. Pemeriksaan Kas dalam Valuta Asing

Perusahaan yang melakukan transaksi ekspor-impor biasanya memiliki rekening dalam mata uang asing (USD, EUR, JPY, dll.). Auditor memiliki dua fokus utama:

- a. Verifikasi Saldo Valas
Auditor mencocokkan saldo fisik valas (di bank atau brankas) dengan catatan buku pembantu valas. Konfirmasi bank akan mencantumkan saldo dalam mata uang aslinya (misal: \$10,000), bukan dalam Rupiah.
- b. Pengujian Kurs Konversi (*Valuation*)
Sesuai PSAK 10, saldo valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang pelaporan (Rupiah) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca (31 Desember).
 - Prosedur: Auditor mengambil data kurs resmi dari Bank Indonesia pada tanggal tutup buku dan menghitung ulang (*re-calculation*) nilai Rupiahnya.
 - Selisih Kurs: Auditor harus memastikan selisih antara kurs tanggal transaksi dengan kurs tanggal neraca diakui sebagai Laba/Rugi Selisih Kurs di laporan laba rugi periode berjalan.

3. Prosedur Audit Gabungan

Langkah Kerja	Tujuan Asersi
Meninjau notulen rapat direksi dan kontrak pinjaman.	Menemukan adanya kas yang dijadikan jaminan (<i>pledged cash</i>).
Memeriksa surat konfirmasi bank bagian "fasilitas kredit".	Mengidentifikasi pembatasan saldo rekening.
Melakukan check silang kurs BI pada tanggal 31 Desember.	Memastikan akurasi penilaian (<i>valuation</i>).

Memastikan adanya pengungkapan (<i>disclosure</i>) yang cukup di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Penyajian dan Pengungkapan.
--	-----------------------------

G. Deteksi Kecurangan Spesifik: *Lapping & Kiting*

Sub-bab terakhir ini membahas dua teknik kecurangan (*fraud*) klasik yang paling sering ditemui dalam audit kas. Karena kas tidak memiliki "identitas", pelaku kecurangan sering kali memanfaatkan celah waktu pencatatan untuk menyembunyikan pencurian uang.

1. *Lapping*: “Gali Lubang Tutup Lubang”

Lapping adalah skema kecurangan di mana seorang karyawan mencuri penerimaan kas dari pelanggan dan menutupi kekurangan tersebut dengan menggunakan penerimaan dari pelanggan lain di hari berikutnya.

Cara Kerja: Pelaku mengambil uang pembayaran dari Pelanggan A. Agar akun Pelanggan A tidak terlihat menunggak, pelaku menggunakan uang dari Pelanggan B untuk mengkredit akun Pelanggan A. Begitu seterusnya, menciptakan siklus penundaan pencatatan yang tak berujung (Pramesti & Azmiyanti, 2024).

Penyebab utama timbulnya *lapping* yaitu kurangnya pemisahan tugas antara orang yang menerima uang (kasir) dan orang yang mencatat piutang (akuntansi).

Prosedur Deteksi Auditor:

- Konfirmasi Piutang: Menanyakan langsung ke pelanggan kapan mereka membayar. Jika pelanggan mengaku sudah bayar sebulan lalu tapi di buku baru dicatat kemarin, itu indikasi kuat *lapping*.
- Analisis *Deposit Slips*: Membandingkan rincian cek/uang pada slip setoran bank dengan entri di buku pembantu piutang secara harian.

2. *Kiting*: “Menciptakan Saldo Fiktif”

Kiting adalah praktik manipulasi untuk menaikkan saldo kas di buku dengan memanfaatkan waktu kliring (*float time*) antar-rekening bank perusahaan.

Cara Kerja: Pelaku menulis cek dari Bank A ke Bank B pada akhir tahun (misal 31 Desember). Uang tersebut dicatat sebagai "setoran" di Bank B pada 31 Desember (menaikkan saldo Bank B), tetapi pengeluarannya baru dicatat di Bank A pada awal Januari

(saldo Bank A belum berkurang pada tanggal neraca). Hasilnya, uang yang sama muncul di dua bank sekaligus dalam laporan keuangan.

Tujuan: Menutupi defisit kas atau agar rasio likuiditas perusahaan terlihat lebih sehat di mata bank/investor.

Prosedur Deteksi Auditor:

- a. Jadwal Transfer Antarbank (*Interbank Transfer Schedule*): Auditor membuat tabel yang mencatat tanggal setoran dan tanggal pengeluaran untuk setiap transfer antar-rekening perusahaan.
- b. Pemeriksaan Tanggal Efektif: Memeriksa apakah tanggal pencatatan di buku pembantu sama dengan tanggal yang tertera di rekening koran bank (*bank statement*).

Perbandingan Lapping vs Kiting

Fitur	Lapping	Kiting
Objek	Melibatkan Piutang Usaha.	Melibatkan transfer antar-Bank.
Pelaku	Biasanya staf kasir atau piutang.	Biasanya manajemen atau bagian keuangan pusat.
Modus	Menunda pencatatan penerimaan.	Mempercepat pencatatan setoran (sambil menunda pengeluaran).
Alat Deteksi	Konfirmasi Piutang.	<i>Interbank Transfer Schedule</i> .

H. Ringkasan

Berikut adalah Ringkasan Eksekutif Bab 9: Audit Kas dan Setara Kas yang merangkum seluruh poin penting untuk tinjauan cepat:

1. Definisi dan Sifat Kas

- a. Kas: Aset paling likuid (uang tunai & saldo bank) yang tersedia segera untuk operasional.
- b. Setara Kas: Investasi jangka pendek, sangat likuid, jatuh tempo ≤ 3 bulan (contoh: Deposito jangka pendek, SBI).
- c. Karakteristik Risiko: Kas memiliki Inherent Risk (risiko bawaan) tertinggi karena mudah dicuri, dipindahtangankan, dan menjadi titik temu hampir semua siklus transaksi (pendapatan, pengeluaran, penggajian).

2. Pengendalian Internal (Kunci Keamanan)

Sistem yang kuat harus memiliki:

- a. Pemisahan Tugas: Pemegang fisik kas tidak boleh merangkap sebagai pencatat akuntansi atau pelaksana rekonsiliasi.

- b. Penyetoran Utuh (*Intact Deposit*): Semua penerimaan harian harus disetor ke bank pada hari yang sama.
- c. Otorisasi: Pengeluaran melalui cek/transfer harus disetujui pejabat berwenang dan didukung dokumen lengkap.
- d. Rekonsiliasi Bank: Dilakukan bulanan oleh pihak independen.

3. Prosedur Audit Utama

Auditor melakukan pengujian untuk memastikan asersi manajemen (Keberadaan, Kelengkapan, Penilaian):

- a. Konfirmasi Bank: Mengirim surat ke bank untuk verifikasi saldo, pinjaman, dan jaminan.
- b. *Cash Count*: Perhitungan fisik uang tunai di brankas secara mendadak.
- c. Uji Rekonsiliasi: Memeriksa validitas *Deposit in Transit* dan *Outstanding Checks*.
- d. *Cut-off Test*: Memastikan transaksi akhir tahun dicatat pada periode yang benar.

4. Isu Khusus dalam Audit

- a. *Restricted Cash*: Kas yang dibatasi penggunaannya (misal: jaminan utang) harus dipisahkan dari aset lancar dan diungkapkan di CALK.
- b. Valuta Asing: Harus dikonversi menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal neraca; selisihnya masuk ke Laba/Rugi Selisih Kurs.

5. Deteksi Kecurangan (*Fraud*)

Auditor harus waspada terhadap dua teknik manipulasi:

- a. *Lapping*: Menggunakan penerimaan kas pelanggan baru untuk menutupi pencurian kas dari pelanggan lama (skema gali lubang tutup lubang).
- b. *Kiting*: Memanfaatkan waktu kliring bank untuk menciptakan saldo fiktif di dua rekening bank pada tanggal neraca. Dideteksi dengan *Interbank Transfer Schedule*.

DAFTAR PUSTAKA

- Famiyanti, R., & Wilasittha, A. A. (2024). Tinjauan Atas Implementasi Prosedur Audit Kas Dan Setara Kas Pada Kantor Akuntan Publik Di Sidoarjo. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 127-138.
- Fisdiana, A. J., & Wilasittha, A. A. (2025). Audit kas dan setara kas: Evaluasi prosedur audit dan rekomendasi perbaikan sistem kas untuk perusahaan balai lelang. *Land Journal*, 6(2), 427-439.
- Pramesti, S. D., & Azmiyanti, R. (2024). Analisis prosedur audit kas dan setara kas pada PT ABC oleh KAP Buntaran & Lisawati. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 691-704.
- Sangkala, M. (2022). Tinjauan atas prosedur audit kas dan setara kas pada kantor akuntan publik di Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 344-350.

TENTANG PENULIS



RR. Prima Dita Hapsari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Utpadaka Swastika

Penulis lahir di Kopang, 09 Maret 1986. Lulus Pendidikan D3 Akuntansi di AA YKPN Yogyakarta 2009, Pendidikan S1 di STIE YKPN Yogyakarta 2010, Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta 2011, dan Magister Akuntansi di STIE Ykpn Yogyakarta 2013. Pengalaman kerja: PT. KONIMEX - Magang Internal Audit (2011) dan PT. Kencana Transport - Internal Audit (2013-2015). Karir Dosen dimulai

tahun 2013 menjadi dosen tetap di Universitas PGRI Yogyakarta. Dosen tetap dimulai tahun 2017 hingga 2023 di Program Studi Akuntansi STIE BISMA LEPI SI. Sejak 2023 hingga saat ini menjadi dosen tetap Program Studi Akuntansi Universitas Utpadaka Swastika. Sejak 2018 hingga 2023 sebagai Ketua Program Studi Akuntansi STIE BISMA LEPI SI. Sejak 2023 hingga 2025 menjadi Ketua Unit Penelitian Universitas Utpadaka Swastika. Sejak 2025 hingga saat ini menjadi Ketua LPPM Universitas Utpadaka Swastika.

JANVARA



BAB 10

AUDIT PIUTANG DAN PENDAPATAN

Wenny Anggeresia Ginting, M.Ak
Politeknik Negeri Manado

A. Pendahuluan

Audit siklus piutang dan pendapatan memegang peranan krusial dalam audit laporan keuangan, mengingat penjualan merupakan pilar utama penghasilan entitas. Proses ini dijalankan melalui dua metode utama yakni pengujian pengendalian (kepatuhan) dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem internal perusahaan dalam transaksi penjualan, yang hasilnya akan menentukan arah pengujian substantif. Fokus pengujian substantif sendiri adalah untuk memastikan kewajaran nilai serta kesesuaian penyajian transaksi berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (SAK). Oleh karena itu, instrumen audit yang digunakan pada kedua pendekatan ini dirancang secara spesifik sesuai tujuannya masing-masing.

Bab ini memaparkan serangkaian prosedur pemeriksaan yang dijalankan auditor dalam meninjau siklus pendapatan serta piutang. Perancangan prosedur yang terstruktur menjadi kunci utama dalam menjamin efektivitas proses audit. Selain itu perolehan bukti audit yang berkualitas dan relevan merupakan fondasi krusial bagi auditor untuk menghasilkan kesimpulan pemeriksaan yang tepat (Kieso, 2018).

B. Hubungan Piutang dan Pendapatan

Piutang dan pendapatan merupakan dua sisi dari koin yang sama. Dalam siklus akuntansi, piutang dan pendapatan berada dalam satu garis lurus yang disebut Siklus Penjualan dan Penagihan, Pendapatan diakui saat barang/jasa berpindah kendali kepada pelanggan dan Piutang muncul sebagai konsekuensi jika transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Karena adanya hubungan ini, kesalahan penyajian pada pendapatan hampir selalu berdampak langsung pada saldo piutang. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan tidak selalu diikuti dengan penerimaan kas secara langsung, karena sebagian transaksi masih tercatat sebagai piutang. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian terhadap kedua akun tersebut sangat diperlukan untuk memastikan penyajian yang wajar dalam laporan keuangan serta meminimalkan risiko audit. Dalam proses audit, auditor perlu memastikan bahwa pendapatan telah diakui secara tepat, piutang benar-benar ada, serta piutang tersebut dapat ditagih (Sulistia & Meidawati, 2024).

C. Tujuan Audit Utama Siklus Piutang dan Pendapatan

Kelompok Asersi	Tujuan audit terhadap Golongan Transaksi	Tujuan Audit terhadap Saldo Akun
Keberadaan atau keterjadian	Transaksi penjualan kredit dan tunai mencerminkan produk yang diserahkan kepada customer selama periode yang diaudit. Transaksi adjustment penjualan mencerminkan pengurangan penjualan karena retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang yang diotorisasi selama periode yang diaudit.	Piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh costumer yang ada pada tanggal neraca.
Kelengkapan	Semua transaksi penjualan dan adjustment terhadap penjualan yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat.	Piutang usaha mencakup semua klaim kepada costumer pada tanggal neraca.
Hak dan kewajiban	Entitas memiliki hak atas piutang usaha dan kas sebagai	Piutang usaha pada tanggal neraca mencerminkan klaim

	hasil dari transaksi dalam siklus pendapatan.	resmi entitas kepada costumer.
Penilaian atau alokasi	Semua transaksi penjualan dan adjustment penjualan telah dicatat dalam jurnal, diringkaskan, dan diposting ke dalam akun dengan benar.	Piutang usaha mencerminkan klaim yang baik pada tanggal neraca dan sesuai dengan jumlah buku pembantu piutang. Cadangan kerugian piutang mencerminkan estimasi yang masuk akal beda antara jumlah piutang bruto dengan nilai piutang usaha bersih yang dapat direalisasikan.
Penyajian dan pengungkapan	Rincian transaksi penjualan dan adjustment penjualan mendukung penyajian angka penjualan dan piutang usaha dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya.	Piutang usaha diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan piutang usaha yang digadaikan atau dianjakkan.

D. Konsep Audit Siklus Pendapatan

1. Definisi dan Sifat Siklus Pendapatan

Pendapatan merupakan peningkatan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Pendapatan biasanya menjadi komponen utama dalam menentukan laba perusahaan. Berdasarkan PSAK 72, Pendapatan adalah: "Penghasilan yang timbul dari aktivitas entitas yang biasa (disebut sebagai penjualan, imbalan, bunga, dividen, dan royalti) dan merujuk pada arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode yang timbul dalam rangka aktivitas normal entitas ketika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal."

2. Karakteristik dan Sumber Pendapatan

Berikut merupakan karakteristik dan sumber pendapatan menurut prinsip pengakuan pendapatan dalam PSAK 72

- a. **Timbul dari kegiatan operasional utama perusahaan**
Pendapatan berasal dari aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan barang pada perusahaan dagang atau pemberian jasa pada perusahaan jasa.
- b. **Menyebabkan peningkatan ekuitas**
Pendapatan menambah kekayaan bersih perusahaan karena meningkatkan laba yang pada akhirnya meningkatkan ekuitas.
- c. **Tidak berasal dari kontribusi pemilik**
Pendapatan bukan berasal dari setoran modal atau investasi pemilik, melainkan dari aktivitas bisnis perusahaan.
- d. **Dapat diukur secara andal**
Pendapatan harus memiliki nilai yang jelas dan dapat diukur secara objektif berdasarkan transaksi yang terjadi, seperti dari faktur atau kontrak penjualan.

3. Yang menjadi sumber pendapatan, berupa:

- a. **Penjualan Tunai**
Penjualan tunai merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan langsung secara tunai atau melalui kas/bank pada saat transaksi terjadi.
- b. **Penjualan Kredit**
Penjualan kredit adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dimana pembayarannya tidak dilakukan secara langsung, tetapi akan diterima pada waktu tertentu di masa depan sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan.
- c. **Pendapatan Jasa**
Pendapatan jasa merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pemberian layanan kepada pelanggan, seperti jasa konsultasi, transportasi, perbaikan, atau jasa profesional lainnya.
- d. **Pendapatan Lain-lain**
Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar aktivitas utama perusahaan, seperti penerimaan royalti atas penggunaan hak cipta, komisi dari perantara penjualan, atau pendapatan tambahan lainnya.

E. Memahami Proses Bisnis Klien

Mengetahui proses bisnis klien dalam kegiatan audit merupakan tahap awal yang dilakukan auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan siklus pendapatan, mulai dari penerimaan pesanan pelanggan sampai dengan penerimaan kas. Dalam melaksanakan audit, auditor akan menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan kemungkinan munculnya risiko salah saji yang material pada laporan keuangan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan auditor dalam menilai tingkat risiko adalah dengan memahami proses bisnis klien serta lingkungan industrinya. Pemahaman terhadap proses bisnis dan kondisi industri klien sangat penting bagi auditor karena dapat membantu dalam beberapa hal. Pertama, auditor dapat mengidentifikasi sumber serta tingkat pendapatan utama perusahaan dengan menilai kapasitas operasional klien, pangsa pasar produk yang dihasilkan, serta karakteristik pelanggan yang dimiliki. Kedua, auditor dapat memperkirakan tingkat laba dan margin kotor yang diharapkan perusahaan melalui pemahaman terhadap posisi pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki klien dalam industrinya. Ketiga, auditor dapat memahami karakteristik dan tingkat piutang usaha dengan menelaah rata-rata periode penerimaan pembayaran dari pelanggan serta membandingkannya dengan rata-rata periode penerimaan yang berlaku dalam industri yang sama.

F. Materialitas

Sebelum melaksanakan audit terhadap siklus pendapatan, auditor perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tingkat materialitas dari akun-akun yang berkaitan dengan siklus tersebut. Pertimbangan mengenai materialitas ini akan memengaruhi langkah-langkah audit selanjutnya yang akan dilakukan oleh auditor dalam proses pemeriksaan.

Dalam menentukan tingkat materialitas baik pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat akun transaksi, terdapat beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian auditor, antara lain:

- a. Transaksi penjualan merupakan sumber utama yang menghasilkan pendapatan operasional bagi perusahaan.
- b. Akun penjualan menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan laba bersih perusahaan, sehingga kesalahan dalam pencatatan akun ini akan berdampak langsung terhadap perhitungan laba rugi.

- c. Saldo piutang usaha yang timbul akibat transaksi penjualan kredit pada umumnya memiliki jumlah yang cukup besar.
- d. Transaksi penerimaan kas dapat memberikan pengaruh yang langsung dan material terhadap saldo piutang usaha maupun saldo kas perusahaan.

G. Dokumen-Dokumen Terkait

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan faktur penjualan terdiri dari:

- a. Faktur penjualan (customer's copies)
Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim kepada customer.
- b. Tembusan piutang (account receivable copy)
Merupakan tembusan faktur penjualan yang dikirim ke fungsi pencatat piutang sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam buku pembantu piutang.
- c. Tembusan jurnal penjualan (sale journal copy)
Merupakan tembusan yang dikirim ke fungsi akuntansi umum sebagai dasar untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan.
- d. Tembusan analisis (analysis copy)
Merupakan tembusan yang dikirim ke fungsi akuntansi biaya sebagai dasar untuk menghitung kos produk yang dijual yang dicatat dalam buku pembantu sadiaan, untuk analisis, dan untuk perhitungan komisi wiraniaga.
- e. Tembusan wiraniaga (salesperson copy)
Dikirim kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order dari customer yang lewat di tangannya telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya.

H. Prosedur Audit Siklus Pendapatan

Prosedur audit siklus pendapatan dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat benar-benar terjadi, lengkap, akurat, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi (PSAK 72). Audit ini biasanya dibagi menjadi dua tahap besar yakni :

1. Uji Pengendalian (Test of Controls)

Tujuannya adalah untuk memastikan sistem internal perusahaan berjalan dengan baik sebelum auditor memeriksa angka-angkanya.

- a. **Otorisasi:** Periksa apakah setiap pesanan penjualan telah disetujui oleh manajer kredit dan apakah harga yang digunakan sesuai dengan daftar harga resmi (*price list*).
- b. **Pemisahan Tugas:** Pastikan fungsi penerimaan pesanan, pengiriman barang, penagihan, dan pencatatan kas dipegang oleh orang yang berbeda.
- c. **Urutan Dokumen:** Lakukan penelusuran (*tracing*) pada urutan nomor dokumen (faktur, surat jalan) untuk memastikan tidak ada nomor yang hilang atau ganda.
- d. **Rekonsiliasi:** Pastikan ada bukti bahwa perusahaan melakukan rekonsiliasi harian antara total penjualan dengan laporan penerimaan kas.

2. Uji Substantif (Substantive Procedures)

Tujuannya adalah untuk memverifikasi saldo akun (Piutang dan Pendapatan) dalam laporan keuangan.

Uji Keberadaan dan Keterjadian (Occurrence)

- a. **Vouching:** Ambil sampel transaksi dari Jurnal Penjualan dan telusuri balik ke dokumen pendukungnya (Faktur, Surat Jalan, dan Pesanan Pelanggan). Ini membuktikan bahwa penjualan tersebut benar-benar terjadi.
- b. **Konfirmasi Piutang:** Mengirimkan surat konfirmasi langsung kepada pelanggan untuk memverifikasi saldo utang mereka.

Uji Kelengkapan (Completeness)

- a. **Tracing:** Ambil sampel Surat Jalan (*Bill of Lading*) dan telusuri hingga ke Jurnal Penjualan. Ini memastikan semua barang yang dikirim sudah dicatat sebagai pendapatan.
- b. **Uji Pisah Batas (Cut-off Test):** Memeriksa transaksi beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca (31 Desember) untuk memastikan pendapatan dicatat pada periode yang benar.

Uji Akurasi dan Penilaian (*Accuracy & Valuation*)

- a. **Pengecekan Matematis:** Hitung ulang perkalian antara kuantitas dan harga pada faktur penjualan.
- b. **Review Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN):** Evaluasi apakah penyisihan piutang tak tertagih sudah cukup dan masuk akal berdasarkan umur piutang (*Aging Schedule*).

3. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Auditor membandingkan data untuk melihat adanya anomali atau tren yang mencurigakan:

- a. Bandingkan rasio **Gross Profit Margin** tahun ini dengan tahun lalu. Jika naik drastis tanpa alasan yang jelas, ada risiko pendapatan fiktif.
- b. Bandingkan rasio **Account Receivable Turnover** (Perputaran Piutang) untuk melihat efisiensi penagihan.
- c. Analisis tren pendapatan bulanan untuk melihat apakah ada lonjakan tidak wajar di akhir tahun (indikasi *window dressing*).

I. Konsep Siklus Piutang

Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima kas dari pelanggan atau pihak lain akibat transaksi yang telah terjadi, terutama dari penjualan kredit. Menurut **PSAK 71 - Instrumen Keuangan**, piutang merupakan aset keuangan yang timbul karena adanya hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain.

Piutang usaha timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normal perusahaan. Dalam siklus pendapatan seperti yang kita ketahui, transaksi yang mempengaruhi piutang usaha adalah :

- a. Transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada customer
- b. Transaksi retur penjualan
- c. Transaksi penerimaan kas dari debitur
- d. Transaksi penghapusan piutang

Jenis-jenis Piutang

- a. **Piutang Usaha**
Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit.
- b. **Piutang Non Usaha**
Piutang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, seperti piutang kepada karyawan atau piutang bunga.
- c. **Piutang Wesel**
Piutang yang didukung dengan dokumen resmi berupa wesel atau *promissory note*.

J. Prosedur Audit Siklus Piutang

Prosedur audit piutang usaha sangat erat kaitannya dengan audit siklus pendapatan. Fokus utama auditor di sini adalah memastikan bahwa piutang tersebut benar-benar ada, dimiliki oleh perusahaan, dan dinilai dengan tepat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku (Kimmel et al., 2018). Berikut adalah prosedur audit piutang yang lengkap dan sistematis:

1. Prosedur Uji Substantif (*Substantive Procedures*)

Uji Keberadaan dan Hak (*Existence & Rights*)

Ini adalah prosedur paling kritis untuk memastikan piutang bukan fiktif.

- a. **Konfirmasi Eksternal:** Mengirimkan surat konfirmasi langsung kepada debitur (pelanggan).
 - *Konfirmasi Positif:* Meminta pelanggan membalas apakah saldo setuju atau tidak.
 - *Konfirmasi Negatif:* Pelanggan hanya membalas jika saldo tidak setuju (digunakan jika risiko rendah).
- b. **Penerimaan Kas Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Receipt*):** Jika konfirmasi tidak dibalas, periksa apakah ada pelunasan piutang tersebut di bulan Januari atau Februari tahun berikutnya. Ini adalah bukti kuat bahwa piutang itu valid.
- c. **Vouching ke Dokumen Pendukung:** Periksa saldo piutang yang besar ke dokumen *Sales Invoice*, *Bill of Lading*, dan *Sales Order*.

Uji Penilaian dan Alokasi (*Valuation & Allocation*)

Fokus pada apakah nilai piutang yang dicatat di neraca sudah mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan (setelah dikurangi cadangan kerugian).

- a. **Review Umur Piutang (*Aging Schedule*):** Hitung ulang keakuratan tabel umur piutang. Periksa piutang yang sudah jatuh tempo lama (misal: >90 hari).
- b. **Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN):** * Diskusikan dengan manajemen mengenai kebijakan penyisihan piutang tak tertagih.
 - Pastikan estimasi kerugian sesuai dengan histori penagihan dan kondisi ekonomi saat ini (sesuai PSAK 71/IFRS 9 tentang *Expected Credit Loss*).

- c. **Analisis Penghapusan Piutang:** Periksa otorisasi untuk piutang yang dihapusbukukan selama tahun berjalan untuk memastikan tidak ada penggelapan kas.

C. Uji Pisah Batas (*Cut-off Test*)

- a. Periksa transaksi penjualan dan retur beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal tutup buku (31 Desember).
- b. Pastikan piutang dicatat pada periode di mana kendali barang telah berpindah ke pelanggan.

2. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Auditor menggunakan logika angka untuk mendeteksi anomali:

- a. **Rasio Perputaran Piutang (AR Turnover):** Bandingkan dengan tahun lalu. Jika melambat secara signifikan, ada indikasi piutang macet atau fiktif.
- b. **DSO (*Days Sales Outstanding*):** Menghitung berapa lama rata-rata pelanggan membayar.
- c. **Perbandingan Saldo:** Bandingkan persentase piutang terhadap total aset atau total penjualan dari tahun ke tahun.

3. Contoh Kertas Kerja Audit (*Audit Working Paper*)

Nama Pelanggan	Saldo Per Buku	Hasil Konfirmasi	Selisih	Penjelasan / Prosedur Alternatif
PT. Makmur Jaya	Rp500.000.000	Setuju	-	Konfirmasi Kembali (CB)
Toko Berkah	Rp150.000.000	Tidak Balas	-	Periksa bukti bayar Jan 2026
CV. Abadi	Rp75.000.000	Rp70.000.000	Rp5.000.000	Barang retur belum dicatat penjual

4. Risiko Audit yang Harus Diwaspadai

- a. **Window Dressing:** Mencatat penjualan di akhir tahun untuk mempercantik neraca, padahal barang belum dikirim.
- b. **Lapping:** Menggunakan uang dari pelanggan A untuk menutupi pencurian kas dari pelanggan B.
- c. **Pledging:** Piutang yang dijadikan jaminan utang ke bank namun tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). Akuntansi Keuangan Menengah, Vol 2.
- Kimmel, P. D., Weygandt, J. J., & Kieso, D. E. (2018). *Accounting: Tools for business decision making*. John Wiley & Sons.
- Sulistia, A. R. B., & Meidawati, N. (2024). Audit Atas Piutang Usaha PT X. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 529-539.

JAWABARA

PROFIL PENULIS



Wenny Anggeresia Ginting, M.Ak
Politeknik Negeri Manado

Penulis lahir di Medan, 27 Agustus 1987. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Program Studi Strata 1 Ekonomi Akuntansi lulus tahun 2010, Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister Ekonomi dan Bisnis Akuntansi konsentrasi akuntansi keuangan di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen tetap PNS di Politeknik Negeri Manado dan juga aktif menjadi tutor online di Universitas Terbuka dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Penulis pernah bekerja di Perkebunan kelapa sawit milik swasta sebagai staff keuangan dan pajak dari tahun 2010 hingga 2015, penulis juga pernah bekerja sebagai auditor di kantor akuntan Erwin, Zikri dan Togar tahun 2014 hingga 2018. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.



BAB 11

AUDIT SIKLUS PERSEDIAAN DAN PERGUDANGAN

Armadani S.E., M.A.
Universitas Islam Al-Kifayah Riau

A. Pendahuluan

Salah satu aset yang paling penting dalam suatu perusahaan adalah persediaan. Nilai persediaan pada umumnya bernilai tinggi dan signifikan pada laporan keuangan dan sangat terkait erat dengan harga pokok penjualan dan laba perusahaan. Karenanya, semua administrasi terkait persediaan dan penyimpanannya wajib dilakukan dengan akurat agar memberikan informasi yang andal dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan audit siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk memastikan bahwa persediaan yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan adalah andal sehingga memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh pemangku kepentingan. Pada tahap ini, auditor perlu memeriksa dan memastikan bahwa persediaan dinilai dengan tepat, lengkap, dan akurat. Proses audit pada siklus ini mengharuskan auditor untuk mengevaluasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan barang, penyimpanan, pemindahan dan pengiriman, dan pencatatannya.

B. Definisi

Audit persediaan dan pergudangan merupakan langkah dan tindakan auditor yang bertujuan untuk menguji dan menilai kewajaran dari pencatatan, penilaian, dan penyajian persediaan pada laporan keuangan dan keterkaitannya dengan siklus pergudangan dengan merujuk pada standar akuntansi yang berlaku.

Audit persediaan dan pergudangan ini termasuk pada bagian yang sangat kompleks dalam audit. Oleh karena itu, proses audit persediaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kompleksitas audit persediaan dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Di dalam neraca, akun terbesar pada umumnya adalah neraca
- b. Terdapat tantangan yang cukup besar dalam melakukan audit terhadap persediaan karena ada yang tidak hanya terletak dalam satu lokasi
- c. Beberapa bentuk persediaan sulit untuk dinilai, seperti: komponen elektronik, bahan kimia, dan perhiasan
- d. Terdapat perbedaan antara perusahaan satu dan lainnya dalam menilai persediaan yang hal ini diterima oleh standar akuntansi yang berlaku.

C. Fungsi bisnis dan dokumen terkait

Siklus persediaan dan pergudangan merupakan dua siklus yang memiliki keterkaitan satu dan lainnya. Terdapat beberapa fungsi bisnis pada siklus persediaan dan pergudangan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Permintaan pembelian atau pengadaan barang
Langkah pertama yang ada dalam siklus persediaan dan pergudangan adalah pengadaan bahan baku untuk produksi. Pada tahap ini, penerapan kontrol yang memadai harus dilakukan dan dipertahankan, tidak memandang apakah bahan baku dibeli untuk diolah lagi atau barang jadi untuk langsung dijual lagi. Dokumen yang digunakan untuk permintaan pembelian ini adalah berupa formulir pemesanan persediaan.
- b. Penerimaan bahan baku
Setelah adanya pesanan terhadap bahan baku atau barang yang dibutuhkan, siklus selanjutnya adalah penerimaan material yang dipesan tersebut. Pada bagian ini melibatkan beberapa aktivitas yaitu pembayaran dan pemeriksaan kuantitas pesanan. Bagian yang menjadi penanggung jawab melakukan dokumentasi aktivitas tersebut dan membuat salinannya. Setelah itu bahan baku tersebut dikirim ke pergudangan.

c. Penyimpanan

Fungsi bisnis selanjutnya adalah menyimpan bahan baku di gudang. Pada waktunya nanti bahan baku dibutuhkan untuk proses produksi, maka persediaan tersebut diminta dengan menggunakan dokumen untuk nanti menjadi bukti penggunaan. Setelah dilakukan pemakaian bahan baku digudang dokumen inventaris tersebut diperbaharui untuk menunjukkan jumlah persediaan terbaru.

d. Memproses bahan baku

Pada proses pengolahan persediaan bahan baku, setiap perusahaan memiliki pendekatan yang beragam. Tingkat pengolahan persediaan ditentukan oleh target penjualan, banyak permintaan pelanggan, dan jumlah persediaan barang jadi yang telah ada sebelumnya. Sistem pengendalian biaya menjadi faktor penting pada tahap ini. Akuntansi biaya merupakan sistem yang paling memadai untuk melakukan fungsi pengendalian biaya produksi. Karenanya, perusahaan harus menerapkan akuntansi biaya yang baik agar berproduksi dengan efektif dan efisien. Dokumen pencatatan pada tahap ini meliputi catatan biaya yang terdiri dari file induk, laporan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.

e. Penyimpanan barang jadi

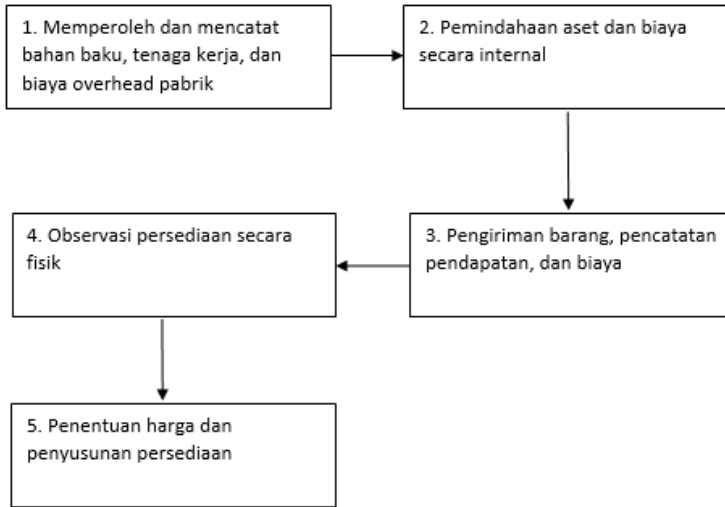
Setelah barang baku diproses, tahap selanjutnya adalah menyimpan barang jadi di gudang. Penerapan pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan menunjukkan adanya aktivitas pemisahan tempat barang jadi dan dibatasi aksesnya.

f. Pengiriman barang jadi

Fungsi bisnis terakhir pada siklus persediaan dan pergudangan adalah pengiriman barang jadi. Semua barang jadi yang dikirimkan dari pergudangan harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan angka aktual terkait persediaan yang ada digudang.

D. Bagian-bagian penting dalam audit siklus persediaan dan pergudangan

Terdapat setidaknya lima aktivitas dalam siklus audit persediaan dan pergudangan, kelima bagian tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1. Audit siklus persediaan dan pergudangan

Bagian pertama adalah memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada bagian ini auditor harus memperoleh pemahaman terkait ketiga fungsi bisnis tersebut. Selanjutnya mereka melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Auditor harus memperoleh keyakinan yang memadai terkait pengendalian bahan baku dan biaya produksi. Auditor harus melakukan pengecekan bagian siklus penggajian dan personalia ketika biaya tenaga kerja merupakan biaya yang signifikan.

Kedua, pemindahan persediaan dan biaya. Fungsi bisnis yang terkait dengan bagian ini adalah pemrosesan bahan baku dan penyimpanan barang jadi. Auditor melakukan pemeriksaan pada klien khususnya pada catatan akuntansi biaya.

Ketiga, proses pengiriman barang jadi dan melakukan pencatatan pendapatan dan biaya. Pada bagian ini sudah termasuk pada bagian fungsi bisnis terakhir seperti yang dibahas sebelumnya. Hal ini dikarenakan bagian ini telah masuk pada siklus penjualan dan penagihan. Karena itu, auditor harus menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman dari siklus penjualan dan penagihan. Selain itu, auditor perlu memeriksa dan melakukan verifikasi terkait pencatatan persediaan.

Keempat, melakukan observasi fisik persediaan. Pada bagian ini auditor melakukan pemeriksaan pengamatan secara fisik dan

mengamati perhitungan fisik oleh klien untuk memastikan perhitungannya benar dan persediaan tersebut ada di gudang.

Kelima, menentukan harga dan menyusun inventaris. Auditor menguji apakah metode yang digunakan klien untuk menghitung persediaan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan konsisten digunakan sejak tahun sebelumnya. Auditor juga melakukan uji harga untuk memastikan bahwa biaya yang dihitung klien adalah benar. Terakhir, auditor melakukan uji kompilasi persediaan dengan melakukan verifikasi terhadap ringkasan kuantitas dan harga persediaan yang dilakukan oleh klien.

Berikut ini gambaran ringkas keterkaitan antara fungsi bisnis, aliran persediaan, dan dokumen terkait:

Tabel 11.1. Keterkaitan fungsi bisnis, aliran persediaan, dan dokumennya

No	Fungsi Bisnis	Aliran persediaan	Dokumen terkait
1	Permintaan Pembelian atau pengadaan barang		Permintaan pembelian, Pesanan pembelian
2	Penerimaan bahan baku	Menerima bahan baku	Menerima laporan, Faktur vendor
3	Penyimpanan	Menyimpan bahan baku di gudang	berkas induk inventaris perpetual bahan baku
4	Memproses bahan baku	Masukkan bahan baku ke dalam produksi	Permintaan bahan baku, Catatan akuntansi biaya
5	Penyimpanan barang jadi	Menyimpann barang jadi di gudang.	Berkas induk persediaan barang jadi perpetual, Catatan akuntansi biaya
6	Pengiriman barang jadi	Mengirim barang jadi	Dokumen pengiriman, Berkas induk persediaan barang jadi perpetual, Catatan akuntansi biaya

Berikut ini siklus yang terkait dengan audit persediaan dan pergudangan:

Tabel 11.2. Siklus yang terkait dengan audit persediaan dan pergudangan

No	Bagian audit	Siklus yang diuji
1	Memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead.	Akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia
2	Transfer aset dan biaya secara internal	Inventaris dan pergudangan
3	Mengirim barang dan mencatat pendapatan serta biaya.	Penjualan dan penagihan
4	Amati inventaris secara fisik.	Inventaris dan pergudangan
5	Menentukan harga dan menyusun inventaris.	Inventaris dan pergudangan

E. Merancang dan melaksanakan pengujian audit akuntansi biaya

Tujuan pengendalian audit akuntansi biaya adalah mengetahui jumlah dan biaya bahan baku dan biaya mulai dari membeli bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Terdapat dua kategori pengendalian akuntansi biaya, yaitu:

- Pengendalian fisik
- Pengendalian atas biaya yang terkait proses dari bahan baku hingga barang jadi

Lebih jauh, terdapat empat aspek yang menjadi fokus auditor pada test akuntansi biaya:

- Pengendalian fisik atas persediaan
- Dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan
- Berkas induk persediaan perpetual
- Catatan biaya per unit
- Pengendalian fisik atas persediaan adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sekaligus memberi pengawasan terhadap persediaan perusahaan secara langsung mengobservasi fisiknya di gudang. Pada aktivitas ini auditor akan menela sistem pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan terkait persediaan untuk meminimalisir terjadinya pencurian, kerusakan, dan kehilangan persediaan. Beberapa contoh aktivitas pengendalian fisik adalah sebagai berikut:
 - Memastikan bahwa sistem penutupan dan penguncian gudang hanya dapat diakses oleh orang tertentu
 - Melakukan perhitungan fisik secara berkala

- Memastikan terdapat CCTV di area pergudangan
 - Terdapat pembagian tugas antara penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan persediaan
- f. Dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan dilakukan oleh auditor dengan mengecek dokumen yang digunakan ketika persediaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bahan baku dan barang jadi tercatat dengan tepat dan dapat ditelusuri. Berikut ini aktivitas yang dilakukan:
- Memeriksa dokumen pendukung setiap pentrasferan barang
 - Memeriksa dan memastikan pihak yang memberikan otorisasi adalah pihak yang benar-benar berwenang
 - Memeriksa apakah sistem akuntansi yang digunakan adalah konsisten
- g. Berkas induk persediaan perpetual merupakan dokumen penting yang memberikan informasi terkait dengan persediaan secara *real time* setiap terjadi transaksi. Dalam sistem ini, setiap pembelian, pemakaian, dan penjualan barang persediaan langsung diperbaharui saldonya. Dalam hal ini, auditor akan memeriksa hal-hal sebagai berikut ini:
- Pembaruan catatan persediaan
 - Jumlah fisik persediaan di gudang sama dengan saldo pencatatan
 - Rekonsiliasi antara catatan dan *stock opname*
- h. Untuk memastikan keakuratan persediaan yang dilaporkan, auditor menghimpun informasi berikut ini dari dokumen induk persediaan:
- Kode barang
 - Saldo persediaan
 - Jumlah masuk dan keluar
 - Lokasi penyimpanan
 - Catatan biaya per unit berapa biaya yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk. Auditor memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan hal ini telah melakukan perhitungan biaya produksi dengan benar yang terdiri dari :
 - Biaya bahan baku langsung
 - Biaya tenaga kerja langsung
 - Biaya overhead pabrik

Pemeriksaan ini sangat penting agar diketahui bahwa harga pokok produksi (HPP) dihitung secara benar dan nilai persediaan dalam proses dan barang jadi juga dihitung dengan tepat. Akibat

yang timbul dari kesalahan pencatatan HPP dan nilai persediaan dapat berpengaruh pada laporan neraca dan laba rugi.

F. Penerapan prosedur analitis substantif pada akun-akun dalam siklus persediaan dan pergudangan.

Tindakan prosedur analitis substantif memiliki peran penting dalam audit persediaan dan pergudangan. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan antara data keuangan dan non-keuangan dengan tujuan untuk menilai kewajaran saldo akun. Dalam konteks audit persediaan dan pergudangan, teknik ini berperan penting karena akun persediaan sering memiliki nilai material dan berkaitan langsung dengan HPP. Teknik ini dilakukan dengan munguji dan menganalisis tren, rasio, dan keterkaitan satu akun dan lainnya.

Prosedur analitis substantif ini penting untuk mengenali ketidakwajaran saldo persediaan, menilai kewajaran harga pokok penjualan, menganalisis rasio persediaan, dan membantu menentukan area risiko audit, dan meningkatkan efisiensi proses audit. Prosedur analitis substantif untuk siklus inventaris dan pergudangan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 11.3. Prosedur Analitis Substantif untuk Siklus Inventaris dan Pergudangan

No	Prosedur analitis substantif	Kemungkinan Salah Pernyataan
1	Bandingkan persentase margin kotor dengan persentase margin kotor tahun-tahun sebelumnya.	Pencatatan yang berlebihan atau kurang atas persediaan dan biaya harga barang terjual.
2	Bandingkan perputaran persediaan (biaya barang terjual dibagi dengan persediaan rata-rata) dengan perputaran persediaan tahun-tahun sebelumnya.	Persediaan usang, yang memengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Pencatatan persediaan yang berlebihan atau kurang.
3	Bandingkan biaya per unit persediaan dengan biaya per unit tahun-tahun sebelumnya.	Pelebihan atau kekurangan pencatatan biaya per unit, yang memengaruhi persediaan dan biaya barang terjual.
4	Bandingkan nilai persediaan yang diperluas dengan nilai persediaan tahun-tahun sebelumnya.	Kesalahan penyajian dalam penyusunan laporan keuangan, biaya per unit, atau penambahan, yang

		memengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan.
5	Bandingkan biaya produksi tahun ini dengan biaya produksi tahun-tahun sebelumnya (biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume).	Kesalahan penyajian biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan biaya overhead manufaktur, yang memengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan.

G. Merancang dan melaksanakan pengujian audit observasi fisik untuk inventaris

Kebenaran perhitungan fisik atau kuantitas catatan perpetual harus diperiksa dan dipastikan oleh auditor. Dalam audit persediaan dan pergudangan, tahap ini sangat penting dilakukan karena memastikan bahwa persediaan benar-benar ada dan kuantitasnya dengan tepat dicatat. Artinya auditor tidak hanya mengandalkan laporan dari perusahaan, melainkan auditor memastikan persediaan dengan melakukan proses *stock opname* sehingga catatan tersebut dapat diandalkan.

Berikut ini merupakan beberapa tujuan observasi fisik persediaan:

- Eksistensi (*existence*). Persediaan yang ada dalam catatan laporan keuangan dipastikan juga ada secara fisik tempat penyimpanan
- Kelengkapan (*Completeness*). Persediaan telah dicatat semuanya tanpa ada yang terlewat
- Hak dan kewajiban (*Rights and Obligations*). Auditor memastikan bahwa kepemilikan persediaan tersebut berada pada perusahaan
- Penilaian (*valuation*). Auditor melakukan pemeriksaan fisik dengan menilai keadaan persediaan (kualitas) apakah terdapat barang rusak atau dalam keadaan baik.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam prosedur audit observasi ini adalah membuat perencanaan dan strategi yang baik.

Berikut ini adalah faktor penting yang harus menjadi pertimbangan:

- Memahami sistem persediaan Perusahaan. Pada tahap ini auditor memahami metode pencatatan persediaan, langkah-langkah *stock opname* perusahaan, dan *internal control* tempat penyimpanan. Dengan mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, auditor dapat menentukan tingkat pengujian kunci pada proses audit.
- Menentukan waktu pengamatan fisik. Auditor pada umumnya melakukan pengamatan fisik pada akhir periode akuntansi atau tanggal yang mendekati waktu pelaporan keuangan.

- c. Menentukan sampel penelitian. Tujuan membuat sampel audit ini adalah untuk menentukan fokus pengujian. Auditor mengidentifikasi persediaan yang memiliki nilai atau risiko tinggi dan meletakkan posisinya pada prioritas audit. Hal yang dipertimbangkan antara lain:
- Jenis barang
 - Nilai persediaan
 - Lokasi penyimpanan
 - Risiko salah saji
- d. Pelaksanaan pengamatan fisik. Berikut ini adalah prosedur yang perlu ditempuh oleh auditor dalam melaksanakan observasi fisik:
- Observasi proses perhitungan persediaan
Pada tahap ini auditor memastikan bahwa perhitungan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya, tidak ada penransferan barang selama proses pemeriksaan, dan terdapat pendanaan terhadap barang yang telah dihitung.
 - Uji hitung
Auditor melakukan uji hitung dengan membandingkan beberapa item barang yang ada pada pergudangan dengan yang ada dicatatan (**Floor-to-sheet test**). Sebaliknya auditor juga dapat menggunakan teknik memilih barang tertentu pada catatan laporan persediaan dan membandingkannya melalui perhitungan di gudang (**Sheet-to-floor test**).
 - Memeriksa kondisi persediaan
Melihat dan menetapkan kondisi persediaan apakah termasuk barang rusak, baik, using, atau barang yang memiliki pergerakan lambat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persediaan tidak dinilai terlalu tinggi dalam laporan keuangan.
 - Mengidentifikasi barang pihak ketiga
Pada tahap ini auditor memeriksa barang yang memiliki hak pihak ketiga atau terdapat barang konsinyasi. Apabila barang tersebut adalah barang konsinyasi maka tidak boleh dicatat pada laporan keuangan sebagai aset perusahaan.
- e. Verifikasi catatan persediaan perpetual dan dokumentasi audit
Setelah melakukan pengamatan fisik persediaan, langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan sistem pencatatan perpetual. Ada dua hal yang dapat dilakukan ketika terdapat perbedaan:
- Perusahaan diharuskan melakukan rekonsiliasi
 - Mencari penyebab adanya selisih tersebut apakah karena salah hitung, kehilangan, atau kecurangan.

Setelah itu semua dilakukan maka langkah selanjutnya adalah membuat dokumentasi bukti audit. Bentuk dokumentasi dalam kertas kerja audit adalah sebagai berikut:

- daftar persediaan yang diuji
- hasil test count
- catatan kondisi barang
- perbedaan yang ditemukan
- kesimpulan auditor.

H. Merancang dan melaksanakan pengujian audit terhadap penetapan harga dan penyusunan persediaan

1. Kontrol Penetapan Harga dan Kompilasi

Auditor melakukan pengecekan terhadap pengendalian internal klien yang memadai terkait dengan pelacakan biaya per unit yang terintegrasi dengan produksi dan catatan akuntansi lainnya. Hal itu penting karena dengan menggunakan informasi tersebut auditor mampu menilai kewajaran biaya untuk persediaan akhir. Selain itu, orang yang bertugas untuk pencatatan dan menentukan harga wajar persediaan haruslah independen. Pengendalian internal kompilasi persediaan berguna untuk memastikan bahwa perhitungan fisik diringkas dengan benar dan diberi harga dengan jumlah yang sama dengan catatan unit, serta dimasukkan kedalam file induk inventaris perpetual dan akun inventaris buku besar umum terkait dengan jumlah yang tepat juga sangat penting bagi klien itu sendiri.

2. Prosedur Penetapan Harga dan Penyusunan

Informasi dalam daftar persediaan perpetual dicatat sesuai dengan urutan deskripsi persediaan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, semuanya dicatat secara terpisah. Saldonya harus sama dengan dengan saldo buku besar umum.

3. Penentuan Harga Persediaan

Langkah pertama yang dilakukan untuk menilai dan menetapkan harga persediaan adalah menentukan sistem pencatatan klien apakah LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, atau metode penilaian lainnya. Biaya mana yang harus dimasukkan dalam penilaian suatu persediaan harus ditentukan oleh auditor juga. Sebagai contoh, auditor harus mencari tahu apakah biaya pengiriman, penyimpanan, diskon, dan biaya lainnya termasuk di

dalamnya dan auditor harus membandingkan temuan tersebut dengan tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa biaya tersebut ditentukan secara konsisten.

JAWABARA

DAFTAR PUSTAKA

Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). Pearson Education Limited.

JANVARA

PROFIL PENULIS



Armadani S.E., M.A.

Universitas Islam Al-Kifayah Riau

Penulis lahir di Ujung Padang, 20 Januari 1998. Dia menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Riau (UNRI) dengan Program Studi S1 Akuntansi lulus tahun 2021. Selama menempuh Pendidikan S1 penulis banyak menorehkan prestasi seperti juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, juara olimpiade ekonomi islam, juara lomba debat mahasiswa FEB UNRI, dan Juara *Bussiness Plan Competition*

tingkat Kota Pekanbaru.

Pada Tahun 2021 penulis mengikuti seleksi beasiswa LPDP dan diterima ditahun yang sama. Jenjang Magister dilanjutkannya tahun 2022 di Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga. Selama proses penyelesaian jenjang magister, penulis telah banyak mempublikasikan hasil penelitian di jurnal bereputasi baik di SINTA maupun di Scopus. Setelah memperoleh gelar S2, penulis kembali ke UNRI sebagai asisten dosen yang sudah dimulainya sejak menempuh Pendidikan S1. Tahun 2025 penulis diterima bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau yang saat ini telah beralih bentuk menjadi Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Saat ini penulis adalah sebagai dosen tetap sekaligus Ketua Program Akuntansi Syariah di Universitas Al-Kifayah Riau. Selain aktif sebagai peneliti dan pengajar, penulis juga saat ini adalah reviewer di salah satu jurnal Scopus Q1. Penulis berharap karya ini menjadi langkah awal penulis untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam Pendidikan Indonesia khususnya di bidang akuntansi.



BAB 12

AUDIT INVESTASI DAN INSTRUMEN KEUANGAN

Dr. Puji Setya Sunarka, S.Pd., S.E., M.Si.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

A. Konsep Dasar Audit Investasi dan Instrumen Keuangan

Audit investasi dan instrumen keuangan merupakan bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan karena akun-akun tersebut sering memiliki nilai material, kompleksitas pengukuran yang tinggi, serta keterkaitan langsung dengan risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Investasi dan instrumen keuangan tidak hanya mencerminkan aktivitas penempatan dana entitas, tetapi juga menggambarkan strategi manajemen dalam mengelola kelebihan kas, memperoleh imbal hasil, mendiversifikasi risiko, memenuhi kebutuhan pendanaan, atau melakukan lindung nilai atas ketidakpastian ekonomi. Dalam praktik audit, investasi dan instrumen keuangan membutuhkan perhatian khusus karena karakteristiknya dapat berbeda dengan akun aset lain. Beberapa instrumen keuangan memiliki harga pasar yang mudah diamati, sementara instrumen lain memerlukan teknik penilaian yang kompleks. Kondisi tersebut menuntut auditor untuk memiliki pemahaman memadai mengenai jenis instrumen, tujuan kepemilikan,

dasar pengukuran, metode penilaian, serta pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan. Audit terhadap investasi dan instrumen keuangan tidak hanya bertujuan menilai keberadaan saldo, tetapi juga menilai kepemilikan, kelengkapan pencatatan, klasifikasi, pengukuran, penurunan nilai, pengakuan pendapatan, serta kewajaran penyajian dan pengungkapan. Oleh karena itu, auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional dan prosedur audit yang memadai agar risiko salah saji material dapat ditekan pada tingkat yang dapat diterima (Dahlan et al., 2025).

1. Pengertian Audit Investasi dan Instrumen Keuangan

Audit investasi dan instrumen keuangan adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap akun investasi dan instrumen keuangan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kewajaran pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Audit ini dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku dan berorientasi pada penilaian apakah informasi keuangan terkait investasi serta instrumen telah disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang relevan. Investasi dalam laporan keuangan dapat berupa saham, obligasi, deposito berjangka, reksa dana, penyertaan pada entitas lain, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, dan aset keuangan lain yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan atau manfaat ekonomi pada masa depan. Sementara itu, instrumen keuangan mencakup kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu pihak dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi pihak lain. Instrumen ini dapat berbentuk piutang, utang, pinjaman, surat berharga, derivatif, dan instrumen ekuitas.

Dalam audit, investasi dan instrumen keuangan harus dipahami berdasarkan substansi ekonominya, bukan hanya bentuk hukumnya. Contohnya, suatu instrumen dapat secara hukum tampak sebagai saham preferen, tetapi secara substansi memiliki karakteristik kewajiban apabila terdapat kewajiban kontraktual untuk melakukan pembayaran tetap kepada pemegang instrumen. Dengan demikian, auditor perlu menilai apakah klasifikasi yang digunakan entitas telah mencerminkan substansi transaksi secara tepat. Audit investasi dan instrumen keuangan juga mencakup penilaian atas pengendalian internal yang berkaitan dengan otorisasi transaksi, penyimpanan dokumen kepemilikan, rekonsiliasi saldo, pemantauan nilai wajar, pencatatan pendapatan investasi, dan pelaporan risiko. Pengendalian internal yang lemah

dapat meningkatkan kemungkinan salah saji, baik akibat kesalahan maupun kecurangan (Knechel & Salterio, 2016).

2. Tujuan Audit atas Investasi dan Instrumen Keuangan

Tujuan utama audit atas investasi dan instrumen keuangan adalah memperoleh keyakinan memadai bahwa akun tersebut bebas dari salah saji material. Keyakinan tersebut diperoleh melalui serangkaian prosedur audit yang dirancang untuk menguji asersi manajemen, seperti keberadaan, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian, alokasi, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Audit atas investasi bertujuan memastikan bahwa investasi yang dicatat benar-benar ada pada tanggal pelaporan dan menjadi hak entitas. Auditor perlu memastikan bahwa saham, obligasi, deposito, atau instrumen lain yang disajikan dalam laporan keuangan tidak hanya tercatat dalam pembukuan, tetapi juga didukung oleh bukti kepemilikan yang sah. Selain itu, auditor harus menilai apakah seluruh investasi yang seharusnya dicatat telah dimasukkan dalam laporan keuangan. Audit atas instrumen keuangan bertujuan memastikan bahwa instrumen tersebut diakui dan diukur sesuai dengan karakteristik kontraktual serta model bisnis entitas. Instrumen keuangan tertentu diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sementara instrumen lain diukur pada nilai wajar. Perbedaan dasar pengukuran ini dapat menimbulkan risiko salah saji apabila entitas salah menerapkan klasifikasi atau menggunakan asumsi penilaian yang tidak wajar. Tujuan audit juga mencakup penilaian atas kecukupan pengungkapan. Investasi dan instrumen keuangan sering memerlukan pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi, risiko keuangan, nilai wajar, penurunan nilai, eksposur terhadap risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, serta kebijakan manajemen risiko. Pengungkapan yang tidak memadai dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan, meskipun angka yang disajikan telah dicatat dengan benar (Kumar & Sharma, 2015).

B. Karakteristik Investasi dan Instrumen Keuangan

Karakteristik investasi dan instrumen keuangan sangat beragam. Keberagaman tersebut memengaruhi cara entitas mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi dalam laporan keuangan. Dalam audit, pemahaman atas karakteristik ini menjadi dasar penting untuk menilai risiko salah saji material dan merancang prosedur pemeriksaan yang sesuai. Investasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu, tujuan kepemilikan, tingkat pengaruh

terhadap entitas lain, dan metode pengukuran. Sementara itu, instrumen keuangan diklasifikasikan berdasarkan hak dan kewajiban kontraktual yang timbul dari transaksi. Oleh karena itu, auditor harus memahami perbedaan antara aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas agar dapat mengevaluasi perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh entitas.

1. Jenis-Jenis Investasi dalam Laporan Keuangan

Investasi dalam laporan keuangan dapat dibedakan menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek biasanya dimiliki untuk tujuan likuiditas, pengelolaan kas, atau memperoleh imbal hasil dalam waktu relatif singkat. Contohnya meliputi deposito berjangka, surat berharga yang mudah diperjualbelikan, reksa dana pasar uang, dan obligasi jangka pendek. Investasi ini umumnya memiliki tingkat likuiditas tinggi dan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat. Investasi jangka panjang dimiliki untuk tujuan strategis, pengendalian, pengaruh signifikan, atau memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih panjang. Contohnya meliputi penyertaan saham pada entitas asosiasi, investasi pada entitas anak, obligasi jangka panjang, properti investasi, dan instrumen keuangan lain yang tidak dimaksudkan untuk segera dijual. Investasi jangka panjang biasanya memiliki risiko penilaian yang lebih kompleks karena nilai ekonominya dapat dipengaruhi oleh kinerja entitas penerbit, kondisi industri, suku bunga, dan faktor ekonomi makro (Montgomery, 1927).

Investasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruh entitas terhadap pihak yang diinvestasikan. Apabila entitas memiliki pengendalian, investasi dapat dikategorikan sebagai investasi pada entitas anak. Apabila entitas memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak mengendalikan, investasi dapat dikategorikan sebagai investasi pada entitas asosiasi. Apabila entitas hanya memiliki kepemilikan pasif tanpa pengaruh signifikan, investasi dapat dikategorikan sebagai aset keuangan. Dalam audit, jenis investasi memengaruhi prosedur pemeriksaan. Investasi berupa deposito dapat diuji melalui konfirmasi bank. Investasi berupa saham yang diperdagangkan di pasar aktif dapat diuji melalui harga pasar. Investasi pada entitas asosiasi memerlukan pengujian atas metode ekuitas dan bagian laba rugi. Investasi tidak tercatat di pasar aktif memerlukan penilaian atas asumsi, model valuasi, dan bukti pendukung yang digunakan manajemen.

2. **Klasifikasi Instrumen Keuangan: Aset Keuangan, Liabilitas Keuangan, dan Instrumen Ekuitas**

Instrumen keuangan merupakan kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Klasifikasi instrumen keuangan menjadi penting karena menentukan perlakuan akuntansi, dasar pengukuran, serta pengungkapan yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Aset keuangan adalah aset yang berbentuk kas, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain, hak untuk menukar instrumen keuangan dengan pihak lain dalam kondisi yang menguntungkan, atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Contoh aset keuangan meliputi kas, piutang usaha, piutang pinjaman, investasi saham, investasi obligasi, dan derivatif dengan nilai positif (Annisa, 2011).

Liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain, atau kewajiban untuk menukar instrumen keuangan dengan pihak lain dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Contoh liabilitas keuangan meliputi utang usaha, pinjaman bank, obligasi yang diterbitkan, liabilitas sewa, dan derivatif dengan nilai negatif. Instrumen ekuitas adalah kontrak yang menunjukkan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Saham biasa merupakan contoh instrumen ekuitas. Namun, tidak semua instrumen yang diberi nama saham dapat langsung diklasifikasikan sebagai ekuitas. Auditor perlu menilai apakah terdapat kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Jika terdapat kewajiban tersebut, instrumen lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Klasifikasi utama instrumen keuangan dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 12.1 Klasifikasi Instrumen Keuangan:

Kategori Instrumen	Karakteristik Utama	Contoh
Aset keuangan	Memberikan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain	Kas, piutang, saham, obligasi, derivatif aset
Liabilitas keuangan	Menimbulkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain	Utang, pinjaman, obligasi diterbitkan, derivatif liabilitas
Instrumen ekuitas	Menunjukkan hak residual atas aset setelah dikurangi liabilitas	Saham biasa, tambahan modal disetor

Kesalahan klasifikasi dapat berdampak material terhadap laporan posisi keuangan, laba rugi, rasio keuangan, dan pengungkapan risiko. Oleh karena itu, auditor perlu menilai substansi kontrak secara hati-hati dan tidak hanya bergantung pada nama instrumen.

C. Risiko Audit pada Investasi dan Instrumen Keuangan

Investasi dan instrumen keuangan merupakan area audit yang memiliki risiko tinggi karena melibatkan estimasi, pertimbangan profesional, transaksi kompleks, dan perubahan nilai yang dapat terjadi secara cepat. Risiko audit meningkat ketika instrumen tidak memiliki harga pasar aktif, menggunakan model penilaian internal, atau melibatkan transaksi derivatif dan lindung nilai. Selain itu, akun investasi dapat digunakan untuk menyembunyikan kerugian, memanipulasi pendapatan, atau memperbaiki tampilan posisi keuangan. Auditor perlu memahami risiko yang melekat pada investasi dan instrumen keuangan agar dapat merancang prosedur audit yang tepat. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan, reklasifikasi, penurunan nilai, pengakuan pendapatan, nilai wajar, dan pengungkapan. Semakin kompleks instrumen yang dimiliki entitas, semakin besar kebutuhan auditor untuk menggunakan prosedur lanjutan dan, dalam keadaan tertentu, melibatkan ahli penilaian.

1. Risiko Salah Saji Material pada Pengakuan dan Pengukuran Investasi

Risiko salah saji material pada pengakuan investasi dapat muncul ketika entitas mencatat investasi yang belum memenuhi kriteria pengakuan, tidak mencatat investasi yang sebenarnya telah dimiliki, atau salah menentukan tanggal pengakuan. Misalnya, pembelian surat berharga menjelang akhir periode dapat menimbulkan risiko cut-off apabila transaksi dicatat pada periode yang tidak tepat. Kesalahan ini dapat memengaruhi saldo investasi, kas, utang, serta pendapatan atau beban terkait. Risiko pengukuran juga menjadi perhatian penting. Investasi tertentu diukur berdasarkan biaya perolehan, biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kesalahan dalam menentukan kategori pengukuran dapat menyebabkan salah saji pada nilai tercatat investasi dan laba rugi periode berjalan. Apabila entitas salah mengklasifikasikan instrumen yang seharusnya diukur pada nilai

wajar menjadi biaya perolehan diamortisasi, laporan keuangan dapat gagal mencerminkan perubahan nilai ekonomi yang relevan (Dahlan et al., 2025).

Risiko lain berkaitan dengan pendapatan investasi. Pendapatan bunga, dividen, keuntungan penjualan investasi, dan perubahan nilai wajar harus diakui sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Manajemen dapat memiliki insentif untuk mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pengakuan kerugian. Oleh karena itu, auditor perlu menilai apakah pendapatan investasi telah dicatat dalam periode yang tepat dan didukung oleh bukti yang memadai. Risiko pengakuan dan pengukuran juga dapat meningkat apabila entitas memiliki investasi pada pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi berpotensi tidak dilakukan pada nilai wajar pasar dan dapat digunakan untuk mengalihkan laba, menyembunyikan kewajiban, atau memperbaiki posisi keuangan. Auditor perlu mengidentifikasi hubungan pihak berelasi dan menilai kewajaran transaksi yang terjadi.

2. Risiko Penilaian Wajar, Penurunan Nilai, dan Pengungkapan Instrumen Keuangan

Penilaian wajar merupakan salah satu area paling kompleks dalam audit instrumen keuangan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar aktif relatif lebih mudah dinilai karena tersedia harga kuotasian. Namun, instrumen yang tidak memiliki pasar aktif membutuhkan model valuasi, seperti diskonto arus kas, model opsi, atau pendekatan pasar yang menggunakan input pembanding. Model tersebut bergantung pada asumsi, seperti suku bunga, volatilitas, risiko kredit, proyeksi arus kas, dan tingkat diskonto. Risiko salah saji meningkat apabila asumsi yang digunakan manajemen tidak didukung oleh data yang andal. Manajemen dapat memilih asumsi optimistis untuk meningkatkan nilai aset atau menurunkan nilai liabilitas. Auditor harus menilai kewajaran asumsi, menguji data input, mengevaluasi metode valuasi, dan membandingkan hasil penilaian dengan informasi eksternal yang relevan.

Penurunan nilai juga menjadi area berisiko. Aset keuangan dapat mengalami penurunan nilai akibat memburuknya kemampuan pihak lawan membayar, perubahan kondisi pasar, penurunan peringkat kredit, atau penurunan nilai investasi secara signifikan. Risiko muncul ketika entitas tidak mengakui kerugian penurunan nilai secara tepat waktu atau menggunakan asumsi yang terlalu optimistis dalam menghitung cadangan kerugian.

Pengungkapan instrumen keuangan juga memiliki risiko salah saji material. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai risiko yang melekat pada instrumen keuangan, kebijakan manajemen risiko, nilai wajar, sensitivitas terhadap perubahan pasar, dan konsentrasi risiko kredit. Pengungkapan yang tidak lengkap dapat menyebabkan laporan keuangan kurang informatif dan tidak mencerminkan risiko ekonomi yang sebenarnya. Ringkasan risiko audit dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 12.2 Risiko Penilaian Wajar, Penurunan Nilai, dan Pengungkapan Instrumen Keuangan

Area Risiko	Bentuk Risiko Salah Saji	Implikasi Audit
Pengakuan	Investasi dicatat pada periode yang salah atau tidak memenuhi kriteria pengakuan	Auditor perlu menguji cut-off dan dokumen transaksi
Pengukuran	Kategori pengukuran tidak sesuai	Auditor perlu menilai klasifikasi dan dasar pengukuran
Nilai wajar	Asumsi valuasi tidak wajar	Auditor perlu menguji model, input, dan data pasar
Penurunan nilai	Kerugian tidak diakui tepat waktu	Auditor perlu menilai indikator dan perhitungan penurunan nilai
Pengungkapan	Risiko keuangan tidak dijelaskan secara memadai	Auditor perlu mengevaluasi kelengkapan catatan atas laporan keuangan

D. Prosedur Audit atas Investasi

Prosedur audit atas investasi dirancang untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan, kepemilikan, kelengkapan, penilaian, pendapatan, dan penurunan nilai investasi. Auditor perlu menyesuaikan prosedur dengan jenis investasi, tingkat risiko, materialitas, dan efektivitas pengendalian internal. Investasi yang bersifat sederhana, seperti deposito, dapat diuji dengan konfirmasi dan rekonsiliasi. Investasi kompleks, seperti penyertaan pada entitas asosiasi atau instrumen tidak diperdagangkan aktif, memerlukan prosedur yang lebih mendalam. Sebelum melakukan pengujian substantif, auditor perlu memahami kebijakan investasi entitas, prosedur otorisasi transaksi, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi, sistem pencatatan, serta pengendalian atas

penyimpanan dokumen kepemilikan. Pemahaman tersebut membantu auditor menentukan apakah risiko pengendalian tinggi atau rendah.

1. Pengujian Keberadaan, Kepemilikan, dan Kelengkapan Investasi

Pengujian keberadaan bertujuan memastikan bahwa investasi yang dicatat benar-benar ada pada tanggal pelaporan. Untuk investasi berupa deposito, auditor dapat melakukan konfirmasi langsung kepada bank. Untuk investasi berupa saham atau obligasi yang disimpan oleh kustodian, auditor dapat memperoleh konfirmasi dari kustodian. Untuk investasi yang berbentuk sertifikat fisik, auditor dapat melakukan inspeksi atas dokumen kepemilikan dan memastikan keaslian serta kesesuaiannya dengan catatan akuntansi. Pengujian kepemilikan bertujuan memastikan bahwa investasi merupakan hak entitas. Bukti kepemilikan dapat berupa sertifikat saham, kontrak pembelian, rekening efek, perjanjian deposito, surat konfirmasi bank, atau dokumen hukum lain. Auditor perlu memastikan bahwa investasi tidak dijaminkan, dibatasi penggunaannya, atau dimiliki atas nama pihak lain tanpa pengungkapan yang memadai. Pengujian kelengkapan bertujuan memastikan bahwa seluruh investasi yang dimiliki entitas telah dicatat dalam laporan keuangan. Risiko kelengkapan dapat muncul jika terdapat investasi yang sengaja tidak dicatat, transaksi pembelian yang belum dibukukan, atau saldo investasi yang tersimpan pada rekening di luar sistem utama. Auditor dapat menelusuri transaksi kas keluar, membaca risalah rapat direksi, memeriksa perjanjian investasi, dan menelaah rekening bank untuk mengidentifikasi investasi yang belum dicatat. Auditor juga perlu memperhatikan transaksi mendekati akhir periode. Pembelian atau penjualan investasi menjelang tanggal pelaporan harus diuji untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Pengujian cut-off dapat dilakukan dengan memeriksa tanggal transaksi, tanggal penyelesaian, dokumen transfer dana, dan konfirmasi pihak ketiga (Fitriandani & Sari, 2025).

2. Pengujian Penilaian, Pendapatan Investasi, dan Penurunan Nilai

Pengujian penilaian bertujuan memastikan bahwa investasi disajikan pada nilai yang sesuai dengan standar akuntansi. Untuk investasi yang diperdagangkan di pasar aktif, auditor dapat membandingkan nilai tercatat dengan harga kuotasian pada tanggal pelaporan. Untuk investasi yang tidak memiliki harga

pasar aktif, auditor perlu mengevaluasi metode penilaian yang digunakan manajemen. Apabila investasi diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, auditor perlu menguji perhitungan amortisasi, suku bunga efektif, dan jadwal penerimaan arus kas. Apabila investasi diukur pada nilai wajar, auditor perlu menilai keandalan sumber harga atau kewajaran model valuasi. Apabila investasi menggunakan metode ekuitas, auditor perlu menguji bagian laba rugi, perubahan ekuitas investee, dan penyesuaian yang diperlukan.

Pengujian pendapatan investasi mencakup pendapatan bunga, dividen, keuntungan penjualan, dan perubahan nilai wajar. Auditor harus menilai apakah pendapatan dicatat pada periode yang tepat dan didukung oleh bukti yang sah. Pendapatan bunga dapat diuji melalui perhitungan ulang berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu investasi. Dividen dapat diuji melalui pengumuman pembagian dividen dan bukti penerimaan. Keuntungan atau kerugian penjualan investasi dapat diuji dengan membandingkan harga jual, nilai tercatat, dan biaya transaksi. Pengujian penurunan nilai dilakukan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa nilai investasi tidak dapat dipulihkan. Indikasi tersebut dapat berupa penurunan harga pasar secara signifikan, kesulitan keuangan pihak penerbit, gagal bayar bunga atau pokok, perubahan kondisi ekonomi, atau penurunan kinerja entitas tempat investasi dilakukan. Auditor perlu mengevaluasi analisis manajemen atas penurunan nilai dan menguji asumsi yang digunakan dalam perhitungan.

E. Prosedur Audit atas Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan memiliki tingkat kompleksitas yang bervariasi. Instrumen sederhana, seperti piutang dan utang usaha, relatif mudah diaudit karena memiliki bukti transaksi yang jelas. Namun, instrumen kompleks, seperti derivatif, kontrak opsi, swap, dan transaksi lindung nilai, membutuhkan pemahaman teknis yang lebih mendalam. Auditor perlu menilai apakah pengakuan, pengukuran, reklasifikasi, nilai wajar, dan pengungkapan telah sesuai dengan standar akuntansi. Dalam audit instrumen keuangan, auditor harus memahami tujuan manajemen menggunakan instrumen tersebut. Instrumen keuangan dapat digunakan untuk tujuan pendanaan, investasi, perdagangan, atau lindung nilai. Tujuan penggunaan memengaruhi perlakuan akuntansi dan risiko audit. Oleh karena itu, auditor perlu memperoleh pemahaman mengenai kebijakan

manajemen risiko, strategi pendanaan, dan aktivitas *treasury* entitas (Dahlan et al., 2025).

1. Audit atas Pengakuan, Pengukuran, dan Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Audit atas pengakuan instrumen keuangan dimulai dengan menilai apakah suatu kontrak memenuhi definisi aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas. Auditor perlu membaca kontrak, perjanjian pinjaman, perjanjian derivatif, dokumen penerbitan obligasi, dan dokumen transaksi lain untuk memahami hak serta kewajiban yang timbul. Pengukuran instrumen keuangan harus diuji sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memerlukan pengujian atas suku bunga efektif, arus kas kontraktual, amortisasi diskonto atau premi, dan pengakuan pendapatan atau beban bunga. Instrumen yang diukur pada nilai wajar memerlukan pengujian atas harga pasar, model valuasi, dan input penilaian.

Reklasifikasi instrumen keuangan perlu mendapat perhatian khusus karena dapat memengaruhi laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan nilai tercatat aset atau liabilitas. Auditor harus menilai apakah reklasifikasi dilakukan berdasarkan perubahan model bisnis yang sah, bukan semata-mata untuk mencapai hasil pelaporan tertentu. Dokumen kebijakan manajemen, persetujuan direksi, dan bukti perubahan strategi pengelolaan aset dapat digunakan untuk mendukung evaluasi auditor. Auditor juga perlu menguji penghentian pengakuan instrumen keuangan. Suatu aset keuangan dapat dihentikan pengakuannya apabila hak kontraktual atas arus kas berakhir atau entitas mentransfer hak tersebut dengan memenuhi kriteria tertentu. Kesalahan penghentian pengakuan dapat menyebabkan aset atau liabilitas tidak disajikan secara tepat.

2. Audit atas Nilai Wajar, Derivatif, dan Transaksi Lindung Nilai

Audit atas nilai wajar membutuhkan prosedur yang cermat karena nilai wajar dapat dipengaruhi oleh data pasar, asumsi internal, dan teknik penilaian. Auditor perlu menilai apakah nilai wajar ditentukan menggunakan hierarki input yang sesuai. Harga kuotasian di pasar aktif umumnya memiliki keandalan tinggi. Input yang dapat diobservasi, seperti suku bunga pasar dan kurva imbal hasil, memiliki tingkat keandalan menengah. Input tidak dapat diobservasi memerlukan perhatian lebih besar karena sangat bergantung pada asumsi manajemen. Derivatif merupakan

instrumen keuangan yang nilainya berubah mengikuti variabel dasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, atau harga saham. Derivatif dapat digunakan untuk tujuan perdagangan atau lindung nilai. Risiko audit derivatif tinggi karena kontraknya kompleks, nilai wajarnya dapat berubah cepat, dan transaksi dapat dilakukan di luar neraca apabila pencatatan tidak memadai. Auditor perlu mengidentifikasi seluruh kontrak derivatif yang dimiliki entitas. Prosedur dapat mencakup konfirmasi kepada bank atau pihak lawan, pembacaan kontrak, telaah aktivitas treasury, dan pemeriksaan transaksi valuta asing atau suku bunga. Setelah kontrak diidentifikasi, auditor perlu menguji nilai wajar derivatif dan pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul. Transaksi lindung nilai memerlukan evaluasi tambahan. Entitas yang menerapkan akuntansi lindung nilai harus memenuhi syarat dokumentasi, hubungan lindung nilai, efektivitas lindung nilai, dan perlakuan akuntansi yang sesuai. Auditor perlu menilai apakah hubungan antara item yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai telah didokumentasikan sejak awal. Selain itu, auditor perlu mengevaluasi apakah lindung nilai efektif dalam mengurangi risiko yang dimaksud. Prosedur audit atas instrumen keuangan kompleks dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 12.2. Audit atas Nilai Wajar, Derivatif, dan Transaksi Lindung Nilai

Area Audit	Prosedur yang Dapat Dilakukan	Tujuan Pemeriksaan
Pengakuan	Membaca kontrak dan dokumen transaksi	Menilai hak dan kewajiban kontraktual
Pengukuran	Menguji perhitungan biaya diamortisasi atau nilai wajar	Menilai kewajaran nilai tercatat
Reklasifikasi	Menelaah perubahan model bisnis	Menilai ketepatan perubahan klasifikasi
Derivatif	Konfirmasi kepada pihak lawan dan uji valuasi	Memastikan keberadaan dan nilai wajar
Lindung nilai	Evaluasi dokumentasi dan efektivitas	Menilai kelayakan akuntansi lindung nilai

Dalam beberapa keadaan, auditor dapat menggunakan ahli penilaian untuk membantu mengevaluasi model dan asumsi nilai wajar. Namun, penggunaan ahli tidak menghilangkan tanggung jawab auditor. Auditor tetap harus memahami pekerjaan ahli, menilai kompetensi dan objektivitas ahli, serta mengevaluasi apakah hasil pekerjaan ahli dapat digunakan sebagai bukti audit.

F. Penyajian, Pengungkapan, dan Kesimpulan Audit

Penyajian dan pengungkapan merupakan tahap penting dalam audit investasi dan instrumen keuangan. Akun investasi dan instrumen keuangan tidak cukup hanya dicatat dengan benar, tetapi juga harus disajikan dan diungkapkan secara memadai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sifat, nilai, risiko, dan dampak ekonominya. Pengungkapan yang baik memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi, klasifikasi instrumen, nilai wajar, risiko keuangan, dan manajemen risiko. Dalam tahap akhir audit, auditor mengevaluasi seluruh bukti yang diperoleh untuk merumuskan temuan, menyusun dokumentasi, dan menentukan dampaknya terhadap opini audit. Jika terdapat salah saji material yang tidak dikoreksi atau pembatasan lingkup audit yang signifikan, auditor harus mempertimbangkan modifikasi opini sesuai dengan standar audit yang berlaku.

1. Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Investasi serta Instrumen Keuangan

Evaluasi penyajian dilakukan untuk memastikan bahwa investasi dan instrumen keuangan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Investasi jangka pendek harus dipisahkan dari investasi jangka panjang apabila perbedaan tersebut relevan. Aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas harus disajikan sesuai substansi kontrak.

Auditor perlu mengevaluasi apakah keuntungan dan kerugian dari instrumen keuangan disajikan pada pos yang tepat. Perubahan nilai wajar tertentu dapat diakui dalam laba rugi, sedangkan perubahan lain dapat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Kesalahan penyajian dapat memengaruhi pemahaman pengguna laporan mengenai kinerja keuangan entitas (Kurniawati et al., 2025).

Pengungkapan harus mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Selain itu, entitas perlu mengungkapkan informasi mengenai nilai wajar, metode penilaian, asumsi signifikan, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan strategi manajemen risiko. Untuk instrumen derivatif dan lindung nilai, pengungkapan perlu menjelaskan tujuan penggunaan instrumen, risiko yang dilindungi, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Auditor

harus membandingkan pengungkapan yang disajikan dengan persyaratan standar akuntansi. Apabila terdapat informasi penting yang belum diungkapkan, auditor perlu meminta manajemen melakukan penyesuaian atau penambahan catatan. Pengungkapan yang tidak memadai dapat menjadi salah saji material apabila informasi tersebut penting bagi keputusan pengguna laporan.

2. Perumusan Temuan, Dokumentasi, dan Opini Audit atas Instrumen Keuangan

Perumusan temuan audit dilakukan setelah auditor mengevaluasi hasil seluruh prosedur. Temuan dapat berkaitan dengan salah klasifikasi instrumen, kesalahan nilai wajar, pengakuan pendapatan yang tidak tepat, penurunan nilai yang belum dicatat, atau pengungkapan risiko yang tidak memadai. Auditor perlu menilai apakah temuan bersifat material secara individual atau agregat. Dokumentasi audit menjadi bukti bahwa auditor telah melaksanakan prosedur sesuai standar. Dokumentasi atas investasi dan instrumen keuangan harus mencakup pemahaman atas instrumen, penilaian risiko, prosedur pengujian, bukti yang diperoleh, pertimbangan profesional, hasil evaluasi nilai wajar, komunikasi dengan manajemen, serta kesimpulan auditor. Untuk instrumen kompleks, dokumentasi perlu lebih rinci karena melibatkan pertimbangan signifikan dan estimasi akuntansi.

Apabila auditor menemukan salah saji, manajemen perlu diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi. Jika manajemen melakukan koreksi dan laporan keuangan menjadi wajar, auditor dapat melanjutkan pertimbangan opini tanpa modifikasi. Namun, apabila salah saji material tidak dikoreksi, auditor harus mempertimbangkan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, bergantung pada tingkat materialitas dan pervasivitas salah saji. Pembatasan lingkup juga dapat memengaruhi opini audit. Contohnya, auditor tidak dapat memperoleh konfirmasi atas investasi material, tidak dapat mengakses dokumen kontrak derivatif, atau tidak dapat mengevaluasi model nilai wajar karena data pendukung tidak tersedia. Jika bukti alternatif tidak cukup, auditor perlu mempertimbangkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak menyatakan pendapat. Kesimpulan audit atas investasi dan instrumen keuangan harus didasarkan pada bukti audit yang cukup dan tepat. Auditor perlu memastikan bahwa seluruh asersi signifikan telah diuji secara memadai. Area dengan risiko tinggi, seperti nilai wajar, derivatif, penurunan nilai, dan lindung nilai, harus memperoleh perhatian khusus.

Dengan demikian, opini audit yang diberikan dapat mencerminkan kewajaran laporan keuangan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

JAWABARA

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. (2011). Penerapan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) dan perubahan yang harus dilakukan perusahaan. *Bina Ekonomi*, 15(1).
- Dahlan, H., Mustianti, M., Afika, N., Juliasti, R. A., & Siduppa, R. N. (2025). Perspektif audit: Optimalisasi manajemen arus kas dan instrumen keuangan. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10(2), 300–313.
- Fitriandani, S., & Sari, R. P. (2025). Dari prosedur ke praktik: Audit kas dan setara kas. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)*, 3(1).
- Knechel, W. R., & Salterio, S. (2016). *Auditing: Assurance and risk*. Taylor & Francis.
- Kumar, R., & Sharma, V. (2015). *Auditing: Principles and practice*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Kurniawati, A., Syafadan, A., & Al Hamiid, G. (2025). Pengungkapan dan penyajian laporan keuangan suatu tanggung jawab etis. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1880–1893.
- Montgomery, R. H. (1927). *Auditing theory and practice*. Ronald Press Company.

TENTANG PENULIS



Dr. Puji Setya Sunarka, S.Pd., S.E., M.Si.

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Demak, 14 September 1986, setelah menempuh pendidikan dan lulus dari SMA Negeri 1 Mijen Demak penulis melanjutkan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2008, gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Cendekia Karya Utama Semarang tahun 2016, gelar Magister Sains Akuntansi dari STIE

Dharmaputra Semarang tahun 2016 serta memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Universitas Merdeka Malang tahun 2026. Penulis merupakan dosen tetap prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, tutor Online Universitas Terbuka dan juga merupakan Trainer Akuntansi Keuangan dan Perpajakan di beberapa lembaga diantaranya SAKIRA education, training center dan LKP Linggamas. Penulis juga aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan.

JANVARA

BAB 13



AUDIT ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD

Arlina Ginting, S.E., M.Si.
Universitas Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Dalam suatu perusahaan kekayaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan kelangsungan suatu perusahaan. Pentingnya aset dalam perusahaan menandakan bahwa suatu perusahaan itu mencapai pertumbuhan yang tinggi atau sebaliknya mengalami penurunan. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Di sisi lain kepemilikan kekayaan perusahaan harus dikelola dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar laporan yang dihasilkan dapat dibaca dan memberikan informasi yang benar sehingga tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. Aset dalam PSAK 16 adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memberikan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

Audit merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengakumulasi dan evaluasi bukti dan informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat hubungan antara informasi dan kriteria yang

ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Dalam melakukan audit, harus ada informasi yang dapat diverifikasi dan standar (kriteria) sehingga auditor dapat mengevaluasi informasi. Pemeriksaan akuntansi dapat dilakukan oleh auditor intern ataupun auditor ekstern dengan mengetahui terlebih dahulu tujuan perusahaan dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit ekstern disebut juga sebagai auditor yang independen dalam melaksanakan pemeriksaan dan menerima fee atas pemeriksaan yang dilakukannya, namun mereka biasanya cukup independen dalam melaksanakan audit sampai tahap akhir dari proses auditing dengan menyiapkan laporan audit untuk mengkomunikasikan hasil temuan kepada pengguna atau pemilik. Audit laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko informasi. Melalui audit independen, para pengguna akan memperoleh informasi yang andal dimana manajemen perusahaan memberikan tugas ke auditor untuk memberikan asurans bagi para pengguna bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Di sisi lain audit intern dipekerjakan oleh perusahaan atau pemilik untuk mengaudit dan langsung melaporkannya kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi informasi tergantung pada informasi yang diaudit. Kriteria yang digunakan adalah kerangka terintegrasi pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*). Biasanya auditor dan perusahaan telah menyetujui kriteria yang digunakan sebelum audit dimulai.

B. Proses Pemeriksaan

Proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengujian Audit

Tahap awal proses pemeriksaan mencakup perencanaan dan perancangan pendekatan audit, kemudian dilanjutkan dengan pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi.

- a. Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan
- b. Melakukan kunjungan ke tempat klienn
- c. Mengajukan proposal audit kepada klien
- d. Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien

- e. Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan
- f. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh
- g. Pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi (*test and transaction*) terdiri dari:
- h. Pengujian substantif atas transaksi (*substantive test*) yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk rupiah yang mempengaruhi penyajian saldo - saldo laporan keuangan yang wajar
- i. Pengujian pengendalian (*test of control*) yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Analitis dan Penyelesaian Audit

Setelah pengujian awal, auditor melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo, kemudian menyelesaikan audit serta mengomunikasikan hasilnya.

- a. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balances*). Prosedur ini mencakup:
- b. Perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan.
- c. Pengujian terinci atas saldo (*test of detail of balance*) berfokus pada saldo akhir buku besar baik pos neraca maupun laba rugi dan lebih ditekankan pada pengujian terinci atas saldo neraca
- d. Penyelesaian audit (*Complete and Audit*) mencakup:
- e. Menelaah kewajiban bersyarat
- f. Menelaah peristiwa kemudian
- g. Mendapatkan bahan bukti akhir,
- h. Mengisi daftar periksa audit
- i. Menyiapkan surat manajemen
- j. Menerbitkan laporan audit
- k. Mengomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen

C. Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap serta Aset Tidak Berwujud

Bagian ini menguraikan definisi dan klasifikasi aset tetap serta aset tidak berwujud sebagai dasar untuk memahami perlakuan akuntansi dan pemeriksaannya.

1. Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

Sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari aset yang merupakan sumber daya yang dikendalikan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Menurut Manik dan Firdaus (2024) aset tetap diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aset tetap berwujud (tangible assets)
Aset ini memiliki bentuk fisik dan dapat diamati dengan suatu alat atau lebih dan memberikan karakteristik umum dengan memberikan manfaat ekonomis pada masa mendatang bagi perusahaan. Contohnya tanah, bangunan, peralatan dan kendaraan.
- b. Aset tidak berwujud (Intangible assets)
Aset ini merupakan aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya dan di dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain Anasta et. al, (2023). Contoh dari aset tidak berwujud hak cipta, paten. Hak eksklusif yang memungkinkan seseorang untuk menjual, memberi izin atau mengendalikan pekerjaannya merk dagang, goodwill. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan karena memiliki nilai signifikan serta umur manfaat yang panjang. Keberadaan aset tetap mendukung kegiatan operasional baik disektor produksi, distribusi, maupun pelayanan. Di Indonesia standar yang mengatur laporan keuangan adalah IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Menurut PSAK 216 paragraf 6 efektif (2024) menyatakan aset tetap adalah: aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif serta digunakan selama lebih dari satu periode

Selain itu Mayasari et al (2023) berpendapat aset tetap (*fixed asset*) adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan tetapi tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap juga disebutkan oleh Kieso, et al. (2018) sebagai aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain dan dapat digunakan lebih dari satu tahun dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Di lain sisi aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat,

Hal ini tertuang di dalam PSAK 19, (2018) yang membahas tentang aset tak berwujud, dimana aset ini membahas kas milik perusahaan, maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang nantinya menjadi aset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti. Khusnudin, (2020) aset tak berwujud memiliki nilai jangka panjang atau aset intelektual, kekayaan intelektual, modal pengetahuan dan intelektual yang bermanfaat juga bagi perusahaan dan tidak untuk dijual serta tidak terlihat secara fisik. Aset tidak berwujud ini berbentuk hak paten, hak cipta, hak eksklusif, goodwill, merk dagang. Dengan begitu, yang dikembangkan menjadi kreativitas, inovasi, profesionalisme dan loyalitas. Klasifikasi aset tetap dan aset tak berwujud

Klasifikasi aset tetap

Berdasarkan PSAK 16 klasifikasi aset tetap berupa:

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Mesin
- d. Kapal
- e. Pesawat udara
- f. Kendaraan bermotor
- g. Peralatan kantor
- h. Perabotan

Klasifikasi di atas berdasarkan kelas. dimana suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas.

2. Definisi dan Klasifikasi Aset Tidak Berwujud

Klasifikasi aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari:

- a. **Hak Paten.** Hak ini merupakan hak eksklusif seseorang karena menemukan untuk menciptakan dalam jangka waktu tertentu
- b. **Hak cipta.** Hak ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menjual, mengelola dan menerbitkan ciptaan yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kontrak yang berlaku
- c. **Merk dagang.** Merk dagang adalah merk yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan. berupa logo, yang mewakili perusahaan tertentu desain, symbol.
- d. **Franchise.** Adalah waralaba yang memberikan akses kepada penerima (waralaba). Franchise biasanya diperoleh dengan membayar biaya awal dan tahunan

- e. **Goodwill.** Atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan bagi Perusahaan. Goodwill terjadi Ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain
- f. **Leasehold.** Adalah hak untuk memperoleh dari suatu barang tertentu seperti sewa usaha, sewa Gedung, sewa mesin yang biasanya memakan waktu tertentu dan diaktakan oleh notaris, yang artinya aktiva tetap (*intangible*) hak sewa memberikan kontribusi nyata kepada Perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kepemilikan hak sewa dihasilkan oleh perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

D. Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Penghentian, Pengungkapan, dan Penyajian

Pengakuan dan pengukuran aset perlu dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar jumlah tercatat dan informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan.

1. Aset Tetap

Aset tetap diakui sebagai aset sebagaimana yang tercatat di dalam PSAK 16 paragraf 7 penyesuaian (2015) efektif (2023) jika:

Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan mengalir ke entitas Biaya perolehannya dapat diukur secara andal, dimana biaya perolehan mencakup harga beli dan biaya terkait langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan. Penjelasan lain mengenai pengakuan aset ini dapat kita lihat pada penjelasan yang dikemukakan oleh Kieso et al., (2011) dalam buku *Intermediate Accounting* “Companies recognize property, plant, and equipment when the cost of the aset can be measured reliably and it is probable that the company will obtain future economic benefits”.

Dijelaskan dalam PSAK 16 paragraf 11 – 14 bahwa biaya perolehan awal dan selanjutnya adalah sebagai berikut: Biaya perolehan awal aset tetap dapat diperoleh dengan alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap itu walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset tetap yang ada, dan diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset lain. Biaya selanjutnya entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya, Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Pernyataan ini sesuai dengan

prinsip pengakuan di paragraf 7. Tujuan pengeluaran ini sering di deskripsikan sebagai perbaikan dan pemeliharaan aset tetap.

Pengukuran aset tetap

Pengukuran awal pada saat perolehan sesuai dengan standar terbaru PSAK 216 efektif (2024). Paragraf 15 aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Pengukuran aset tertera di dalam paragraf 16 dilakukan dalam 2 (dua) tahap utama yaitu: saat pengukuran awal dan setelah pengukuran awal.

Pengukuran awal aset tetap diukur dengan komponen sebagai berikut:

Diukur padanilai wajar sebesar biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain contohnya biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk atau jasa baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, biaya administrasi dan biaya overhead umum lain. Komponen biaya: yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen

Contohnya: sesuai dengan PSAK 219 biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan. biaya pengujian apakah aset berfungsi dengan baik, fee professional. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul Ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut

Pengukuran setelah pengakuan aset tetap paragraf 30-31 mengakui adanya 2 metode yaitu;

Metode biaya: aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai paragraf 30. Metode Revaluasi: setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Penyusutan aset tetap

Sebagai suatu aset yang mengalami penurunan dan penyusutan. Penyusutan aset tetap pada revisi terbaru PSAK 16 adalah lokasi sistematis jumlah tersusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya, dimulai saat aset siap digunakan. Beberapa metode penyusutan digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode itu antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Dari metode penyusutan yang ada maka entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset dan diterapkan secara konsisten dari period ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut, Metode ini tertuang di dalam PSAK 216 paragraf 62

- **Penghentian pengakuan**

Entitas dapat menghentikan pengakuan aset tetap jika Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasannya. Ketika aset tetap tadi tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasannya, Hal ini tercantum pada PSAK 16/216 paragraf 67. Keuntungan dan kerugian yang timbul akibat dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan ke dalam laba rugi Ketika aset tetap itu dihentikan penggunaannya. Contohnya dijual, disewakan PSAK 16/216 paragraf 68. Ada beberapa contoh dari penngakuan pelepasan aset tetap antara lain: dijual, disewakan atau disumbangkan. Bila keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan pengakuan aset tetap sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan netto, jika ada dan jumlah tercatatnya.

Pengungkapan dan penyajian aset tetap

Aset tetap salah satu jenis aset yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 16/216 paragraf 73 - 74 IAI (2014) laporan keuangan mengungkapkan untuk kelas aset tetap antara lain:

- a. Dasar pengukuran digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode

- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukan:
- f. Penambahan
- g. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105
- h. Perolehan melalui kombinasi bisnis

Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39 dan 40 serta rugi penurunan nilai diakui dengan penghasilan komprehensif sesuai dengan PSAK 236

- a. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 236
- b. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi
- c. Depresiasi
- d. Selisih kurs neto
- e. Perubahan lain
- f. Keberadaan atas jumlah pembatasan hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas
- g. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi
- h. Jumlah komitmen kontraktual untuk mendapatkan aset tetap

Apabila tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya maka jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi. Di sisi lain terdapat beberapa tambahan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan entitas jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian yang diisyaratkan dalam PSAK 113: pengukuran nilai wajar. Pernyataan tambahan ini dinyatakan dalam PSAK 16/216 paragraf 77. Perlu ditambahkan dalam penyajian aset tetap ada beberapa kriteria aset yang disajikan sebagai aset lancar sesuai dengan PSAK 1 paragraf 6 yaitu;

- a. Aset yang dimiliki Perusahaan ditujukan untuk diperdagangkan
- b. Aset diperkirakan akan direalisasikan atau digunakan dalam operasi normal entitas
- c. Aset akan diperkirakan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan
- d. Aset merupakan kas atau setara kas

Dari beberapa kriteria aset di atas dapat disimpulkan bahwa aset lain yang tidak memenuhi kriteria di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2. Aset Tidak Berwujud

Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud atau *intangible asset* adalah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat, sehingga aset non moneter adalah kas milik perusahaan, maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian akan menjadi aset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti PSAK 19 (2018). Menurut Khusnudin (2020) aset tak berwujud mempunyai nilai jangka panjang dan juga disebut aset intelektual, kekayaan intelektual dan modal intelektual. Terdapat kriteria pengakuan khusus untuk aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Semua biaya riset dibebankan sebagai pengeluaran pada saat terjadinya. Biaya pengembangan hanya dikapitalisasi setelah kelayakan teknis dan komersial dari produk atau layanan yang dihasilkan telah ditetapkan. Goodwill, merek, logo, judul penerbitan, daftar pelanggan, biaya awal, biaya pelatihan, biaya iklan, dan biaya relokasi yang dihasilkan secara internal tidak pernah diakui sebagai aset. Jika suatu item tak berwujud tidak memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, biaya tersebut diakui sebagai pengeluaran pada saat terjadinya.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan pengakuan aset tidak berwujud menurut IAS 38 (2016) dan PSAK 19 (2018) bahwa aset tidak berwujud menunjukkan bahwa aset tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dengan kriteria pengakuan dan pengukuran sebagai berikut: Dilihat dari model biaya setelah pengakuan awal aset tak berwujud dapat dicatat dengan biaya perolehan dikurangi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dilihat dari model revaluasi, setelah pengakuan awal aset tak berwujud dapat dicatat dengan jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Pengungkapan dan penyajian aset tak berwujud

Menurut IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) bahwa entitas harus mengungkapkan yang harus dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lain, yaitu umur manfaat tidak terbatas dan terbatas, metode amortisasi, jumlah bruto yang tercatat serta akumulasi amortisasi awal dan akhir periode, pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, serta rekonsiliasi atas jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode. Selain itu suatu entitas juga harus mengungkapkan

- a. Aset tak berwujud yang diprediksi akan memiliki masa manfaat, jumlah tercatat aset yang tidak terbatas, serta penjelasan yang mendukung penilaian masa manfaat tidak terbatas.
- b. Deskripsi, jumlah yang tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud individual yang material bagi laporan keuangan entitas.
- c. Aset tak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan pada awalnya diakui padanilai wajar.
- d. Jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tidak berwujud.

Dari penjelasan yang telah diuraikan menjelaskan bahwa aset tak berwujud disajikan di posisi laporan keuangan (neraca) umumnya disajikan di posisi tidak lancar sesuai PSAK 19 revisi (2015)

E. Prosedur Pemeriksaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Prosedur pemeriksaan dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai keberadaan, kepemilikan, penilaian, penyajian, serta pengungkapan aset.

1. Prosedur Audit Aset Tetap

Pada umumnya kebanyakan di setiap Perusahaan, terutama Perusahaan industri aset tetap merupakan jumlah yang sangat besar dari total aset perusahaan. Waktu yang digunakan akuntan publik untuk memeriksa aset biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan seperti piutang, persediaan dan lain-lain. Ada beberapa penyebabnya antara lain:

- a. Harga perolehan per unit dari aset tetap biasanya relative besar dan jumlah transaksinya dalam setahun biasanya sedikit
- b. Mutasi aset tetap (penambahan dan pengurangan) biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan
- c. Dalam memeriksa aset tetap, prosedur cut-off bukan merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atas cut-off transactions dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan persediaan. Prosedur audit berikut ini berlaku untuk repeat engagements (penugasan berulang) sehingga menitikberatkan pada pemeriksaan transaksi tahun berjalan (periode yang diperiksa)

Audit pertama kali bisa dibedakan sebagai berikut: Apabila tahun sebelumnya Perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Apabila tahun sebelumnya Perusahaan belum pernah diaudit, akuntan publik harus memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sejak awal berdirinya Perusahaan, untuk mengetahui apakah pencatatan yang dilakukan Perusahaan untuk penambahan dan pengurangan aset tetap, serta metode perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK/ETAP/IFRS). Adapun prosedur audit aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Siapkan skedul utama sehubungan dengan audit aset tetap
Minta “daftar aset tetap” (*list of fixed assets*) yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan beserta nilai bukunya, Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan, apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar.
Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, misalnya:
- b. Mutasi penambahan
Penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemilikinya. Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan persetujuannya, sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli terutama dari Perusahaan afiliasi/hubungan Istimewa, faktur pembelian, surat kontrak serta bukti pembayarannya; dan bila dibangun sendiri ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan. Lakukan konfirmasi mengenai “title of Ownership” atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditor
- c. Mutasi pengurangan
Untuk pengurangan (penjualan dan penghapusan) perhatikan apakah akun akumulasi penyusutannya telah di debit sebagaimana seharusnya serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga

jualnya. Apabila ada “construction in progress”, telaah biaya yang dibebankan. Apabila Pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan persentase penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Apakah ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha (leasing), bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut, telaah apakah pencatatan sudah sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 30 bandingkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham Perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Bila Perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap minta daftar penilaiannya. Teliti dasar penilaiannya, apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu PSAK 16.

Mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif

Pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan dan perlakuan atas aset tetap yang using. Minta surat ketetapan dari kpp yang bersangkutan apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Lakukan “reasonableness test” atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan Perusahaan, dengan melakukan secara per golongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya

Apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal Perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi, lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat Perusahaan dalam keadaan tersibuk dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap

Perusahaan yang menganggur (*idle capacity*), perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk:

- a. Aset tetap yang di revaluasi
- b. Aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditor
- c. Bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
- d. Aset tetap dalam sewa guna usaha
- e. Aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian
- f. Aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha
- g. Perubahan kebijakan akuntansi aset tetap dari tahun sebelumnya

Aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas Keputusan pengadilannya. Pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa misalnya kebakaran, gempa bumi dan lain-lain

Tujuan perpajakan

Minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan

Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu, jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal, serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut.

- a. Catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien (*Client representation letter*), surat manajemen (*management letter*), serta hal-hal yang perlu perhatian partner.

2. Prosedur Audit Aset Tidak Berwujud

Adapun prosedur pemeriksaan aset tak berwujud adalah:

- a. Pelajari dan evaluasi internal control atas aset tak berwujud
- b. Minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan posisi laporan keuangan neraca antara lain menunjukkan
- c. Saldo awal, penambahan, amortisasi dan penghapusan serta saldo akhir
- d. Cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar, lalu check footing dan cross footing
- e. Periksa penambahan aset tak berwujud
- f. Apakah diotorisasi pejabat yang berwenang

- g. Periksa notulen rapat direksi/ pemegang saham untuk mengetahui apakah otorisasi tersebut diberikan melalui rapat tersebut
- h. Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti pendukungnya
- i. Periksa amortisasi dan penghapusan bila ada aset tak berwujud. Periksa apakah amortisasi dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia PSAK/ETAP/IFRS dan perhitungannya akurat. Bila ada aset tak berwujud yang dihapuskan otorisasi dengan pejabat yang berwenang
- j. Periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise yang dimiliki Perusahaan. Periksa apakah pendapatan dari perjanjian tersebut sudah dicatat dan diterima oleh Perusahaan
- k. Periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia ETAP/PSAK/IFRS

F. Simpulan

Audit aset tetap dan aset tidak berwujud merupakan bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan karena kedua kelompok aset tersebut dapat memiliki nilai yang signifikan dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Pemeriksaan perlu diawali dengan pemahaman atas proses audit, definisi dan klasifikasi aset, serta ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan atau amortisasi, penghentian pengakuan, pengungkapan, dan penyajian. Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa, penyewaan, atau kegiatan administratif selama lebih dari satu periode. Aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter teridentifikasi tanpa bentuk fisik. Kedua kelompok aset diakui apabila manfaat ekonomi masa depan diperkirakan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Setelah pengakuan awal, entitas menerapkan model pengukuran yang sesuai dan mengungkapkan informasi material dalam laporan keuangan. Auditor perlu mengevaluasi pengendalian internal, memeriksa bukti perolehan dan pelepasan, menguji perhitungan penyusutan atau amortisasi, menilai indikasi penurunan nilai, serta memastikan kesesuaian penyajian dan pengungkapan dengan standar akuntansi keuangan.

Dokumentasi yang memadai, otorisasi pejabat berwenang, rekonsiliasi dengan buku besar, dan observasi fisik menjadi dasar penting untuk mendukung kesimpulan audit.

JAWAB

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16: Aset tetap (Penyesuaian 2015)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar akuntansi keuangan efektif per 1 Januari 2023*.
- Khusnudin. (2020). *Intangible asset dalam pengembangan bisnis perspektif ekonomi syariah*. Literasi Nusantara.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting: IFRS edition* (3rd ed.). Wiley.
- Manik, M. N., & Firdaus, R. (2024). Transformasi akuntansi syariah di era digital: Peluang dan tantangan bagi lembaga keuangan Islam. *Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(6), 46–54.
- Manurung, D. U., Samosir, H. E. S., & Siringo Ringo, M. J. (2025). Analisis penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK No. 216 pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2054–2058. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15342>
- Renaldo, R., Irawan, I., & Makhsun, A. (2024). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 216 di Yayasan RMS. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 240–251. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.413>
- Sari, Y. (2023). Fixed assets information system at PT PLN (Persero) North Sumatra. *International Journal of Mechanical Computational and Manufacturing Research*, 12(1), 16–23.

PROFIL PENULIS



Arlina Ginting, S.E., M.Si.
Universitas Sumatera Utara

Penulis lahir di Medan, 20 Mei 1976. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Program Studi Strata 1 Ekonomi Akuntansi lulus tahun 1999, Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister Ekonomi dan Bisnis Akuntansi konsentrasi akuntansi sektor publik di Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2024. Saat ini penulis merupakan salah satu pengajar tutor di Universitas Terbuka dan pengajar di pengajar di Fun Teacher dengan mata kuliah akuntansi keuangan, penulis pernah bekerja di kantor akuntan Drs. Yanuar Mulyana sebagai staff audit, sampai tahun 2006, PT.Astajaya Nirwighnata sebagai Accounting dan pajak sampai tahun 2010, Peruri Divisi Barat sebagai salah satu anak perusahaan BUMN sebagai Supervisor Akuntansi, Keuangan dan Pajak sampai tahun 2017 berkedudukan di Medan Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

BAB 14



AUDIT KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Widiya Pratiwi, M.Ak
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

A. Konsep Dasar Audit Kewajiban dan Ekuitas

Audit kewajiban dan ekuitas merupakan bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan karena kedua unsur tersebut menggambarkan sumber pendanaan entitas. Kewajiban menunjukkan adanya tanggung jawab ekonomi entitas kepada pihak luar, sedangkan ekuitas menunjukkan hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban. Keduanya memiliki hubungan erat dengan struktur keuangan, kemampuan entitas memenuhi kewajiban, kelangsungan usaha, serta kepentingan pemilik modal. Dalam praktik audit, kewajiban memiliki risiko khusus karena manajemen dapat memiliki insentif untuk tidak mencatat kewajiban secara lengkap. Penghilangan atau penundaan pengakuan kewajiban dapat menyebabkan posisi keuangan tampak lebih baik daripada keadaan sebenarnya. Di sisi lain, ekuitas juga memerlukan perhatian karena berkaitan dengan transaksi modal, pembagian dividen, laba ditahan, perubahan struktur kepemilikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum maupun anggaran dasar entitas. Audit atas kewajiban dan ekuitas tidak hanya bertujuan memeriksa angka dalam laporan posisi keuangan. Pemeriksaan juga mencakup penilaian terhadap kelengkapan pencatatan, keakuratan pengukuran, ketepatan

klasifikasi, kecukupan pengungkapan, serta kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, auditor perlu memahami sifat kewajiban dan ekuitas, risiko audit yang melekat, serta prosedur yang relevan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat (Kumar & Sharma, 2015).

1. Pengertian Audit Kewajiban dan Ekuitas

Audit kewajiban dan ekuitas adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap akun-akun kewajiban dan ekuitas dalam laporan keuangan untuk menilai apakah akun tersebut telah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Audit ini dilakukan berdasarkan standar audit dan menggunakan bukti audit sebagai dasar penarikan kesimpulan. Kewajiban merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat timbul dari transaksi pembelian kredit, pinjaman bank, penerbitan obligasi, kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, utang sewa, provisi, dan berbagai kontrak lain yang menimbulkan tanggung jawab pembayaran atau penyerahan manfaat ekonomi. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Komponen ekuitas dapat meliputi modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, komponen penghasilan komprehensif lain, saham treasuri, serta unsur ekuitas lain sesuai bentuk badan usaha. Dalam audit, ekuitas tidak hanya dilihat sebagai angka sisa dari aset dikurangi kewajiban, tetapi juga sebagai bagian yang mencerminkan hubungan hukum dan ekonomi antara entitas dengan pemilik modal. Audit kewajiban lebih banyak menekankan asersi kelengkapan karena risiko utama kewajiban adalah tidak dicatatnya seluruh kewajiban yang seharusnya diakui. Sebaliknya, audit ekuitas menekankan legalitas, otorisasi, klasifikasi, dan penyajian transaksi modal. Kedua area tersebut membutuhkan pendekatan audit yang hati-hati karena berdampak langsung terhadap penilaian solvabilitas, profitabilitas, dan struktur permodalan entitas (Rahayu et al., 2026).

2. Tujuan Audit atas Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Keuangan

Tujuan audit atas kewajiban adalah memperoleh keyakinan memadai bahwa seluruh kewajiban yang material telah dicatat secara lengkap, diukur secara tepat, diklasifikasikan dengan benar, dan diungkapkan secara memadai. Auditor perlu memastikan

bahwa kewajiban yang disajikan benar-benar merupakan kewajiban entitas pada tanggal pelaporan dan tidak terdapat kewajiban signifikan yang belum dicatat. Tujuan audit atas ekuitas adalah memastikan bahwa transaksi ekuitas telah diotorisasi secara sah, dicatat secara akurat, diklasifikasikan sesuai substansinya, dan diungkapkan secara memadai. Auditor perlu memeriksa apakah penerbitan saham, setoran modal, pembagian dividen, perubahan saldo laba, dan transaksi ekuitas lainnya telah sesuai dengan keputusan pemegang saham, ketentuan hukum, serta dokumen pendukung yang relevan. Audit kewajiban dan ekuitas juga bertujuan menilai apakah penyajian dalam laporan keuangan telah memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang harus disajikan secara tepat karena klasifikasi tersebut memengaruhi analisis likuiditas. Ekuitas harus disajikan secara jelas agar pengguna laporan dapat memahami struktur kepemilikan dan perubahan modal selama periode berjalan. Secara umum, tujuan audit atas kewajiban dan ekuitas dapat diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 14.1 Tujuan Audit atas Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Keuangan

Area Audit	Tujuan Pemeriksaan	Fokus Asersi
Kewajiban	Memastikan seluruh kewajiban dicatat, diukur, dan disajikan secara tepat	Kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, pengungkapan
Ekuitas	Memastikan transaksi modal sah, akurat, dan sesuai ketentuan	Otorisasi, hak residual, klasifikasi, penyajian
Penyajian laporan	Memastikan informasi kewajiban dan ekuitas mudah dipahami pengguna laporan	Penyajian dan pengungkapan

Dengan tujuan tersebut, audit kewajiban dan ekuitas berperan penting dalam menjaga kewajaran laporan keuangan. Auditor harus memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan pengguna laporan dalam menilai posisi keuangan dan struktur pendanaan entitas (Knechel & Salterio, 2016).

B. Karakteristik Kewajiban dalam Laporan Keuangan

Kewajiban merupakan salah satu unsur utama laporan posisi keuangan yang menunjukkan tanggung jawab entitas kepada kreditur, pemasok, pemerintah, karyawan, lembaga keuangan, dan pihak lain. Karakteristik kewajiban sangat beragam karena dapat muncul dari transaksi operasional, aktivitas pendanaan, kewajiban hukum, kontrak bisnis, maupun estimasi atas peristiwa masa lalu. Perbedaan karakteristik tersebut memengaruhi perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang diperlukan. Dalam audit, pemahaman mengenai jenis, dasar pengakuan, metode pengukuran, dan penyajian kewajiban menjadi dasar penting untuk menilai risiko salah saji material. Auditor perlu membedakan kewajiban yang bersifat pasti dengan kewajiban estimasian, kewajiban jangka pendek dengan kewajiban jangka panjang, serta kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan kewajiban yang masih bergantung pada kondisi tertentu.

1. Jenis-Jenis Kewajiban: Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lancar mencakup utang usaha, utang bank jangka pendek, bagian lancar pinjaman jangka panjang, utang pajak, beban akrual, pendapatan diterima di muka, dan kewajiban lain yang akan segera diselesaikan. Dalam analisis keuangan, kewajiban lancar berhubungan erat dengan kemampuan entitas memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya melebihi dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya meliputi pinjaman bank jangka panjang, obligasi, liabilitas sewa jangka panjang, kewajiban imbalan kerja jangka panjang, dan provisi jangka panjang. Kewajiban jangka panjang berkaitan dengan struktur pendanaan dan kemampuan entitas memenuhi komitmen keuangan pada masa mendatang (Rahma & Prasetyo, 2021).

Perbedaan antara kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang sangat penting karena memengaruhi penilaian likuiditas dan solvabilitas. Salah satu klasifikasi kewajiban jangka pendek menjadi jangka panjang dapat membuat posisi likuiditas tampak lebih baik. Sebaliknya, klasifikasi kewajiban jangka panjang sebagai kewajiban lancar dapat memberikan gambaran yang terlalu konservatif mengenai tekanan pembayaran jangka pendek.

Selain berdasarkan jatuh tempo, kewajiban juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepastian jumlah dan waktu pembayarannya. Utang usaha biasanya memiliki jumlah dan tanggal jatuh tempo yang jelas. Sebaliknya, provisi atau kewajiban imbalan kerja dapat memerlukan estimasi akuntansi karena jumlah dan waktu penyelesaiannya belum pasti. Perbedaan ini memengaruhi prosedur audit karena kewajiban estimasian membutuhkan pengujian asumsi dan pertimbangan profesional.

2. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan apabila entitas memiliki kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, penyelesaian kewajiban tersebut diperkirakan menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi, dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pengakuan tidak hanya didasarkan pada adanya tagihan dari pihak luar, tetapi juga pada substansi transaksi. Misalnya, beban yang telah terjadi tetapi belum ditagih tetap harus diakui sebagai beban akrual apabila memenuhi kriteria pengakuan. Pengukuran kewajiban bergantung pada jenis kewajiban. Utang usaha umumnya diukur sebesar jumlah yang harus dibayar. Pinjaman bank dapat diukur berdasarkan nilai pokok, bunga yang masih harus dibayar, dan biaya transaksi tertentu sesuai perlakuan akuntansi. Obligasi dapat melibatkan diskonto, premium, amortisasi, dan bunga efektif. Provisi memerlukan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Penyajian kewajiban harus mencerminkan sifat dan jatuh tempo kewajiban. Kewajiban lancar harus dipisahkan dari kewajiban jangka panjang agar pengguna laporan dapat menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban dengan pembatasan, jaminan, atau perjanjian khusus perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Ringkasan karakteristik kewajiban dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 14.2 Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Kewajiban

Jenis Kewajiban	Karakteristik	Contoh
Kewajiban lancar	Diselesaikan dalam siklus operasi normal atau kurang dari dua belas bulan	Utang usaha, utang pajak, beban akrual
Kewajiban jangka panjang	Diselesaikan lebih dari dua belas bulan	Pinjaman jangka panjang, obligasi, liabilitas sewa

Kewajiban estimasian	Jumlah atau waktu penyelesaian belum pasti	Provisi, kewajiban imbalan kerja
Kewajiban kontinjensi	Bergantung pada kejadian masa depan yang belum pasti	Gugatan hukum tertentu, jaminan tertentu

Auditor perlu memahami karakteristik tersebut agar dapat menentukan prosedur audit yang sesuai. Kewajiban yang sederhana dapat diuji melalui dokumen transaksi dan konfirmasi, sedangkan kewajiban yang kompleks membutuhkan analisis kontrak, pengujian estimasi, dan evaluasi pengungkapan.

C. Risiko Audit atas Kewajiban

Kewajiban merupakan area audit yang memiliki risiko salah saji material cukup tinggi, terutama karena adanya kemungkinan kewajiban tidak dicatat secara lengkap. Berbeda dengan aset yang sering berisiko dicatat terlalu tinggi, kewajiban sering berisiko dicatat terlalu rendah. Manajemen dapat memiliki dorongan untuk menunda pencatatan kewajiban agar laba, modal kerja, dan rasio keuangan tampak lebih baik. Risiko audit atas kewajiban juga dapat muncul karena kesalahan klasifikasi, pengukuran estimasi yang tidak tepat, pengungkapan yang tidak memadai, atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian pinjaman. Auditor perlu merancang prosedur yang mampu mendeteksi kewajiban yang tidak tercatat, kewajiban yang salah periode, serta kewajiban yang tidak disajikan sesuai substansi ekonominya (Supardi, 2012).

1. Risiko Salah Saji Material pada Kelengkapan dan Pengakuan Kewajiban

Risiko utama dalam audit kewajiban adalah tidak dicatatnya seluruh kewajiban yang seharusnya diakui. Risiko ini dapat terjadi karena kelalaian, lemahnya sistem akuntansi, keterlambatan penerimaan tagihan, atau upaya manajemen untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan. Misalnya, beban yang telah terjadi pada akhir periode tetapi belum diterima fakturnya dapat tidak dicatat sebagai utang atau akrual. Risiko kelengkapan juga dapat muncul pada transaksi pembelian menjelang akhir periode. Barang atau jasa telah diterima sebelum tanggal pelaporan, tetapi faktur baru diterima setelah periode berakhir. Jika entitas hanya mencatat kewajiban berdasarkan faktur yang diterima, maka kewajiban dapat kurang saji (Fatrah et al., 2025).

Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pencarian kewajiban yang belum tercatat melalui pemeriksaan pembayaran setelah tanggal pelaporan, dokumen penerimaan barang, kontrak pembelian, dan notulen rapat. Risiko pengakuan berkaitan dengan ketepatan waktu pencatatan kewajiban. Kewajiban harus diakui pada periode saat kewajiban timbul, bukan semata-mata ketika pembayaran dilakukan. Kesalahan cut-off dapat menyebabkan beban dan kewajiban dicatat pada periode yang salah. Kesalahan ini dapat memengaruhi laba periode berjalan dan posisi keuangan. Risiko kelengkapan dan pengakuan juga meningkat pada kewajiban yang bersifat tidak rutin, seperti gugatan hukum, garansi produk, restrukturisasi, kewajiban lingkungan, dan perjanjian jaminan. Dalam kondisi tersebut, auditor perlu memperoleh informasi dari manajemen, penasihat hukum, dan dokumen pendukung lain untuk menilai apakah kewajiban perlu diakui atau cukup diungkapkan.

2. Risiko Salah Klasifikasi, Estimasi, dan Pengungkapan Kewajiban

Salah klasifikasi kewajiban dapat terjadi ketika kewajiban jangka pendek disajikan sebagai kewajiban jangka panjang atau sebaliknya. Risiko ini penting karena memengaruhi rasio lancar, modal kerja, dan persepsi pengguna laporan terhadap kemampuan entitas memenuhi kewajiban jangka pendek. Auditor perlu memeriksa jadwal jatuh tempo, perjanjian pinjaman, dan kondisi pelanggaran perjanjian yang dapat menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi segera jatuh tempo. Risiko estimasi muncul pada kewajiban yang jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Provisi garansi, kewajiban imbalan kerja, kewajiban pajak tangguhan tertentu, dan kewajiban litigasi memerlukan pertimbangan manajemen. Estimasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan kewajiban dan beban kurang saji. Estimasi yang terlalu tinggi dapat digunakan untuk menciptakan cadangan tersembunyi yang dapat memengaruhi laba masa depan. Risiko pengungkapan berkaitan dengan ketidaklengkapan informasi mengenai sifat kewajiban, jatuh tempo, bunga, jaminan, pembatasan perjanjian, kewajiban kontinjensi, dan risiko likuiditas. Pengungkapan yang kurang memadai dapat menyebabkan pengguna laporan tidak memahami tingkat risiko keuangan entitas. Misalnya, pinjaman dengan jaminan aset signifikan harus diungkapkan agar pengguna laporan memahami adanya pembatasan atas aset tersebut. Risiko audit atas kewajiban dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 14.3 Risiko Salah Klasifikasi, Estimasi, dan Pengungkapan Kewajiban

Area Risiko	Bentuk Salah Saji	Dampak terhadap Laporan Keuangan
Kelengkapan	Kewajiban tidak dicatat	Kewajiban dan beban kurang saji
Pengakuan	Kewajiban dicatat pada periode yang salah	Laba dan posisi keuangan salah saji
Klasifikasi	Kewajiban lancar disajikan sebagai jangka panjang	Rasio likuiditas tampak lebih baik
Estimasi	Provisi dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi	Beban dan kewajiban tidak wajar
Pengungkapan	Informasi jatuh tempo, jaminan, atau kontinjensi tidak lengkap	Risiko keuangan tidak tergambar secara memadai

D. Prosedur Audit atas Kewajiban

Prosedur audit atas kewajiban dirancang untuk memperoleh bukti mengenai kelengkapan, keberadaan, keakuratan, klasifikasi, dan pengungkapan kewajiban. Auditor perlu menyesuaikan prosedur dengan jenis kewajiban dan tingkat risiko yang diidentifikasi. Kewajiban rutin seperti utang usaha dapat diuji melalui rekonsiliasi, dokumen pembelian, dan pembayaran setelah tanggal pelaporan. Kewajiban kompleks seperti pinjaman jangka panjang, obligasi, provisi, dan kewajiban imbalan kerja memerlukan prosedur tambahan. Audit kewajiban berbeda dengan audit aset karena fokus utama lebih diarahkan pada pencarian kewajiban yang belum dicatat. Oleh sebab itu, auditor tidak hanya memeriksa saldo yang sudah ada dalam buku besar, tetapi juga menelusuri bukti eksternal dan transaksi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi kewajiban yang mungkin belum dicatat.

1. Pengujian Kelengkapan, Keberadaan, dan Keakuratan Kewajiban

Pengujian kelengkapan bertujuan memastikan bahwa seluruh kewajiban yang seharusnya dicatat telah masuk dalam laporan keuangan. Prosedur yang umum digunakan adalah pencarian kewajiban yang belum tercatat. Auditor dapat memeriksa pembayaran setelah tanggal pelaporan untuk menentukan apakah pembayaran tersebut berkaitan dengan kewajiban periode berjalan. Jika pembayaran setelah tanggal pelaporan berkaitan dengan barang atau jasa yang diterima

sebelum akhir periode, maka kewajiban seharusnya telah dicatat pada tanggal pelaporan. Auditor juga dapat memeriksa dokumen penerimaan barang yang belum dipasangkan dengan faktur pemasok. Prosedur ini penting karena kewajiban dapat timbul ketika barang telah diterima, meskipun faktur belum diterima. Selain itu, auditor dapat membaca notulen rapat direksi, kontrak pembelian, perjanjian pinjaman, dan dokumen hukum untuk mengidentifikasi kewajiban yang belum dicatat (Putri & Sulistyowati, 2023).

Pengujian keberadaan bertujuan memastikan bahwa kewajiban yang dicatat benar-benar ada. Walaupun risiko utama kewajiban adalah kurang saji, auditor tetap perlu memastikan bahwa saldo kewajiban tidak dicatat secara fiktif. Prosedur ini dapat dilakukan melalui konfirmasi kepada kreditur, pemeriksaan faktur, surat perjanjian, bukti penerimaan barang, dan bukti pembayaran. Pengujian keakuratan bertujuan memastikan bahwa kewajiban dicatat dalam jumlah yang benar. Auditor dapat mencocokkan saldo utang dengan faktur, kontrak, jadwal pinjaman, perhitungan bunga, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk pinjaman berbunga, auditor dapat menghitung ulang beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar. Untuk provisi, auditor perlu mengevaluasi dasar estimasi dan menguji perhitungan yang digunakan oleh manajemen.

2. Konfirmasi, Rekonsiliasi, dan Penelusuran Dokumen Pendukung Kewajiban

Konfirmasi merupakan prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti langsung dari pihak ketiga mengenai saldo atau informasi tertentu. Dalam audit kewajiban, konfirmasi dapat dikirim kepada bank, pemasok utama, pemegang obligasi, lessor, atau kreditur lain. Konfirmasi bank sangat penting karena dapat memberikan informasi mengenai saldo pinjaman, bunga, jaminan, pembatasan perjanjian, dan fasilitas kredit yang belum digunakan. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan saldo menurut catatan entitas dengan informasi dari pihak eksternal atau dokumen pendukung. Misalnya, auditor dapat merekonsiliasi saldo pinjaman menurut buku besar dengan surat konfirmasi bank dan jadwal amortisasi. Untuk utang usaha, auditor dapat merekonsiliasi daftar utang pemasok dengan buku besar pembantu dan buku besar utama. Perbedaan yang ditemukan perlu ditelusuri untuk menentukan apakah terdapat salah saji (Montgomery, 1927).

Penelusuran dokumen pendukung dilakukan dengan memeriksa bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan kewajiban. Dokumen tersebut dapat berupa faktur pemasok, kontrak pinjaman, bukti penerimaan barang, surat jalan, perjanjian sewa, dokumen pajak, keputusan pengadilan, dan surat dari penasihat hukum. Auditor perlu memastikan bahwa dokumen tersebut mendukung jumlah, tanggal, pihak terkait, dan sifat kewajiban yang dicatat. Untuk kewajiban kontinjensi dan litigasi, auditor dapat meminta keterangan tertulis dari manajemen serta mengirim surat permintaan informasi kepada penasihat hukum. Prosedur ini bertujuan memperoleh informasi mengenai status perkara, kemungkinan kerugian, dan estimasi jumlah kewajiban. Auditor harus menilai apakah kondisi tersebut memerlukan pengakuan provisi atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur audit kewajiban dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 14.4 Konfirmasi, Rekonsiliasi, dan Penelusuran Dokumen Pendukung Kewajiban

Prosedur Audit	Tujuan	Contoh Bukti
Pencarian kewajiban belum tercatat	Menguji kelengkapan kewajiban	Pembayaran setelah tanggal pelaporan
Konfirmasi kreditur	Menguji keberadaan dan keakuratan	Konfirmasi bank atau pemasok
Rekonsiliasi saldo	Menguji kesesuaian catatan	Buku besar, daftar utang, konfirmasi
Pemeriksaan kontrak	Mengidentifikasi kewajiban dan pembatasan	Perjanjian pinjaman atau sewa
Perhitungan ulang	Menguji keakuratan bunga dan provisi	Jadwal pinjaman dan perhitungan manajemen

Prosedur tersebut harus diterapkan secara proporsional sesuai tingkat risiko. Area yang memiliki risiko tinggi membutuhkan bukti yang lebih kuat dan prosedur yang lebih mendalam.

E. Audit atas Ekuitas

Ekuitas mencerminkan kepentingan pemilik dalam entitas setelah seluruh kewajiban dikurangkan dari aset. Audit atas ekuitas memiliki karakteristik yang berbeda dari audit kewajiban karena transaksi ekuitas biasanya tidak terlalu sering terjadi, tetapi jumlahnya

dapat material dan memiliki konsekuensi hukum. Transaksi ekuitas juga harus mendapat otorisasi yang tepat karena menyangkut hak pemilik, struktur modal, dan pembagian hasil usaha. Dalam audit ekuitas, auditor perlu memeriksa dokumen pendirian, anggaran dasar, keputusan rapat pemegang saham, daftar pemegang saham, bukti setoran modal, catatan perubahan modal, serta kebijakan pembagian dividen. Auditor juga perlu memastikan bahwa ekuitas disajikan sesuai dengan bentuk hukum entitas, baik perseroan terbatas, koperasi, persekutuan, maupun bentuk organisasi lainnya.

1. Karakteristik Komponen Ekuitas: Modal Saham, Tambahan Modal Disetor, dan Saldo Laba

Modal saham merupakan komponen ekuitas yang menunjukkan nilai nominal saham yang telah diterbitkan oleh entitas. Dalam perseroan terbatas, modal saham berkaitan erat dengan akta pendirian, anggaran dasar, dan keputusan pemegang saham. Auditor perlu memastikan bahwa jumlah saham yang diterbitkan, nilai nominal, jenis saham, dan hak yang melekat pada saham telah dicatat dan diungkapkan secara tepat. Tambahan modal disetor merupakan selisih lebih antara harga penerbitan saham dan nilai nominal saham, atau kontribusi pemilik lain yang memenuhi kriteria ekuitas. Akun ini dapat timbul ketika entitas menerbitkan saham di atas nilai nominal. Auditor perlu memastikan bahwa tambahan modal disetor telah dihitung secara benar dan didukung oleh bukti setoran serta dokumen persetujuan yang sah.

Saldo laba merupakan akumulasi laba atau rugi entitas yang belum dibagikan kepada pemilik. Saldo laba dipengaruhi oleh laba rugi periode berjalan, pembagian dividen, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan transaksi lain yang diakui langsung dalam ekuitas. Auditor perlu menelusuri perubahan saldo laba dari laporan laba rugi, keputusan pembagian dividen, dan penyesuaian ekuitas lainnya.

Selain tiga komponen tersebut, ekuitas dapat mencakup penghasilan komprehensif lain, saham treasuri, selisih transaksi dengan pemilik, dan cadangan tertentu. Setiap komponen harus diklasifikasikan sesuai substansi transaksi. Misalnya, saham treasuri umumnya disajikan sebagai pengurang ekuitas, bukan sebagai aset. Kesalahan penyajian komponen ekuitas dapat memengaruhi pemahaman pengguna laporan terhadap struktur modal entitas (Herusetya, 2012).

2. Pengujian Transaksi Ekuitas, Dividen, dan Perubahan Struktur Modal

Pengujian transaksi ekuitas bertujuan memastikan bahwa seluruh perubahan ekuitas telah diotorisasi, dicatat secara akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Auditor perlu memeriksa keputusan rapat pemegang saham, akta perubahan modal, bukti setoran, dokumen penerbitan saham, dan daftar pemegang saham. Jika terdapat penerbitan saham baru, auditor harus memastikan jumlah saham, harga penerbitan, nilai nominal, dan tambahan modal disetor telah dicatat dengan benar. Pengujian dividen dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian dividen telah mendapat persetujuan yang sah, dihitung secara tepat, dan dicatat pada periode yang benar. Dividen hanya dapat diakui sebagai kewajiban jika telah diumumkan atau disetujui sesuai ketentuan yang berlaku. Auditor perlu memeriksa keputusan rapat pemegang saham, jumlah dividen per saham, daftar pemegang saham yang berhak, dan bukti pembayaran.

Perubahan struktur modal dapat terjadi melalui penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, konversi utang menjadi saham, pemecahan saham, penggabungan saham, atau restrukturisasi modal. Setiap perubahan struktur modal perlu diuji karena dapat memengaruhi hak pemilik dan penyajian ekuitas. Auditor harus memahami substansi transaksi dan memastikan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam entitas yang memiliki pemegang saham atau pemilik lebih dari satu pihak, auditor perlu memperhatikan transaksi dengan pihak berelasi. Setoran modal, pinjaman pemegang saham, pembagian dividen, dan transaksi ekuitas lain dapat memiliki implikasi terhadap klasifikasi antara liabilitas dan ekuitas. Apabila suatu setoran memiliki kewajiban pengembalian tetap, auditor perlu menilai apakah transaksi tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban daripada ekuitas. Ringkasan pengujian ekuitas dapat disajikan sebagai berikut.

F. Penyajian, Pengungkapan, dan Kesimpulan Audit

Penyajian dan pengungkapan kewajiban serta ekuitas merupakan tahap penting dalam audit karena memengaruhi pemahaman pengguna laporan terhadap posisi keuangan entitas. Saldo kewajiban dan ekuitas yang telah dicatat dengan benar tetap dapat menyesatkan apabila disajikan atau diungkapkan secara tidak

memadai. Oleh karena itu, auditor harus mengevaluasi apakah informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan telah memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Pada tahap akhir pemeriksaan, auditor mengevaluasi seluruh bukti yang diperoleh untuk menentukan apakah kewajiban dan ekuitas telah disajikan secara wajar. Auditor juga perlu merumuskan temuan, mendokumentasikan pertimbangan profesional, serta menilai dampak salah saji terhadap opini audit. Jika terdapat salah saji material atau pembatasan lingkup audit, auditor harus mempertimbangkan konsekuensinya terhadap laporan auditor independen.

1. Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban serta Ekuitas

Evaluasi penyajian kewajiban dilakukan dengan menilai apakah kewajiban telah diklasifikasikan secara tepat antara kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Auditor perlu memastikan bahwa bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun telah disajikan sebagai kewajiban lancar. Jika terdapat pelanggaran perjanjian pinjaman yang menyebabkan kewajiban menjadi segera jatuh tempo, auditor harus mempertimbangkan dampaknya terhadap klasifikasi dan pengungkapan. Pengungkapan kewajiban harus memuat informasi yang relevan mengenai sifat kewajiban, jatuh tempo, tingkat bunga, jaminan, pembatasan perjanjian, dan risiko likuiditas. Untuk kewajiban kontinjensi, catatan atas laporan keuangan perlu menjelaskan sifat perkara, estimasi dampak keuangan apabila dapat ditentukan, serta ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil akhir. Auditor perlu mengevaluasi apakah pengungkapan tersebut cukup untuk membantu pengguna laporan memahami risiko yang dihadapi entitas (Qadrina & Raharja, 2024).

Evaluasi penyajian ekuitas dilakukan dengan memastikan bahwa setiap komponen ekuitas disajikan secara terpisah sesuai karakteristiknya. Modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, saham treasuri, dan komponen ekuitas lainnya harus disajikan secara jelas. Perubahan ekuitas selama periode berjalan juga harus dijelaskan melalui laporan perubahan ekuitas. Auditor perlu memastikan bahwa transaksi dengan pemilik dibedakan dari transaksi yang memengaruhi laba rugi. Pengungkapan ekuitas perlu mencakup jumlah saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar; nilai nominal saham; hak dan pembatasan yang melekat pada saham; kebijakan dividen; serta perubahan modal yang signifikan. Untuk entitas nonperseroan, pengungkapan disesuaikan dengan bentuk kepemilikan dan ketentuan yang

berlaku. Kecukupan pengungkapan sangat penting karena ekuitas berkaitan dengan hak pemilik dan struktur pengendalian entitas.

2. Perumusan Temuan, Dokumentasi, dan Opini Audit atas Kewajiban dan Ekuitas

Perumusan temuan audit dilakukan setelah auditor menyelesaikan pengujian substantif, pengujian pengendalian, dan evaluasi penyajian. Temuan atas kewajiban dapat berupa kewajiban yang belum dicatat, salah klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang, perhitungan bunga yang salah, provisi yang tidak memadai, atau pengungkapan kontinjensi yang kurang lengkap. Temuan atas ekuitas dapat berupa transaksi modal tanpa otorisasi, kesalahan pencatatan tambahan modal disetor, pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan, atau penyajian saldo laba yang tidak tepat. Dokumentasi audit harus menunjukkan dasar auditor dalam menarik kesimpulan. Dokumentasi atas kewajiban dapat mencakup daftar kewajiban, hasil konfirmasi, rekonsiliasi, pengujian pembayaran setelah tanggal pelaporan, analisis kontrak, perhitungan ulang bunga, serta evaluasi provisi dan kontinjensi. Dokumentasi atas ekuitas dapat mencakup pemeriksaan akta, keputusan rapat pemegang saham, bukti setoran modal, daftar pemegang saham, pengujian dividen, dan analisis perubahan ekuitas.

Auditor perlu mengomunikasikan salah saji yang ditemukan kepada manajemen dan meminta penyesuaian apabila salah saji tersebut material. Jika manajemen melakukan koreksi, auditor mengevaluasi kembali apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Jika manajemen menolak melakukan koreksi atas salah saji material, auditor harus mempertimbangkan modifikasi opini. Opini audit atas kewajiban dan ekuitas bergantung pada kecukupan bukti dan materialitas salah saji. Apabila auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat serta tidak menemukan salah saji material, opini tanpa modifikasian dapat diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila terdapat salah saji material tetapi tidak pervasif, opini wajar dengan pengecualian dapat dipertimbangkan. Apabila salah saji material bersifat pervasif, opini tidak wajar dapat diperlukan. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat atas area kewajiban atau ekuitas yang material, opini wajar dengan pengecualian atau tidak menyatakan pendapat dapat dipertimbangkan sesuai tingkat pervasivitas pembatasan. Kesimpulan audit atas kewajiban dan ekuitas harus didasarkan pada bukti yang memadai, pertimbangan profesional, serta evaluasi menyeluruh terhadap laporan

keuangan. Auditor perlu memastikan bahwa kewajiban tidak kurang saji, ekuitas tidak salah klasifikasi, dan seluruh informasi penting telah diungkapkan secara memadai. Dengan demikian, audit kewajiban dan ekuitas berkontribusi pada keandalan laporan keuangan dan perlindungan kepentingan pengguna informasi keuangan.

JAWABARA

DAFTAR PUSTAKA

- Herusetya, A. (2012). Dapatkah kualitas audit mengurangi biaya modal ekuitas ex-ante? *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 16(1).
- Knechel, W. R., & Salterio, S. (2016). *Auditing: Assurance and risk*. Taylor & Francis.
- Kumar, R., & Sharma, V. (2015). *Auditing: Principles and practice*. PHI Learning Pvt. Ltd.
- Montgomery, R. H. (1927). *Auditing theory and practice*. Ronald Press Company.
- Putri, R. C., & Sulistyowati, E. (2023). Analisis materialitas pada prosedur audit vouching atas akun beban operasional. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 20(2), 154–167.
- Qadrina, M. F., & Raharja, S. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *key audit matters* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(1), 67–83.
- Rahayu, S., Anugrah, M., & Masyhuri, M. (2026). Peran audit siklus ekuitas dalam mencegah manipulasi laporan keuangan pada era transformasi digital perusahaan. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(3), 65–72.
- Rahma, N. A. N., & Prasetyo, M. S. (2021). Pengaruh liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang terhadap tingkat profitabilitas PT Indospring Tbk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 134–148.
- Supardi, D. (2012). Pengaruh profesionalisme auditor terhadap risiko audit. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 35–52.

TENTANG PENULIS



Widiya Pratiwi, M.Ak

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Penulis merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 45 Mataram. Saat ini, ia berdomisili di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai akademisi, Widiya Pratiwi berperan aktif dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan akademik tersebut, ia berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, ia terus berupaya mengembangkan kompetensi profesional dan menghasilkan karya ilmiah yang memberikan manfaat bagi lingkungan akademik dan masyarakat.

JANVARA

BAB 15



LAPORAN AUDIT DAN OPINI AUDITOR

Khoirunnisa Cahya Firdarini, S.E., M.Si.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

A. Pendahuluan

Audit atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Proses audit dapat dilakukan oleh pihak internal suatu entitas atau pihak eksternal independen. Audit yang dilakukan oleh auditor eksternal pada umumnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Hasil akhir dari serangkaian proses audit yang dilakukan akan menghasilkan laporan audit. Laporan audit merupakan komponen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik karena berfungsi dalam mengomunikasikan temuan auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh entitas selama satu periode serta keandalan informasi keuangan yang ada di dalamnya. Laporan ini selain digunakan oleh pihak internal perusahaan, juga digunakan oleh para pihak luar yang berkepentingan terhadap entitas tersebut seperti investor, kreditur, lembaga pemerintah, bank, serta pihak-pihak lain sebagai cerminan kepatuhan perusahaan atas standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

B. Konsep Laporan Audit

Laporan audit menjadi media utama bagi auditor untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan kesimpulannya kepada para pengguna laporan keuangan. Pemahaman mengenai definisi, tujuan, dan standar penyusunannya diperlukan agar laporan audit dapat dibaca secara tepat dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

1. Definisi Laporan Audit

Laporan audit adalah dokumen yang memuat hasil proses audit yang disusun oleh auditor independen atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Laporan audit yang diterbitkan mencakup laporan kinerja dan laporan posisi keuangan entitas selama satu periode atau satu tahun. Kewajaran laporan keuangan diukur dari kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu IFRS atau PSAK dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. **Kesesuaian dengan Standar Akuntansi**
Auditor wajib menjamin kepatuhan entitas atas penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK (di Indonesia) atau IFRS secara internasional.
- b. **Kelengkapan Informasi**
Seluruh transaksi akuntansi yang bersifat material harus tercatat dan disajikan dalam laporan keuangan, yang berarti tidak diperkenankan adanya penghilangan informasi yang signifikan.
- c. **Konsistensi Penyajian**
Penggunaan metode akuntansi harus konsisten antarperiode, kecuali terdapat kejadian luar biasa yang memungkinkan untuk melakukan perubahan.
- d. **Pengendalian Internal**
Auditor wajib melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal entitas untuk menjamin efektivitasnya dalam mencegah kesalahan dan kecurangan.
- e. **Materialitas**
Auditor mempertimbangkan tingkat materialitas kesalahan atau penyimpangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Laporan audit yang diterbitkan oleh auditor independen diharapkan dapat mengungkapkan adanya potensi penyimpangan atau kecurangan (kecurangan (fraud)), mampu memberikan

penilaian yang independen dan objektif serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga laporan audit dapat memberikan jaminan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan keuangan.

2. Standar Penyusunan Laporan Audit

Laporan audit wajib disusun dengan menggunakan struktur baku yang konsisten untuk mengkomunikasikan temuan auditor dan opini audit atas laporan keuangan suatu entitas. Standar Audit (SA) 700 mengatur mengenai format dan isi laporan auditor dan menyebutkan bahwa laporan audit harus memuat beberapa unsur. Berikut unsur-unsur yang harus disajikan dalam laporan audit:

- a. **Judul Laporan**
Judul laporan audit wajib menggunakan kata “independen” untuk menekankan independensi auditor dalam menerbitkan laporannya sehingga judul dari laporan ini adalah Laporan Auditor Independen. Penggunaan kata ini juga menunjukkan kepatuhan auditor terhadap Standar Audit (SA) 700 yang mewajibkan penggunaan kata independen sebagai bentuk pernyataan sikap profesional auditor.
- b. **Pihak yang Dituju**
Laporan audit wajib mencantumkan kepada siapa laporan ini ditujukan. Pada umumnya laporan audit ditujukan pada dewan direksi atau dewan komisaris entitas atau klien sebagai bentuk pertanggung jawaban yang menjamin bahwa hasil audit telah disampaikan kepada pihak yang berwenang. Pencantuman pihak yang dituju juga menunjukkan kepatuhan atas perikatan audit antara auditor dengan klien.
- c. **Paragraf Pendahuluan**
Paragraf pendahuluan menjelaskan secara rinci laporan keuangan yang diaudit, periode yang dicakup, serta menegaskan tanggung jawab manajemen dan auditor. Bagian ini menyebutkan secara eksplisit jenis laporan keuangan yang diaudit yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas untuk periode akuntansi tertentu. Paragraf ini juga menegaskan tanggung jawab setiap pihak, bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan auditor bertanggung jawab dalam pemberian opini auditor telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. **Paragraf Ruang Lingkup**
Paragraf ruang lingkup memuat standar audit yang digunakan oleh auditor, menjelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk

memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran pos-pos dalam laporan keuangan, dan bukan menjamin sepenuhnya bebas dari salah saji.

e. Tujuan Audit

Paragraf ini menjelaskan tujuan dilakukannya serangkaian proses audit antara lain untuk memberikan jaminan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK atau IFRS, serta menjelaskan fungsi audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan yang memengaruhi kewajaran informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

f. Paragraf Opini Auditor

Paragraf ini merupakan bagian inti dari seluruh laporan auditor independen yang memuat pernyataan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada bagian ini auditor juga akan menyampaikan ketidakkonsistenan implementasi standar akuntansi, kecukupan jumlah pengungkapan atau hal lain yang secara signifikan berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan.

g. Tanda Tangan Auditor

Laporan auditor harus mencantumkan tanda tangan rekan Kantor Akuntan Publik yang disertai dengan nama auditor independen atau nama Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk validitas pernyataan audit dan keabsahan hukum serta mencerminkan akuntabilitas profesi yang menegaskan bentuk tanggung jawab auditor dalam melakukan proses audit sesuai standar yang berlaku.

C. Format dan Opini Auditor

Format laporan auditor yang seragam memudahkan pengguna mengidentifikasi tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, basis pemeriksaan, dan opini yang diberikan. Bagian ini menyajikan contoh format laporan auditor independen serta menjelaskan pengertian dan unsur opini auditor.

1. Format Laporan Auditor

Laporan auditor independen harus mengikuti format baku sesuai yang ditetapkan dalam Standar Audit (SA 700 Revisi 2021) untuk mempertahankan konsistensi, meningkatkan daya banding antarentitas serta mudah dipahami oleh pengguna laporan. Berikut

contoh format laporan auditor independen bentuk baku wajar tanpa pengecualian:

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- a. [Pihak yang Dituju]
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT XYZ terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal (31 Desember 2025), serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
- b. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
- c. Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta

pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

d. Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT XYZ tanggal (31 Desember 2025), serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Pengertian Opini Auditor

Mulyadi (2014) menjelaskan bahwa opini audit adalah pernyataan auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan oleh manajemen perusahaan sedangkan Standar Audit (SA) 700 revisi 2021 menjelaskan bahwa opini audit adalah kesimpulan yang diperoleh oleh auditor independen untuk menjamin laporan keuangan yang disusun oleh entitas telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (PSAK) serta terbebas dari salah saji yang bersifat material, baik disebabkan oleh adanya kesalahan (tidak disengaja) atau kecurangan (disengaja). Auditor akan mengumpulkan bukti yang cukup selama proses pemeriksaan dan mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku sebagai dasar pemberian opininya. Opini audit tertuang secara eksplisit dalam laporan auditor independen merupakan inti dari laporan yang menjelaskan mengenai kewajaran laporan keuangan entitas. Pemberian opini audit tersebut harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Jenis Laporan Keuangan yang Diaudit
Paragraf opini harus menyebutkan periode komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan arus kas.
- b. Kerangka Pelaporan Keuangan yang Digunakan
Menyebutkan standar akuntansi keuangan yang berlaku (PSAK atau IFRS)
- c. Pernyataan Kewajaran Laporan Keuangan
Auditor wajib menyatakan apakah laporan keuangan yang disusun telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material
- d. Basis Opini
Auditor memberikan jaminan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar audit dengan mempertahankan independensi dan kecukupan bukti audit

e. Jenis Opini

Auditor harus secara eksplisit menyebutkan opini audit yang diberikan atas laporan keuangan entitas.

Jenis-Jenis Opini Auditor

Standar Audit (SA) 700 memberikan pedoman bagi auditor dalam menjalankan perannya dalam memberikan pernyataan pendapat atau opini audit serta memberikan panduan teknis bagaimana opini tersebut harus disampaikan.

3. Opini Tanpa Modifikasi dan Opini dengan Paragraf Penjelasan

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Standar Audit (SA) 705 menyebutkan bahwa auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian apabila berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan entitas secara keseluruhan bebas dari salah saji material dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kondisi berikut:

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas disajikan secara lengkap oleh entitas
- b. Auditor memperoleh bukti yang cukup dan telah melakukan prosedur audit yang sesuai dengan standar audit sehingga memperoleh keyakinan yang memadai untuk dijadikan sebagai dasar pemberian opini audit.
- c. Tidak ada kondisi yang menuntut adanya perubahan atau penyesuaian atas laporan keuangan yang disajikan

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

Auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material
- b. Auditor menemukan adanya kondisi tertentu yang tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan tetapi dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan sehingga auditor perlu memberikan penekanan atas kondisi tersebut seperti ketidakpastian yang signifikan atas kelangsungan usaha (going concern) perusahaan, perubahan kebijakan akuntansi yang dapat berdampak material dan hal

penting lainnya seperti kejadian luar biasa yang dialami oleh entitas.

4. Opini Modifikasian

Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Auditor telah memperoleh bukti yang memadai dan menilai bahwa terdapat salah saji material baik secara individu atau agregat namun tidak memiliki dampak yang luas dan secara keseluruhan tidak memengaruhi laporan keuangan.
- b. Adanya keterbatasan bukti audit yang diperoleh oleh auditor, namun auditor menyimpulkan adanya kemungkinan potensi salah saji yang material tetapi secara keseluruhan tidak memengaruhi laporan keuangan.

Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Opini tidak wajar diberikan apabila auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa salah saji, baik secara individual maupun agregat, bersifat material dan berdampak luas terhadap laporan keuangan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemberian opini tidak wajar antara lain:

- a. Salah saji material yang terjadi lebih dari satu akun atau pos laporan keuangan dan memengaruhi keseluruhan laporan keuangan.
- b. Entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang keliru atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga berpotensi menyesatkan pembaca laporan.
- c. Laporan keuangan mengandung pengungkapan yang tidak memadai, estimasi yang tidak akurat, atau penyajian data yang dapat menyesatkan pihak pengguna.

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Auditor akan menerbitkan opini tidak memberikan pendapat apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Auditor tidak memperoleh bukti audit yang memadai sebagai dasar pemberian opini dan berkeyakinan bahwa terdapat potensi salah saji yang bersifat material yang tidak terdeteksi dan berpengaruh signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan.

- b. Adanya pembatasan ruang lingkup oleh manajemen sehingga auditor tidak mendapatkan akses yang cukup, seperti akses ke dokumen, catatan, akses fisik atau operasional dan area material lain.
- c. Pada kondisi tertentu dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, dengan kecukupan bukti audit yang diperoleh atas ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat menyatakan opini atas laporan keuangan karena dampak ketidakpastian yang kumulatif dan signifikan.

Opini audit merupakan bentuk pertanggung jawaban auditor atas serangkaian proses audit yang telah mereka lakukan. Tahapan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dilakukan untuk menguji kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi yang berlaku. Pada tahapan ini auditor akan mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan auditnya. Temuan ini merupakan salah satu fondasi penting bagi auditor dalam memberikan opini audit. Berikut adalah rangkuman kondisi perusahaan yang menyebabkan laporan keuangan mendapat opini audit:

Tabel 15.1. Kondisi yang Mendasari Opini Auditor

Jenis Opini Audit	Kriteria	Kondisi yang Menyebabkan	Temuan Audit
Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan keuangan wajar sesuai standar akuntansi	Tidak ada penyimpangan material dan bukti audit cukup	Perusahaan menyajikan laporan sesuai PSAK tanpa masalah signifikan.
Wajar dengan Pengecualian	Laporan keuangan wajar, tetapi terdapat salah saji material pada suatu pos atau pengungkapan tidak lengkap	Bukti audit memadai; terdapat potensi salah saji material pada suatu pos yang tidak berdampak luas	Gugatan hukum belum dijelaskan secara memadai; kesalahan metode persediaan; aset tetap tidak disusutkan; atau sebagian kecil transaksi tidak dapat diakses auditor.

Jenis Opini Audit	Kriteria	Kondisi yang Menyebabkan	Temuan Audit
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan	Laporan keuangan wajar, tetapi terdapat hal penting yang memerlukan penekanan	Terdapat ketidakpastian atau hal penting yang perlu diungkapkan	Gugatan hukum signifikan; ketidakpastian kelangsungan usaha; perubahan kebijakan akuntansi; peristiwa setelah tanggal neraca; atau penggabungan usaha.
Tidak Wajar	Laporan keuangan tidak sesuai standar	Salah saji material yang berdampak luas pada keseluruhan laporan keuangan	Aset atau kewajiban tidak sesuai standar; manipulasi pendapatan; atau penghapusan kewajiban tanpa dasar.
Tidak Memberikan Pendapat	Auditor tidak dapat menyatakan opini	Bukti audit tidak memadai atau ruang lingkup sangat terbatas	Pembatasan lingkup audit; dokumen hilang atau rusak; ketidakpastian kelangsungan usaha yang tinggi; atau manajemen tidak kooperatif.

D. Faktor Penentu Opini Auditor

Pemberian opini audit oleh auditor independen dipengaruhi oleh dua faktor utama sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi

Auditor menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum dalam melakukan penilaian kewajaran atas laporan keuangan yang disusun oleh entitas. Laporan keuangan tersebut wajib memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi di antaranya adalah konsistensi dan kelengkapan pengungkapan informasi.

a. Konsistensi Antarperiode

Kebijakan akuntansi yang digunakan termasuk di dalamnya adalah metode penilaian, pengakuan, penyusutan aset harus konsisten digunakan dari tahun ke tahun kecuali terdapat

alasan yang kuat untuk dilakukan perubahan. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan memiliki daya banding.

- b. **Pengungkapan Informasi Penting secara Memadai**
Semua informasi yang bersifat material dan berdampak signifikan terhadap laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang cukup akan memengaruhi pemberian opini audit oleh auditor.

2. Kelengkapan Bukti Audit

Bukti audit adalah semua informasi yang diperoleh oleh auditor selama melakukan proses pemeriksaan yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kesimpulan dan memberikan opini auditor. Bukti audit harus memenuhi tiga unsur yaitu kecukupan (sufficiency), tepat (appropriateness) dan berkualitas (quality).

- a. **Kecukupan (Sufficiency)**
Bukti audit harus diperoleh dalam jumlah yang memadai agar auditor berkeyakinan bahwa tidak ada salah saji material atas laporan keuangan entitas
- b. **Ketepatan (Appropriateness)**
Kesesuaian bukti audit dilihat berdasarkan relevansinya dengan tujuan pemeriksaan. Bukti audit yang diperoleh harus mampu mendukung tujuan spesifik dari prosedur audit yang dilakukan. Misalnya bukti yang diperlukan untuk pengujian atas keberadaan akun persediaan yang tepat adalah hasil observasi fisik persediaan (stock opname) dan bukan sekadar catatan akuntansi atas akun persediaan.
- c. **Kualitas (Quality)**
Bukti audit yang berasal dari pihak eksternal dianggap berkualitas lebih tinggi dibandingkan bukti dari sumber internal seperti surat konfirmasi dari pihak ketiga (bank, pemasok dan pelanggan), faktur dari pemasok, dokumen perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga, laporan penilai independen (appraisal) atas kewajaran nilai aset tetap entitas dan surat keterangan hukum mengenai status perkara hukum entitas.
- d. **Materialitas Temuan**
Materialitas adalah ukuran umum yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya salah saji yang dapat ditoleransi oleh satu atau seluruh pos atau akun dalam laporan keuangan. Besar kecilnya tingkat materialitas ditentukan oleh auditor. Apabila auditor menemukan salah saji yang bersifat material

dan berdampak luas pada laporan keuangan, akan berpengaruh terhadap pemberian opini auditor.

E. Implikasi Opini Auditor

Auditor independen dianggap sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan opini audit dapat menjadi tolok ukur atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Opini audit menjadi variabel yang penting karena luasnya skala penggunaan laporan keuangan, sehingga opini audit yang diperoleh akan berdampak terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan. Implikasi opini auditor terhadap para pihak tersebut antara lain:

1. Implikasi terhadap Pihak Internal

- a. Reputasi dan Kredibilitas Perusahaan
Semakin baik opini audit yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja perusahaan, dan sebaliknya opini negatif dari auditor independen akan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
- b. Evaluasi atas Kinerja Manajemen
Opini audit merupakan refleksi wajar atau tidaknya laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Opini audit yang baik merupakan sinyal bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar akuntansi serta setiap pos laporan keuangan tersaji secara wajar, dan sebaliknya opini audit yang tidak baik menjadi sinyal bagi manajemen untuk melakukan evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan.
- c. Perbaikan Sistem Internal
Opini audit wajar dengan pengecualian atau tidak wajar merupakan sinyal kuat bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan internal, seperti sistem pengendalian, prosedur akuntansi dan dokumentasi.

2. Implikasi terhadap Pihak Eksternal

- a. Pemegang Saham dan Investor
 - Nilai Saham
Opini audit yang bersifat negatif akan menurunkan tingkat kepercayaan pemegang saham dan berdampak pada penurunan harga saham perusahaan.

- **Keputusan Investasi**

Opini audit merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh calon investor dan investor dalam menilai prospek perusahaan. Opini audit wajar tanpa pengecualian memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan investor atas laporan keuangan perusahaan.

- **Persepsi Risiko**

Opini audit negatif dapat menjadi sinyal adanya risiko-risiko dalam perusahaan tersebut antara lain risiko finansial (adanya ketidakakuratan laporan keuangan entitas) dan risiko strategis (adanya perbaikan sistem atau restrukturisasi internal yang perlu dilakukan oleh entitas) serta rendahnya tingkat kepatuhan entitas terhadap regulasi.

b. **Kreditur**

- **Penilaian Risiko Kredit**

Opini audit yang diperoleh oleh entitas menjadi pertimbangan bagi kreditur dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Opini audit wajar tanpa pengecualian dapat menurunkan risiko gagal bayar sedangkan opini negatif dapat menjadi sinyal bahwa ada kondisi tertentu di dalam internal perusahaan yang memerlukan perbaikan sehingga meningkatkan keraguan kreditur mengenai kemampuan pembayaran pinjaman perusahaan.

- **Hubungan Jangka Panjang**

Opini audit positif dapat menjamin kelangsungan hidup (going concern) perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan menjadi faktor penting bagi kreditur karena merupakan salah satu tolok ukur dalam kemampuan pembayaran pinjaman, sehingga kreditur cenderung akan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan perusahaan yang memperoleh opini audit positif.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi. (2014). *Auditing* (Edisi keenam, Cetakan pertama). Salemba Empat.

JAWABARA

TENTANG PENULIS



Khoirunnisa Cahya Firdarini, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Penulis lahir di Ponorogo, 13 Desember 1988.

Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi dan Magister Program Studi Akuntansi ditempuh di STIE YKPN Yogyakarta dan lulus pada tahun 2014. Penulis adalah dosen STIE

Widya Wiwaha sejak tahun 2017 hingga sekarang. Selama kurun waktu tersebut penulis aktif melakukan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, menulis buku teks dan bekerjasama dengan asosiasi untuk menyelenggarakan program Brevet Pajak A & B untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Buku ini merupakan buku kedua yang ditulis. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

JANVARA

BAB 16



AUDIT DIGITAL DAN TRANSFORMASI PROFESI

Refiana Yulawati, S.Pd., M.Akun
Politeknik Tunas Pemuda

A. Konsep Dasar Audit Digital

Audit digital merupakan perkembangan penting dalam profesi audit seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan pelaporan keuangan. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin terdigitalisasi menyebabkan auditor tidak lagi cukup hanya memahami dokumen fisik, pencatatan manual, dan prosedur pemeriksaan tradisional. Auditor perlu memahami sistem informasi, basis data, alur transaksi elektronik, pengendalian teknologi informasi, serta risiko yang muncul dari penggunaan perangkat digital. Dalam lingkungan digital, transaksi ekonomi terjadi dengan kecepatan tinggi dan volume data yang sangat besar. Aktivitas penjualan, pembelian, pembayaran, persediaan, penggajian, dan pelaporan keuangan semakin banyak dilakukan melalui sistem terintegrasi. Kondisi tersebut mengubah cara auditor memperoleh bukti audit, menilai risiko, dan melakukan pengujian. Audit digital hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pemeriksaan yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data. Audit digital tidak berarti menghilangkan prinsip dasar audit. Tujuan audit tetap diarahkan untuk memperoleh keyakinan

memadai atas kewajiban informasi keuangan. Namun, cara memperoleh bukti, teknik analisis, cakupan pemeriksaan, dan kompetensi auditor mengalami transformasi. Oleh karena itu, audit digital perlu dipahami sebagai pengembangan metodologi audit yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kedalaman pemeriksaan (Putra, 2025).

1. Pengertian Audit Digital

Audit digital adalah proses pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi informasi, perangkat lunak audit, analisis data, dan sistem digital untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, serta mengevaluasi bukti audit. Dalam audit digital, auditor menggunakan data elektronik sebagai sumber utama pemeriksaan dan menerapkan teknik berbasis teknologi untuk mengidentifikasi risiko, menguji transaksi, serta menyusun kesimpulan audit. Audit digital mencakup penggunaan berbagai alat dan pendekatan, seperti *computer-assisted audit techniques*, *data analytics*, *automated testing*, *continuous auditing*, *artificial intelligence*, *robotic process automation*, dan visualisasi data. Pendekatan ini memungkinkan auditor menganalisis populasi data yang lebih luas dibandingkan pengujian sampel secara tradisional. Dengan demikian, auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola transaksi, anomali, hubungan antar variabel, dan indikasi risiko. Dalam konteks laporan keuangan, audit digital digunakan untuk menguji transaksi yang tersimpan dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Auditor dapat mengekstraksi data dari sistem *enterprise resource planning*, aplikasi akuntansi, sistem penjualan, sistem persediaan, sistem perbankan, dan *platform* digital lain. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kewajaran saldo, ketepatan pencatatan, kelengkapan transaksi, serta potensi penyimpangan. Audit digital juga mencakup penilaian terhadap pengendalian teknologi informasi. Auditor perlu memahami bagaimana sistem memproses transaksi, siapa yang memiliki akses, bagaimana perubahan data dikendalikan, bagaimana sistem mencatat jejak audit, serta bagaimana keamanan data dijaga. Dengan demikian, audit digital tidak hanya berfokus pada angka dalam laporan keuangan, tetapi juga pada keandalan sistem yang menghasilkan angka tersebut.

2. Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Digital

Audit konvensional umumnya berorientasi pada pemeriksaan dokumen fisik, pengujian sampel, wawancara, observasi, dan inspeksi atas catatan manual. Dalam pendekatan ini,

auditor banyak bergantung pada bukti berbasis kertas, seperti faktur, kuitansi, kontrak, bukti kas, dan laporan cetak. Prosedur audit dilakukan secara bertahap dengan tingkat otomatisasi yang relatif terbatas. Audit digital memiliki karakter berbeda karena data yang diperiksa sebagian besar berbentuk elektronik. Auditor menggunakan perangkat lunak untuk mengekstraksi, membersihkan, mengolah, dan menganalisis data. Pemeriksaan dapat mencakup populasi transaksi yang lebih besar, bahkan seluruh transaksi pada periode tertentu. Pendekatan ini memungkinkan auditor mendeteksi pola tidak biasa yang sulit ditemukan melalui pengujian manual (Hadi & Ashlah, 2023). Perbedaan lain terletak pada fokus risiko. Audit konvensional lebih banyak menekankan risiko salah saji dalam dokumen dan pencatatan. Audit digital menambahkan perhatian pada risiko sistem, seperti akses tidak sah, manipulasi data, kesalahan konfigurasi aplikasi, kelemahan pengendalian otomatis, kehilangan data, dan serangan siber. Oleh karena itu, auditor digital harus memiliki pemahaman teknis yang lebih luas mengenai sistem informasi. Perbedaan audit konvensional dan audit digital dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 16.1 Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Digital

Aspek	Audit Konvensional	Audit Digital
Sumber bukti	Dokumen fisik dan catatan manual	Data elektronik dan sistem informasi
Teknik pemeriksaan	Pengujian sampel dan inspeksi manual	Analisis data, otomatisasi, dan pengujian berbasis sistem
Fokus risiko	Salah saji transaksi dan saldo	Salah saji, risiko sistem, keamanan data, dan akses
Cakupan pengujian	Terbatas pada sampel tertentu	Dapat mencakup populasi data yang lebih luas
Kompetensi auditor	Akuntansi, audit, dan pengendalian internal	Akuntansi, audit, teknologi informasi, dan analitik data

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa audit digital bukan sekadar penggunaan komputer dalam pekerjaan audit, melainkan perubahan cara berpikir auditor dalam memahami data, risiko, dan bukti audit. Auditor dituntut untuk mampu menggabungkan kompetensi audit dengan kemampuan teknologi agar pemeriksaan tetap relevan dalam lingkungan bisnis digital.

B. Perkembangan Teknologi dalam Praktik Audit

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam praktik akuntansi dan audit. Sistem informasi akuntansi yang sebelumnya bersifat sederhana kini berkembang menjadi sistem terintegrasi yang mampu mencatat transaksi secara otomatis, menghasilkan laporan secara real-time, dan menghubungkan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi profesi auditor. Teknologi informasi meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga menciptakan risiko baru. Transaksi yang diproses secara otomatis dapat mengurangi kesalahan manual, tetapi kesalahan sistem dapat berdampak luas terhadap banyak transaksi. Data yang tersimpan secara digital memudahkan analisis, tetapi juga rentan terhadap akses tidak sah dan manipulasi. Oleh karena itu, auditor perlu memahami perkembangan teknologi agar dapat merancang prosedur audit yang sesuai.

1. Digitalisasi Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Audit

Digitalisasi sistem informasi akuntansi mengubah proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan. Dalam sistem manual, transaksi dicatat melalui jurnal dan buku besar secara bertahap. Dalam sistem digital, transaksi dapat langsung masuk ke modul akuntansi melalui integrasi dengan penjualan, pembelian, persediaan, perbankan, dan perpajakan. Sistem ini mempercepat penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan ketersediaan data bagi manajemen. Dampak digitalisasi terhadap audit sangat signifikan. Auditor tidak lagi hanya memeriksa dokumen akhir, tetapi juga perlu memahami alur pemrosesan transaksi dalam sistem. Contohnya, transaksi penjualan dapat dimulai dari pesanan pelanggan, dilanjutkan dengan pengiriman barang, penerbitan faktur, pencatatan piutang, hingga penerimaan kas. Jika seluruh proses dilakukan secara elektronik, auditor harus memahami pengendalian otomatis pada setiap tahap.

Digitalisasi juga memengaruhi bukti audit. Bukti audit tidak selalu berbentuk dokumen fisik, tetapi dapat berupa file elektronik, log sistem, rekam jejak transaksi, metadata, dan konfirmasi digital. Auditor perlu menilai keandalan bukti elektronik tersebut. Bukti digital memiliki keunggulan karena dapat ditelusuri secara rinci, tetapi juga memiliki risiko apabila sistem tidak memiliki pengendalian akses dan keamanan yang memadai. Selain itu, digitalisasi meningkatkan kebutuhan terhadap audit trail. Audit

trail adalah jejak yang menunjukkan siapa melakukan transaksi, kapan transaksi dilakukan, perubahan apa yang terjadi, dan bagaimana transaksi diproses. Sistem yang memiliki audit trail kuat membantu auditor menelusuri transaksi secara lebih efektif. Sebaliknya, sistem tanpa audit trail yang memadai dapat menyulitkan auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat (Novida, 2025).

2. Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pemeriksaan

Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan dengan mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Auditor dapat menggunakan perangkat lunak audit untuk mengekstraksi data dari sistem klien, melakukan rekonsiliasi otomatis, mengidentifikasi transaksi tidak biasa, serta menghasilkan laporan analitis. Prosedur yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat dilakukan lebih cepat melalui otomatisasi. Efisiensi juga terlihat dalam pengujian populasi transaksi. Dalam audit manual, auditor sering menggunakan sampel karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Dengan teknologi, auditor dapat melakukan pengujian terhadap seluruh populasi transaksi tertentu. Contohnya, auditor dapat menguji seluruh transaksi penjualan untuk menemukan nomor faktur ganda, transaksi di luar jam operasional, harga tidak wajar, atau transaksi dengan pihak tertentu.

Teknologi informasi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dan dokumentasi audit. Kertas kerja audit dapat disusun secara elektronik, disimpan dalam sistem audit, dan direviu secara daring oleh supervisor. Hal ini mempercepat proses supervisi, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan meningkatkan konsistensi dokumentasi. Auditor juga dapat menggunakan *platform* kolaborasi untuk berkomunikasi dengan klien, meminta dokumen, dan memantau status permintaan data. Namun, efisiensi teknologi tidak boleh mengurangi skeptisisme profesional. Auditor tetap harus menilai kualitas data, validitas hasil analisis, dan kecukupan bukti. Analisis yang dilakukan oleh perangkat lunak hanya bermanfaat apabila data yang digunakan lengkap, akurat, dan relevan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan validasi data sebelum menarik kesimpulan dari hasil analisis digital (Noviani & Astuti, 2025).

C. Pemanfaatan *Data Analytics* dalam Audit

Data analytics menjadi salah satu elemen utama dalam audit digital. Melalui data analytics, auditor dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola, tren, hubungan, dan anomali yang relevan dengan risiko audit. Pendekatan ini memungkinkan auditor memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai transaksi dan saldo akun dibandingkan metode pemeriksaan tradisional yang hanya berfokus pada sampel terbatas. Pemanfaatan data analytics dalam audit sejalan dengan pendekatan audit berbasis risiko. Auditor dapat menggunakan analisis data untuk menentukan area yang memiliki risiko tinggi, merancang prosedur audit yang lebih tepat, serta mengevaluasi hasil pemeriksaan secara lebih objektif. Dengan demikian, data *analytics* tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga bagian dari strategi audit modern.

1. Konsep Data Analytics dalam Proses Audit

Data analytics dalam proses audit adalah penggunaan teknik analisis data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian audit. Teknik ini mencakup pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, analisis pola, pengujian anomali, dan visualisasi hasil. Auditor dapat menggunakan data analytics untuk memahami karakteristik transaksi, mengidentifikasi area berisiko, dan memperoleh bukti audit. Pada tahap perencanaan, data analytics dapat digunakan untuk memahami profil entitas. Auditor dapat menganalisis tren penjualan, pola pembayaran, fluktuasi margin laba, perubahan saldo akun, dan hubungan antarpos laporan keuangan. Hasil analisis membantu auditor menentukan area yang memerlukan perhatian khusus. Contohnya, peningkatan penjualan yang tidak sejalan dengan penerimaan kas dapat menunjukkan risiko pengakuan pendapatan yang tidak tepat.

Pada tahap pelaksanaan audit, data *analytics* dapat digunakan untuk pengujian substantif. Auditor dapat mencari transaksi duplikat, transaksi tanpa otorisasi, transaksi di luar batas normal, jurnal manual yang dibuat mendekati akhir periode, atau pembayaran kepada pemasok tidak aktif. Analisis semacam ini membantu auditor mengarahkan pengujian pada transaksi yang memiliki risiko lebih tinggi. Pada tahap penyelesaian audit, data analytics dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi hasil pemeriksaan. Auditor dapat membandingkan temuan audit dengan pola data secara keseluruhan. Jika terdapat anomali signifikan yang belum dijelaskan, auditor perlu melakukan

prosedur tambahan. Dengan demikian, data analytics memperkuat dasar auditor dalam menarik Kesimpulan (Khusna et al., 2025).

2. **Penggunaan *Big Data* dan Analisis Berbasis Risiko dalam Pemeriksaan**

Big data merujuk pada data dalam volume besar, beragam bentuk, dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam konteks audit, big data dapat berasal dari transaksi keuangan, data operasional, data pelanggan, data pemasok, media sosial, sensor, sistem logistik, dan *platform* digital. Penggunaan big data memungkinkan auditor memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai aktivitas entitas. Analisis berbasis risiko menggunakan data untuk mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap salah saji material. Auditor tidak hanya memilih sampel secara acak, tetapi dapat memilih transaksi berdasarkan indikator risiko tertentu. Misalnya, transaksi dengan nilai sangat besar, transaksi yang dilakukan di luar jam kerja, transaksi dengan perubahan harga ekstrem, atau transaksi yang melibatkan pihak berelasi dapat diprioritaskan untuk diuji. Penggunaan big data juga dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pola transaksi yang tidak biasa dapat mengindikasikan manipulasi pendapatan, pembayaran fiktif, penggelapan aset, atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun analisis data tidak secara langsung membuktikan kecurangan, hasil analisis dapat menjadi indikator awal untuk melakukan prosedur investigatif lebih lanjut. Manfaat data analytics dalam audit dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 16.2 Penggunaan *Big Data* dan Analisis Berbasis Risiko dalam Pemeriksaan

Tahap Audit	Pemanfaatan Data Analytics	Manfaat
Perencanaan	Analisis tren, rasio, dan pola transaksi	Mengidentifikasi area risiko
Pelaksanaan	Pengujian transaksi, deteksi anomali, rekonsiliasi data	Memperkuat bukti audit
Penyelesaian	Evaluasi konsistensi temuan dan visualisasi hasil	Mendukung kesimpulan audit
Pengawasan risiko	Pemantauan transaksi tertentu secara berkala	Meningkatkan deteksi dini

Meskipun memiliki manfaat besar, penggunaan big data memerlukan kehati-hatian. Auditor harus menilai kualitas data, sumber data, integritas data, dan relevansi data dengan tujuan audit.

Data yang besar tidak selalu berarti data yang andal. Oleh karena itu, kompetensi analitis harus disertai kemampuan profesional dalam menilai bukti audit.

D. Teknologi Baru dalam Audit Modern

Audit modern semakin dipengaruhi oleh teknologi baru seperti *artificial intelligence*, *machine learning*, *robotic process automation*, *blockchain*, dan *cloud computing*. Teknologi tersebut mengubah cara transaksi dilakukan, cara data disimpan, dan cara bukti audit diperoleh. Auditor perlu memahami peluang dan risiko yang muncul agar dapat mempertahankan kualitas audit di tengah perubahan lingkungan digital. Teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan audit, tetapi juga menciptakan kompleksitas baru. Sistem berbasis kecerdasan buatan dapat menghasilkan keputusan otomatis, tetapi proses pengambilan keputusan algoritmik dapat sulit dijelaskan. *Blockchain* dapat meningkatkan transparansi transaksi, tetapi tetap memerlukan penilaian atas validitas ekonomi transaksi. *Cloud computing* memudahkan akses data, tetapi menimbulkan risiko keamanan dan ketergantungan pada penyedia layanan (Harahap & Lubis, 2025).

1. Penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Robotic Process Automation dalam Audit

Artificial intelligence merupakan teknologi yang memungkinkan sistem melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali pola, mengklasifikasikan data, memproses bahasa, dan memberikan rekomendasi. Dalam audit, *artificial intelligence* dapat digunakan untuk menganalisis dokumen, membaca kontrak, mengidentifikasi transaksi tidak biasa, dan membantu penilaian risiko. *Machine learning* merupakan bagian dari *artificial intelligence* yang memungkinkan sistem belajar dari data dan meningkatkan hasil analisis berdasarkan pola historis. Dalam audit, *machine learning* dapat digunakan untuk memprediksi risiko salah saji, mengelompokkan transaksi, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi pola yang tidak mudah terlihat melalui analisis manual. Misalnya, model *machine learning* dapat membantu menemukan jurnal yang memiliki karakteristik tidak biasa dibandingkan pola transaksi normal.

Robotic process automation merupakan teknologi yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas berulang dan berbasis aturan. Dalam audit, *robotic process automation* dapat digunakan

untuk mengambil data dari sistem klien, mencocokkan saldo, mengirim permintaan konfirmasi, memindahkan data ke kertas kerja audit, atau melakukan pemeriksaan format dokumen. Teknologi ini membantu auditor mengurangi pekerjaan administratif dan memusatkan perhatian pada analisis yang membutuhkan pertimbangan profesional. Penerapan teknologi tersebut tidak menghilangkan peran auditor. Auditor tetap bertanggung jawab menilai hasil analisis, memahami keterbatasan algoritma, dan memastikan bahwa kesimpulan audit didasarkan pada bukti yang cukup dan tepat. Auditor juga perlu memahami risiko bias data, kesalahan model, dan kurangnya transparansi dalam sistem otomatis.

2. Pemanfaatan *Blockchain* dan *Cloud Computing* dalam Lingkungan Audit

Blockchain adalah teknologi pencatatan terdistribusi yang memungkinkan transaksi dicatat secara permanen, transparan, dan sulit diubah. Dalam lingkungan audit, *blockchain* dapat memberikan peluang untuk meningkatkan keandalan jejak transaksi. Jika transaksi dicatat dalam jaringan *blockchain*, auditor dapat menelusuri riwayat transaksi dengan tingkat integritas data yang lebih tinggi. Namun, *blockchain* tidak secara otomatis menghilangkan kebutuhan audit. Auditor tetap harus menilai apakah transaksi yang dicatat memiliki substansi ekonomi yang valid, apakah pihak yang bertransaksi memiliki otorisasi, apakah aset yang direpresentasikan benar-benar ada, dan apakah perlakuan akuntansi telah tepat. *Blockchain* dapat membuktikan bahwa transaksi tercatat, tetapi tidak selalu membuktikan kewajaran nilai, kepemilikan hukum, atau tujuan ekonomi transaksi.

Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data melalui server berbasis internet. Banyak entitas menggunakan sistem akuntansi, penyimpanan dokumen, dan aplikasi bisnis berbasis *cloud*. Dalam audit, *cloud computing* memudahkan akses data dan kolaborasi, tetapi juga menimbulkan risiko terkait keamanan data, lokasi penyimpanan, kontrol akses, serta ketergantungan pada penyedia layanan. Auditor perlu memahami pengendalian pada layanan *cloud*, termasuk otorisasi akses, enkripsi data, pencadangan, pemulihan bencana, dan perjanjian layanan. Jika entitas menggunakan penyedia jasa teknologi, auditor perlu mempertimbangkan apakah pengendalian pada penyedia jasa tersebut relevan dengan pelaporan keuangan. Dengan demikian,

audit dalam lingkungan *cloud* memerlukan pemahaman atas pengendalian internal yang melampaui batas organisasi klien (Hanif & Sugiantoro, 2025).

E. Tantangan dan Risiko Audit Digital

Audit digital memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan dan risiko baru. Ketergantungan pada teknologi membuat auditor harus memperhatikan keamanan data, privasi, keandalan sistem, serta integritas informasi elektronik. Kesalahan dalam memahami sistem dapat menyebabkan auditor gagal mengidentifikasi risiko salah saji material. Selain risiko teknis, audit digital juga menuntut perubahan kompetensi auditor. Auditor harus menguasai standar audit, akuntansi, dan etika profesi, sekaligus memahami teknologi informasi, analisis data, dan risiko siber. Kesenjangan kompetensi dapat menjadi hambatan dalam penerapan audit digital secara efektif.

1. Risiko Keamanan Data, Privasi, dan Keandalan Sistem Informasi

Keamanan data merupakan risiko utama dalam audit digital. Data audit sering berisi informasi sensitif, seperti laporan keuangan, data pelanggan, data pemasok, data karyawan, informasi pajak, dan strategi bisnis. Jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, entitas dan auditor dapat menghadapi kerugian reputasi, hukum, dan finansial. Oleh karena itu, auditor harus menjaga kerahasiaan data dan menggunakan prosedur pengamanan yang memadai. Privasi juga menjadi perhatian penting. Auditor perlu memastikan bahwa penggunaan data dalam proses audit sesuai dengan ketentuan hukum, perjanjian dengan klien, dan prinsip etika profesi. Data pribadi yang diperoleh selama audit tidak boleh digunakan di luar tujuan pemeriksaan. Auditor juga perlu membatasi akses hanya kepada personel yang berwenang.

Keandalan sistem informasi memengaruhi kualitas bukti audit. Jika sistem memiliki kelemahan pengendalian, data yang dihasilkan dapat tidak lengkap, tidak akurat, atau mudah dimanipulasi. Auditor perlu menilai pengendalian umum teknologi informasi, seperti pengelolaan akses, pengembangan sistem, perubahan program, operasi sistem, dan pencadangan data. Pengendalian aplikasi juga perlu diuji, terutama pengendalian input, pemrosesan, dan output transaksi. Risiko lain berkaitan dengan integritas data. Data yang diekstraksi dari sistem

klien harus lengkap dan tidak berubah selama proses analisis. Auditor perlu melakukan validasi data, seperti mencocokkan total data dengan buku besar, memeriksa periode data, menguji duplikasi, dan menilai kelengkapan field penting. Tanpa validasi, hasil analisis data dapat menyesatkan.

2. Tantangan Kompetensi Auditor dalam Menghadapi Perubahan Teknologi

Transformasi digital menuntut auditor memiliki kompetensi baru. Auditor tidak cukup hanya memahami standar akuntansi dan audit, tetapi juga perlu memahami sistem informasi, basis data, keamanan siber, data analytics, dan teknologi otomatisasi. Tantangan ini menjadi semakin besar karena perkembangan teknologi berlangsung cepat dan terus berubah. Kompetensi auditor digital mencakup kemampuan membaca struktur data, memahami alur sistem, menggunakan perangkat lunak analitik, menafsirkan hasil analisis, serta mengidentifikasi risiko teknologi. Auditor juga perlu memiliki kemampuan komunikasi agar dapat menjelaskan temuan berbasis data kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Kesenjangan kompetensi dapat menyebabkan auditor terlalu bergantung pada alat teknologi tanpa memahami hasilnya. Kondisi ini berbahaya karena teknologi hanya menghasilkan output berdasarkan data dan aturan yang diberikan. Auditor tetap harus menilai apakah output tersebut relevan, andal, dan cukup sebagai bukti audit. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan skeptisisme profesional tetap menjadi inti kompetensi auditor. Tantangan kompetensi juga berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Kantor audit, perguruan tinggi, dan organisasi profesi perlu memperkuat kurikulum dan pelatihan yang mengintegrasikan audit, akuntansi, teknologi informasi, dan etika. Pengembangan kompetensi tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan sepanjang karier profesional auditor (Priardhina & Sari, 2025).

F. Transformasi Profesi Auditor di Era Digital

Era digital membawa transformasi besar terhadap profesi auditor. Peran auditor berkembang dari pemeriksa transaksi berbasis dokumen menjadi analis risiko, evaluator sistem, dan penafsir data. Transformasi ini tidak menghilangkan nilai dasar profesi audit, tetapi memperluas ruang lingkup kompetensi dan metode kerja auditor. Profesi auditor di era digital dituntut untuk lebih adaptif, kolaboratif,

dan berbasis teknologi. Auditor harus mampu bekerja dengan ahli teknologi informasi, analis data, pakar keamanan siber, dan manajemen sistem. Namun, aspek etika, independensi, objektivitas, dan skeptisisme profesional tetap menjadi landasan utama agar transformasi digital tidak mengurangi integritas audit.

1. Perubahan Peran Auditor dari Pemeriksa Manual ke Analis Berbasis Teknologi

Peran auditor mengalami perubahan dari pemeriksa manual yang berfokus pada dokumen dan sampel transaksi menjadi analis berbasis teknologi yang mampu memahami data dalam skala besar. Auditor tidak lagi hanya memeriksa apakah transaksi memiliki bukti pendukung, tetapi juga menilai pola transaksi, efektivitas pengendalian otomatis, serta risiko yang muncul dari sistem digital. Dalam peran baru ini, auditor perlu mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pertimbangan profesional. *Data analytics* dapat membantu auditor melihat hubungan yang sebelumnya sulit terdeteksi. *Artificial intelligence* dapat membantu mengidentifikasi transaksi berisiko. *Robotic process automation* dapat mengurangi pekerjaan rutin. Namun, auditor tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan. Perubahan peran juga mencakup peningkatan fungsi konsultatif dalam batas independensi. Auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian internal, tata kelola data, dan manajemen risiko teknologi. Namun, auditor harus menjaga batas agar tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen. Independensi tetap harus dipertahankan dalam setiap penugasan. Transformasi peran auditor dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 16.3 Perubahan Peran Auditor dari Pemeriksa Manual ke Analis Berbasis Teknologi

Peran Tradisional	Peran Era Digital
Pemeriksa dokumen fisik	Analisis data dan evaluator sistem
Penguji sampel transaksi	Penguji populasi dan pola transaksi
Fokus pada bukti manual	Fokus pada bukti digital dan audit trail
Pemeriksa kepatuhan prosedur	Penilai risiko teknologi dan pengendalian otomatis
Pelaksana prosedur rutin	Pengguna analitik dan pertimbangan profesional tingkat lanjut

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa auditor masa kini harus mampu menggabungkan keterampilan teknis, analitis, dan etis. Nilai auditor tidak lagi hanya terletak pada kemampuan memeriksa dokumen, tetapi pada kemampuan memahami risiko, membaca data, dan memberikan kesimpulan yang andal.

2. Strategi Penguatan Kompetensi dan Etika Profesi Auditor Digital

Penguatan kompetensi auditor digital perlu dilakukan secara sistematis. Pertama, auditor harus meningkatkan literasi teknologi informasi. Pemahaman dasar mengenai sistem informasi akuntansi, basis data, jaringan, keamanan data, dan pengendalian teknologi menjadi kebutuhan penting. Kedua, auditor perlu menguasai data *analytics* agar mampu menggunakan data secara efektif dalam pemeriksaan. Ketiga, auditor harus memahami risiko digital, termasuk risiko siber, privasi, dan keandalan sistem. Strategi penguatan kompetensi juga dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, kolaborasi multidisipliner, dan penggunaan studi kasus berbasis teknologi. Perguruan tinggi dan lembaga profesi perlu menyesuaikan kurikulum agar calon auditor tidak hanya memahami konsep audit tradisional, tetapi juga siap menghadapi lingkungan audit digital (Kurniawati & Primasatya, 2024).

Etika profesi tetap menjadi aspek utama dalam audit digital. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan persoalan etis, seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, bias algoritma, dan ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis. Auditor harus menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi profesional, dan independensi dalam seluruh proses audit digital. Kerahasiaan menjadi semakin penting karena auditor mengakses data elektronik dalam jumlah besar. Auditor harus memastikan bahwa data klien disimpan, diproses, dan dibagikan secara aman. Objektivitas juga perlu dijaga ketika auditor menggunakan alat analitik yang dikembangkan pihak tertentu. Auditor harus memahami keterbatasan alat dan tidak menerima hasil teknologi tanpa evaluasi kritis. Strategi penguatan profesi auditor digital dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 16.4 Strategi Penguatan Kompetensi dan Etika Profesi Auditor Digital

Strategi	Bentuk Implementasi	Tujuan
Penguatan literasi teknologi	Pelatihan sistem informasi dan pengendalian TI	Memahami lingkungan digital klien
Penguasaan data analytics	Pelatihan perangkat analitik dan visualisasi data	Meningkatkan kualitas analisis audit
Penguatan etika digital	Kebijakan kerahasiaan, privasi, dan penggunaan data	Menjaga integritas profesi
Kolaborasi multidisipliner	Kerja sama dengan ahli TI dan keamanan siber	Memperkuat pemahaman risiko teknologi
Pembelajaran berkelanjutan	Sertifikasi dan pelatihan rutin	Menyesuaikan kompetensi dengan perubahan teknologi

Transformasi profesi auditor di era digital menuntut keseimbangan antara penguasaan teknologi dan keteguhan etika. Teknologi dapat memperkuat kualitas audit apabila digunakan secara tepat, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan profesional auditor. Oleh karena itu, auditor digital harus menjadi profesional yang mampu mengelola data, memahami sistem, menilai risiko, dan tetap menjaga tanggung jawab moral terhadap kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S., & Ashlah, I. (2023). Peran audit digital dalam masyarakat 5.0. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 83–95.
- Hanif, H., & Sugiantoro, B. (2025). Analisis risiko dan solusi keamanan data pada layanan cloud computing di era industri 4.0. *Jurnal Media Informatika*, 6(6), 3040–3046.
- Harahap, R. Y., & Lubis, R. H. (2025). Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi audit keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(3), 558–561.
- Khusna, T., Fransiska, M., Karimah, N. A., & Arwani, A. (2025). Peran big data analytics dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13–26.
- Kurniawati, S., & Primasatya, R. D. (2024). Model pengembangan kemampuan auditor dalam tantangan era Society 5.0 di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 212–221.
- Novida, D. R. (2025). Evolusi sistem informasi akuntansi dalam era digital: Tinjauan literatur tentang tren, tantangan, dan peluang. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 77–85.
- Noviani, N., & Astuti, D. (2025). The role of accounting information systems audit in ensuring the reliability of digital marketing data. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(4), 993–998.
- Priardhina, I. D. N., & Sari, R. P. (2025). Kesiapan kompetensi auditor dalam menjawab tantangan kualitas audit di era digital: Peran moderasi teknologi cybersecurity. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 6(2), 301–315.
- Putra, I. H. (2025). *Auditing 1: Teori, praktik profesional, dan transformasi digital*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

TENTANG PENULIS



Refiana Yuliawati, S.Pd., M.Akun
Politeknik Tunas Pemuda

Penulis lahir di Kediri, 13 Juli 1994. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas PGRI Madiun dengan Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, lulus tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Studi Magister tahun 2018 di Universitas Negeri Malang pada Program Studi Magister Akuntansi dengan Manajemen Keuangan, lulus tahun 2022. Penulis mengajar menjadi dosen di Politeknik Tunas Pemuda dan menjadi tutor di Universitas Terbuka. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.